

KHOIRUN NIAM

BAHAN AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU (PLPG)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

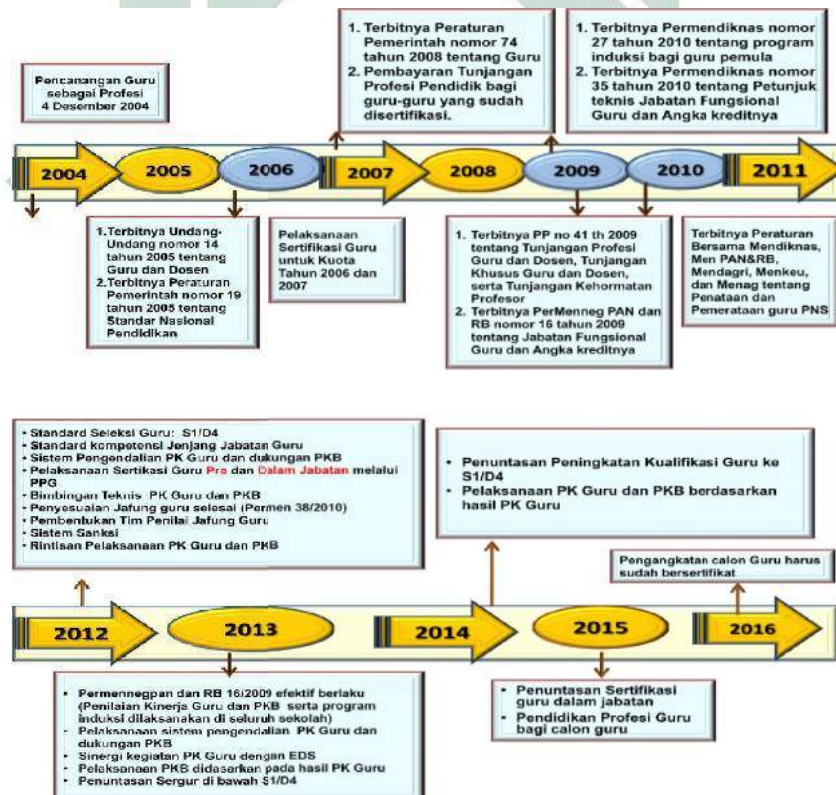


LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA

dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi model-model dan proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, kekompakan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang. Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertarungan dan respon manusia yang kuat agar siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban.

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyangganya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya.



Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan Dosen telah menempuh perjalanan panjang. Pencanangan *Guru sebagai Profesi* oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pascalahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan

Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2012 dan seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara simultan, yaitu mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, dan sebagainya. Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait.

1.2. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis Sekolah/Madrasah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamankan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. *Pertama*, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. *Kedua*, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. *Keempat*, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. *Kelima*, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. *Keenam*, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. *Ketujuh*, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan

kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. *Kedelapan*, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik yang “legal” direkrut sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkrut untuk bertugas pada Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkrut untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus Sekolah/Madrasah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.

Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada Sekolah/Madrasah-Sekolah/Madrasah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sunggupun guru yang direkrut telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperlukan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional.

Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (*beginning teacher*) terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki di Sekolah/Madrasah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua subsistem yang ada di Sekolah/Madrasah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi program induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini.

Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.

1.3. Alur Pengembangan Profesi dan Karir

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa,

dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Saat ini penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan *guru* mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.2. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul pranggapan, jangan bermimpi menghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemertabatan, dan pelaksanaan etika profesi mereka terjamin.

Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3., diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan pembinaan profesi dan karir guru.

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan

pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tentang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (*training provider*) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala Sekolah/Madrasah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis.

Pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pangkat ini dilakukan melalui dua jalur. *Pertama*, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. *Kedua*, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.

1.4. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, jenjangan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir (lihat Gambar 1.4), hingga menjadi guru profesional sejati, yang menjalankan profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi.

Pengembangan keprofesionalan guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Penilaian kinerja guru (*teacher performance appraisal*) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya.

Disamping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian,

diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pelaksanaan pelaporan penataan dan pemerataan guru disajikan berikut ini.

1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. Kemudian Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Kemudian Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.
3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.
2. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kompetensi Guru

2.1. Esensi Peningkatan Kompetensi Guru

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tuntutan perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Hingga kini, baik dalam fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji kompetensi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Uji-coba studi video terhadap sejumlah guru di beberapa lokasi sampel melengkapi bukti keraguan itu. Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari studi tersebut di antaranya adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya.

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial.

Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Akibatnya, produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah. *Kedua*, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa substansi materi pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik terus berkembang baik volume maupun kompleksitasnya.

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (*accelerated learning*), kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah jumlah, jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat dituntaskan dalam interval waktu yang sama. Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan Sekolah/Madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

2.2. Prinsip-Prinsip dalam Peningkatan Kompetensi dan Karir Guru

1. Prinsip-prinsip Umum

Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

2.3.2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

- a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di Sekolah/Madrasah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
- b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
- g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

2.3.3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Penetapan Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang terkandung dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Dalam Permeneg PAN dan RB ini, jabatan fungsional terdiri dari empat jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.

Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Gambar 2.1. menunjukkan keterkaitan antara PKB, PK Guru, dan pengembangan karir guru.

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan Sekolah/Madrasah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta

didik. Dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah/madrasah. Kegiatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya.

Secara umum, keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah/Madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini.

1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.
3. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

Dengan PKB untuk guru, bagi Sekolah/Madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga Sekolah/Madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di Sekolah/Madrasah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah, PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur.

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gambar 2.2 menunjukkan siklus kegiatan PKB bagi guru. Melalui siklus kegiatan pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan, diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan karirnya. Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di Sekolah/Madrasah, baik oleh guru secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu Sekolah/Madrasah. Kegiatan PKB melalui jaringan Sekolah/Madrasah dapat dilakukan dalam satu

rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama Sekolah/Madrasah antarnegara serta kerjasama Sekolah/Madrasah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya; kunjungan ke Sekolah/Madrasah lain, dunia usaha, industri, dan sebagainya; mengundang nara sumber dari Sekolah/Madrasah lain, komite Sekolah/Madrasah, dinas pendidikan, seksi bidang pendidikan kementerian agama, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.

Jika kegiatan PKB di Sekolah/Madrasah dan jaringan Sekolah/Madrasah belum memenuhi kebutuhan pengembangan keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi Balai Diklat, Pusdiklat atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring virtual atau TIK. Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di Sekolah/Madrasah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini.

- 1.. Dilakukan oleh guru sendiri:
 - a. menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya;
 - b. menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll);
 - c. mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran;
 - d. membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; dan
 - e. mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh.
2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain:
 - a. mengobservasi guru lain;
 - b. mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar;
 - c. mengajar bersama-sama dengan guru lain (pola *team teaching*);
 - e. bersamaan dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dihadapi di Sekolah/Madrasah;
 - f. membahas artikel atau buku dengan guru lain; dan
 - g. merancang persiapan mengajar bersama guru lain.
3. Dilakukan oleh Sekolah/Madrasah :
 - a. *training day* untuk semua sumber daya manusia di Sekolah/Madrasah (bukan hanya guru);
 - b. kunjungan ke Sekolah/Madrasah lain; dan
 - c. mengundang nara sumber dari Sekolah/Madrasah lain atau dari instansi lain.

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti berikut ini.

1. Setiap guru di Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Hak tersebut perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB minimal selama tujuh hari atau 40 jam per tahun. Alokasi tujuh hari tersebut adalah alokasi minimal. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau Sekolah/Madrasah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu, termasuk penyediaan anggaran untuk kegiatan PKB.
3. Guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan. Alokasi waktu tujuh hari per tahun sebenarnya tidak cukup, sehingga guru harus tetap berusaha pada kesempatan lain di luar waktu tujuh hari tersebut. Keseriusan guru untuk mengembangkan dirinya merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan dinilai di dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dievaluasi kinerja tahunannya.
4. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa 'dikembangkan' oleh orang lain jika dia belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru tersebut

masing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, *workshop*, bimbingan teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; (3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) penyusunan RPP, program kerja, dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di Sekolah/Madrasah secara sistematis dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan dan atau bidang pendidikan kementerian agama Kabupaten/Kota/Provinsi.

Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada guru-guru yang lain, minimal di Sekolah/Madrasah masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan Sekolah/Madrasah secara menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat Sekolah/Madrasah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
- b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di Sekolah/Madrasah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala Sekolah/Madrasah dan disimpan di perpustakaan Sekolah/Madrasah. Bagi guru yang

- mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau bidang pendidikan kementerian agama setempat.
- c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan Sekolah/Madrasah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala Sekolah/Madrasah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah.

c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekadar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan PKB.

2.4. Uji Kompetensi

Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan.

Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.

2.4.1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu:

- a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

- b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2.4.2. Kompetensi Kepribadian

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

2.4.3. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan Sekolah/Madrasah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan.

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini.

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

- d. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru, dimana mereka harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
- e. Efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit.

Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan seperti berikut ini.

1. Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi maupun bersamaan dengan penilaian kinerja.
3. Dapat dilakukan secara manual (*offline*), *online*, atau kombinasinya.
4. Melalui tes kinerja atau *performance test*.
5. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, khusus untuk ranah pengetahuan.
6. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi

3. Penilaian Kinerja Guru

3.1. Latar Belakang dan Pengertian Penilaian Kinerja Guru

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Karena itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru (PK Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK Guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai masukan dalam penyusunan program PKB. Hasil PK Guru juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan "insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi" lebih cepat direalisasikan.

Menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi Sekolah/Madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang

3.2. Persyaratan Penilaian Kinerja Guru

Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis bagi pendidik

1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah/madrasah.
2. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.
3. Sistem PK Guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan

3.3. Prinsip Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau,
Apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah meliputi:
 - a. disiplin guru (kehadiran, ethos kerja),
 - b. efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa),
 - c. keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan
 - d. motivasi belajar siswa.
3. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian.
4. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya.
 - e. Memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.
 - f. Mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya.
 - g. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.
 - h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.
 - i. Periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru.
 - j. Boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

3.4. Aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru

Seperti telah dijelaskan di muka, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut.

dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) rekap hasil PK Guru sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya.

Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah dan mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen, yaitu: (i) instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK Guru pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah. Hasil PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

3.6. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit

Nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK Guru, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh Sekolah/Madrasah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke Sekolah/Madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.

Pengkonversian hasil PK Guru ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat Sekolah/Madrasah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK Guru yang dilaksanakan di Sekolah/Madrasah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala Sekolah/Madrasah. Bersama-sama dengan angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK Guru yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru.

1. Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah.

Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 3.4. Berdasarkan Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu. Seorang Guru yang akan dipromosikan naik jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut.

Tabel 3.4. Persyaratan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Guru

Jabatan Guru	Pangkat dan Golongan Ruang	Persyaratan Angka Kredit kenaikan pangkat dan jabatan	
		Kumulatif minimal	Kebutuhan Per jenjang
Guru Pertama	Penata Muda. III/a	100	50
	Penata Muda Tingkat I, III/b	150	50
Guru Muda	Penata. III/c	200	100
	Penata Tingkat I, III/d	300	100
Guru Madya	Pembina, IV/a	400	150
	Pembina Tingkat I, IV/b	550	150
	Pembinaan Utama Muda, IV/c	700	150
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IV/d	850	200
	Pembina Utama, IV/e	1.050	

Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit minimal yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

2. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah (Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan berdasarkan prosentase nilai PK Guru pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut.

- Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 - 100.
- Masing-masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran / pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009.
- Angka kredit per tahun masing-masing unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah yang diperoleh oleh guru dihitung menggunakan rumus tertentu.
- Angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah dijumlahkan sesuai persentasenya untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah total angka kreditnya = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75 angka kredit tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah.
 - Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala Sekolah/Madrasah total angka kreditnya = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
 - Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sebagai kepala perpustakaan / laboratorium / bengkel atau ketua rogram keahlian; total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/ pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran.

3. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi Sekolah/Madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru

Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru maksimum dua tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan sebagai berikut.

- a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, membimbing guru pemula, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.
- b. Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas-tugas sementara (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.

3.6. Penilai PK Guru

1. Kriteria Penilai

Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Apabila Kepala Sekolah/Madrasah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah/Madrasah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan oleh Pengawas Sekolah/Madrasah. Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut.

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala Sekolah/Madrasah yang dinilai.
- b. Memiliki Sertifikat Pendidik.
- c. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang tugas Guru/Kepala Sekolah/Madrasah yang akan dinilai.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
- f. Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah/Madrasah.

Dalam hal Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah/Madrasah, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau Guru Pembina/Koordinator PKB dari Sekolah/Madrasah lain atau oleh Pengawas Sekolah/Madrasah dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK Guru.

2. Masa Kerja

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk Sekolah/Madrasah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai dengan 10 guru per tahun.

3.6. Sanksi

Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK Guru, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK)

- b. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya.
- d. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya.
- e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Keputusan.
- f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan Sekolah/Madrasah.
- g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah-Sekolah yang ada di daerahnya.
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya.
- i. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di Sekolah/Madrasah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada Sekolah/Madrasah, dan/atau ke Dinas Pendidikan Provinsi/Bidang Pendidikan Kantor Wilayah masing-masing.

4. Satuan Pendidikan

- a. Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru
- b. Menyusun program kegiatan sesuai dengan Rambu-Rambu Penyelenggaraan PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru.
- c. Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten//Kota.
- d. Melaksanakan kegiatan PK Guru sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb.
- f. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas.
- g. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru.
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan pelaksanaan program.
- i. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru untuk tahun berikutnya.
- j. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Pengawas Sekolah/Madrasah.
- k. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkan angka kredit, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen hasil PK Guru. Pada kegiatan verifikasi jika diperlukan dan memang dibutuhkan tim penilai dapat mengunjungi Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten/Kota..
- l. Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan.

4. Pengembangan Karir Guru

4.1. Ranah Pengembangan Karir Guru

Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya.

Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari pengembangan keprofesionalisme guru secara berkelanjutan.

4.2. Ranah Pengembangan Karir Guru

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru secara pribadi. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu: penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

a. Penugasan Guru

Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu Sekolah/Madrasah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas Sekolah/Madrasah. Baik bertugas pada satu Sekolah/Madrasah atau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu:

- a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan/atau institusi dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Penugasan sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran

- 1) Kepala Sekolah/Madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala Sekolah/Madrasah melaporkan kepada bidang

- g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.
- h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.
- i. Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin g diatas juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

3. Unsur Penunjang

Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini.

- a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut.

- 1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5;
- 2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan
- 3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15.

Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua Sekolah/Madrasah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat yang menangani kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II. Bagi guru di lingkungan Kementerian Agama, surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar tersebut berasal dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon II.

- b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru

Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya:

- 1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya
- 2) Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional.
- 3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi
- 4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya
- 5) Menjadi tim penilai angka kredit
- 6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya.

- c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Tanda jasa dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada guru berdasarkan prestasi dan masa pengabdian dalam waktu tertentu. Penghargaan lain yang diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan/kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai karena pengabdian secara terus

menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

5. Perlindungan dan Penghargaan terhadap Guru

5.1. Latar Belakang dan Pengertian

Jumlah guru yang banyak dengan sebaran yang sangat luas merupakan potensi bagi mereka untuk mendidik anak bangsa di seluruh Indonesia secara nyaris tanpa batas akses geografis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun demikian, kondisi ini yang menyebabkan sebagian guru terbelenggu dengan fenomena sosial, kultural, psikologis, ekonomis, kepegawaian, dan lain-lain.

Fenomena ini bersumber dari apresiasi dan pencitraan masyarakat terhadap guru belum begitu baik, serta perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesejahteraan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka belum optimum. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Diundangkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah maju untuk mengangkat harkat dan martabat guru, khususnya di bidang perlindungan hukum bagi mereka. Materi perlindungan hukum terhadap guru mulai mengemuka dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini diperbaharui dan kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru itu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Di dalam PP ini perlindungan hukum bagi guru meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, dimensi perlindungan guru mendapatkan tidik tekan yang lebih kuat. Norma perlindungan hukum bagi guru tersebut di atas kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan diundangkannya UU No. 14 tahun 2005. Dalam UU ini, ranah perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk juga di dalamnya perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI.

Sepanjang berkaitan dengan hak guru atas beberapa dimensi perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas, sampai sekarang belum ada rumusan komprehensif mengenai standar operasi dan prosedurnya. Atas dasar itu, perlu dirumuskan standar yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI bagi guru.

Perlindungan bagi guru adalah usaha pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI yang diberikan kepada guru, baik berstatus sebagai PNS maupun bukan PNS. **Perlindungan hukum** adalah upaya melakukan perlindungan kepada guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlindungan hukum atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. **Perlindungan profesi** adalah upaya memberi perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Adapun **Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** kepada guru mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. **Perlindungan HaKI** adalah

pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. **Perjanjian kerja** adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama antara penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dengan guru. Kesepakatan kerja bersama merupakan kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama secara tripartit, yaitu penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, guru, dan Dinas Pendidikan atau Dinas Ketenagakerjaan pada wilayah administratif tempat guru bertugas. **Bantuan hukum** adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi hukum oleh LKHB mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain kepada guru.

Sementara itu **Advokasi** adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI bagi guru. Advokasi umumnya dilakukan melalui kolaborasi beberapa lembaga, organisasi, atau asosiasi yang memiliki kepedulian dan semangat kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan. **Mediasi** adalah proses penyelesaian sengketa guru berdasarkan perundingan yang melibatkan guru LKBH mitra, asosiasi atau organisasi profesi guru, dan pihak lain sebagai mediator dan diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan.

5.2. Perlindungan Atas Hak-hak Guru

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:

- a. hak cipta atas penulisan buku,
- b. hak cipta atas makalah,
- c. hak cipta atas karangan ilmiah,
- d. hak cipta atas hasil penelitian,
- e. hak cipta atas hasil penciptaan,
- f. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
- g. hak paten atas hasil karya teknologi

5.3. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru

1. Konsultasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut.

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan pengacara pada salah satu LKBH, penegak hukum, orang yang ahli, penasihat hukum, dan sebagainya berkaitan dengan masalah pembayaran gaji yang tidak layak, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain. Pihak-pihak yang dimintai pendapat oleh guru ketika berkonsultasi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, melainkan sebatas memberi pendapat atau saran, termasuk saran-saran atas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.

2. Mediasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasihat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

3. Negosiasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan,

penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya para pihak, dalam hal ini penyelenggara/satuan pendidikan dan guru, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak di bawah ancaman.

Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan.

4. Konsiliasi dan perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian. Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasi pun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, konsiliasi atau perdamaian tetap dapat dilakukan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Advokasi Litigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata.

Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

6. Advokasi Nonlitigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain,

diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar gaji pokok, guru pun berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji.

Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Ringkasnya, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan masalah tambahan. Khusus berkaitan dengan jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru disajikan berikut ini.

1. Penghargaan Guru Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Prestasi kerja tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Seperti disebutkan di atas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa "Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan". Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Selama kurun 1998-2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi.

Frasa "guru berprestasi" bermakna "prestasi dan keteladanan" guru. Sebutan guru berprestasi mengandung makna sebagai guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan; penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan guru berprestasi berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru terbaik untuk jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, atau yang sederajat.

Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional.

2. Penghargaan bagi Guru Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil

Guru yang bertugas di daerah khusus, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemberian penghargaan kepada mereka dilakukan secara rutin baik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional maupun pada peringatan lainnya. Tujuan penghargaan ini antara lain, *pertama*, mengangkat harkat dan martabat guru atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik bangsa dihormati dan dihargai oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Kedua*, memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas dan dedikasi serta darma baktinya pada bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasi masing-masing. *Ketiga*, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan / jabatannya sebagai sebuah profesi, meskipun bekerja di daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam; bencana sosial; atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain yang mengharuskan menjalani kehidupan secara prihatin.

Pemberian penghargaan kepada guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil bukanlah merupakan suatu kegiatan yang bersifat seremoni belaka. Penghargaan ini secara selektif dan kompetitif diberikan kepada dua orang guru Daerah Khusus dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama diminta dan diharuskan menyeleksi dan mengirimkan dua orang guru daerah khusus, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang berdedikasi tinggi untuk diberi penghargaan, baik yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (Guru PNS) maupun guru bukan PNS. Untuk dapat menerima penghargaan, guru berdedikasi yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dimaksud antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memiliki moralitas, kepribadian dan kelakuan yang terpuji; dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya; dan mencintai tugas dan tanggungjawabnya.

Kriteria khusus bagi guru Daerah Khusus untuk memperoleh penghargaan antara lain, *pertama*, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan dedikasi luar biasa, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi- fungsi profesionalnya dengan segala keterbatasan yang ada di daerah terpencil. *Kedua*, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus/terpencil sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus atau selama delapan tahun secara terputus-putus. *Keempat*, berusia minimal 40 tahun dan belum pernah menerima penghargaan yang sejenis di tingkat nasional. *Kelima*, responsif terhadap persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat. *Keenam*, dengan keahlian yang dimilikinya membantu dalam memecahkan masalah sosial sehingga usahanya berupa sumbangan langsung bagi penanggulangan masalah-masalah tersebut. *Ketujuh*, menunjukkan kepemimpinan dalam kepeloporan serta integritas kepribadiannya dalam mengamalkan keahliannya dalam masyarakat. *Kedelapan*, menyebarkan dan meneruskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan dalam masyarakat.

3. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Sejalan dengan disahkannya Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak atas penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa. Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan Satyalancana Pendidikan, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia; berakhlak dan berbudi pekerti baik; serta mempunyai nilai dalam DP3 amat baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi,

Kegiatan OSN Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta OSN Guru sebagai motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Hadiah bagi para pemenang tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepada pemenang di tingkat nasional diberi hadiah dan penghargaan dari kementerian pendidikan.

7. Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi

Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Untuk itu, kemampuan profesional guru harus terus menerus ditingkatkan.

Prestasi yang telah dicapai oleh para guru berprestasi perlu terus dijaga dan dikembangkan, serta diimbaskan kepada guru lainnya. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilihan guru berprestasi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaannya agar pengetahuan dan wawasan mereka selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ipteks. Program kerjasama peningkatan mutu pendidik antarnegara Asia, dalam hal ini dengan *The Japan Foundation*, misalnya, merupakan kelanjutan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan dan budaya di negara maju seperti Jepang untuk dijadikan bahan pembandingan dan diimplementasikan di tempat tugas mereka. Kontinuitas pelaksanaan program kerjasama ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

8. Penghargaan Lainnya

Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antarnegara ini dilakukan, baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antarnegara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antaranggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asean, Jepang, Australia, dan lain-lain. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada guru adalah Anugerah Konstitusi tingkat nasional bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk semua jenis dan jenjang. Penerima penghargaan ini adalah guru-guru PKn terbaik yang diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat Sekolah/Madrasah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

5.6. Tunjangan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pemenuhan hak guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang

diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesional yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus.

1. Tunjangan Profesi

Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional atau akademik. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada mereka. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru.

Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menamanatkan bahwa "Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat".

Pemberian tunjangan profesi diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di Sekolah/Madrasah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Besarnya tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan profesinya jika guru yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya yaitu dengan mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan persyaratan lainnya.

Guru akan menerima tunjangan profesi sampai yang bersangkutan berumur 60 tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi PNS guru. Setelah berusia 60 tahun guru tetap berhak mengajar di manapun, baik sebagai guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan untuk Sekolah/Madrasah swasta, dan menyangand predikat guru bersertifikat, namun tidak berhak lagi atas tunjangan profesi. Meski guru memiliki lebih dari satu sertifikat profesi pendidik, mereka hanya berhak atas "satu" tunjangan profesi.

Tunjangan profesi diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya, dengan cara pembayaran tertentu. Hal ini bermakna, bahwa guru bukan PNS pun akan mendapat tunjangan yang setara dengan guru PNS dengan kualifikasi akademik, masa kerja, serta kompetensi yang setara atau ekuivalen. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi akan dibayarkan setelah yang bersangkutan disesuaikan jenjang jabatan dan kepangkatannya melalui *impassing*. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Tunjangan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang bertugas di Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 17 ayat (3)).

Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. Namun saat ini baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan berdasarkan pada golongan/ruang kepangkatan/jabatannya. Khusus mengenai besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS, agaknya memerlukan aturan tersendiri, berikut persyaratannya.

3. Tunjangan Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18, disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditugaskan di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di Daerah Khusus, sasaran dari program ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

- a. Daerah terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi, dan tidak memiliki sumberdaya alam.
- b. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
- c. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
- d. Daerah yang mengalami bencana alam yaitu daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam (gempa, longsor, gunung api, banjir, dsb) yang berdampak negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
- e. Daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
- f. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak terduga-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

Tunjangan khusus yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Penetapan Daerah Khusus ini rumit dan tentatif adanya. Sebagai “katup pengaman” sejak tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kesejahteraan untuk guru yang bertugas di Daerah Khusus atau Daerah Terpencil di 199 kabupaten di Indonesia. Sampai tahun 2010 tunjangan tersebut mencapai Rp 1.350.000 per bulan. Harapan yang ingin dicapai dari pemberian tunjangan khusus ini adalah selain meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kompensasi daerah

yang ditempati sangat sulit, juga memotivasi guru untuk tetap mengajar di Sekolah/Madrasah tersebut. Pada sisi lain, pemberian tunjangan ini bisa sebagai insentif bagi guru baru untuk bersedia mengajar di Daerah Khusus ini. Belum terpenuhinya jumlah guru di daerah terpencil diharapkan juga semakin mudah dilakukan dengan insentif tunjangan khusus ini.

4. Masalah Tambahan

Salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 ayat 1). Masalah tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Masalah tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh guru dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2), dimana pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan bagi guru. Tujuan pemberian masalah tambahan ini adalah untuk : (1) memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas; (2) memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna tugas terhadap pengabdianya dalam dunia pendidikan; dan (3) memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru yang memiliki prestasi tinggi. Dengan demikian, pemberian masalah tambahan akan bermanfaat untuk: (i) mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru; (2) memberikan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; (3) merangsang guru untuk tetap memiliki komitmen yang konsisten terhadap profesi guru hingga akhir masa bhakti; dan (4) meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

6. Etika Profesi

6.1. Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa

Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus.

Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini.

1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu.
2. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial.

3. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya.
4. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminari untuk merangsang pertumbuhan diri.
5. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan.
6. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya.
7. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya.
8. Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri.
9. Memiliki empati yang kuat.
10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas Sekolah/Madrasah, dan masyarakat.
11. Menjunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja.
12. Menjunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung.
13. Memiliki kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*), dalam makna tersebut mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
14. Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari sisi pandang lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Danim (2010) merangkum beberapa hasil studi para ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik profesi seperti berikut ini.

- a. *Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.* Pendidikan dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi.
- b. *Memiliki pengetahuan spesialisasi.* Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi “guru”, akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi (*subject matter*) dan penguasaan metodologi pembelajaran.
- c. *Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien.* Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien. Dokter umum, misalnya, berbeda pengetahuan teoritis dan pengalaman praktisnya dengan dokter spesialis. Seorang guru besar idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan dosen atau tenaga akademik biasa.
- d. *Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable.* Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna apa yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik.
- e. *Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization.* Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas.
- f. *Mementingkan kepentingan orang lain (altruism).* Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan Sekolah/Madrasah, bahkan di luar Sekolah/Madrasah. Di dunia kedokteran, seorang dokter harus siap memberikan bantuan, baik dalam keadaan normal, emergensi, maupun kebetulan, bahkan saat dia sedang istirahat sekalipun.
- g. *Memiliki kode etik.* Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja.
- h. *Memiliki sanksi dan tanggungjawab komunitas.* Manakala terjadi “malpraktik”, seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika

bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran.

- i. *Mempunyai sistem upah.* Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji. Di dunia kedokteran, sistem upah dapat pula diberi makna sebagai tarif yang ditetapkan dan harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya.
- j. *Budaya profesional.* Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain.

6.2. Definisi Etika Profesi

Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode Etik Guru itu sendiri, Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika profesi guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan.

1. Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya.
2. Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.
3. Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
4. Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi atau asosiasi profesi guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
5. Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar Sekolah/Madrasah.
6. Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Sekolah/Madrasah, serta menjalani kehidupan di masyarakat.

6.3. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib:

1. Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru dan Ikrar atau Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing.
3. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing.
4. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif.
5. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru dimana dia terdaftar sebagai anggota.
6. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.
7. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.

8. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota.
9. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.4. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi

Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penyandang profesu guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksanakan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip "*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*". Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang menjejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan KEGI. Kode Etik harus mengintegrasikan pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak.

Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa "Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen." Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

6.5. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia

Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang menjejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat.

Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan normanorma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah, proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien di Sekolah/Madrasah.

Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyanggah profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini.” Berikut ini disajikan substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI telah memuat rumusan Kode Etik Guru yang sudah disepakati. Kalau memang demikian, itu pun selayaknya menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas keprofesian.

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga Sekolah/Madrasah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana Sekolah/Madrasah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hubungan Guru dengan Sekolah/Madrasah dan Rekan Sejawat

- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi Sekolah/Madrasah.

- b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- c. Guru menciptakan suasana Sekolah/Madrasah yang kondusif.
- d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar Sekolah/Madrasah.
- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
- n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi

- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
- b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
- c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi

- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
- c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan

- komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
 - e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
 - g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
 - h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah

- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
- c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, Sekolah/Madrasah dan rekan seprofesi, organisasi atau asosiasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Etik Guru dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1) agama dan Pancasila; (2) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara.

Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapat disanksi karena tuduhan melanggar Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah wajib ini normatif sifatnya. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, siapapun

Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: (1) tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih; (2) tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan; (3) tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar; (4) tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala Sekolah/Madrasah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar Sekolah/Madrasah; dan (5) tenaga lain yang mengurus masalah masalah manajerial atau administratif kependidikan.

Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan guru, telah muncul beberapa harapan ke depan. *Pertama*, perhitungan guru melalui Sensus Data Guru sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan guru dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan proyeksi pemenuhan guru di masa mendatang. Hasil perhitungan dan rencana pemenuhan guru per kabupaten/kota perlu diterbitkan secara berkala dalam bentuk buku yang dipublikasikan minimal setiap tiga tahun. *Kedua*, memperhitungkan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan (*supply and demand*) atau keseimbangan antara kebutuhan guru dan produksi guru. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan guru dan rasio guru:murid dapat di pertahankan secara efektif dan optimal. Pada kondisi riil di Sekolah/Madrasah sebenarnya terjadi kelebihan guru sehingga guru-guru honor yang ada di Sekolah/Madrasah merasa teraniaya/ termarjinalisasi/tak terurus. *Ketiga*, merealisasikan pemerataan guru yang efektif dan efisien di semua satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Apalagi jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pemindahan Guru PNS yang masih dalam proses penyelesaian telah terbit, maka berangsur-angsur akan terjadi pemerataan guru. Guru yang berlebih di satu kabupaten/kota dipindahkan ke kabupaten/kota lainnya yang kekurangan. *Keempat*, menghitung dengan tepat dan cermat kebutuhan fiskal negara terkait dengan agenda kesejahteraan guru yaitu pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, masalah tambahan, dan lain-lain. *Kelima*, pengembangan karier guru pascasertifikasi. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, ada empat aktivitas pengembangan karier guru pascasertifikasi guru, yaitu: penilaian kinerja guru, peningkatan guru berkinerja rendah, pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, dan pengembangan karier guru.

Pada sisi lain, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karier, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Beranjak dari isu-isu di atas, beberapa hal berikut ini memerlukan perhatian dan prioritas utama.

1. Menindaklanjuti masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
2. Melaksanakan kesepakatan implementasi sistem manajemen guru secara komprehensif berkaitan dengan:
 - a. Melakukan koordinasi dalam penyediaan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan.
 - b. Merekrut guru berdasarkan asesmen kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
 - c. Mengangkat dan menempatkan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan bidang keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
 - d. Menata dan mendistribusikan guru antarsatuan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan guru secara nasional melalui aspek pendanaan bidang pendidikan.
 - e. Memfasilitasi sertifikasi guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel
 - g. Menerapkan sistem penilaian kinerja guru secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- h. Memberikan penghargaan bagi guru sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dan memberikan perlindungan hukum, profesi, ketenagakerjaan, dan hak atas kekayaan intelektual.
 - i. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan kemampuan daerah.
 - j. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru.
3. Menindaklanjuti regulasi mengenai guru kedalam peraturan daerah/peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan walikota/kepala k Kantor wilayah kementerian agama provinsi

Manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan dan perumusan kebijakan yang sistemik dan sistematis. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan.

Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, beberapa hal perlu diberi catatan khusus. Perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. Standar dimaksud berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan/atau difilter melalui seleksi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, ke depan hanya seseorang dengan karakteristik tertentu yang akan direkrut sebagai calon guru.

Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, dan sebaran Sekolah/Madrasah. Dalam kaitannya dengan rekrutmen calon guru, sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu mensinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya.

Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Dian Mahsunah, dkk. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, Jakarta : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Bersama Mendiknas, Meneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011
- Produk hukum yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Guru Berkelanjutan, Sertifikasi Guru, dan Uji Kompetensi Guru
- Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Kode Etik Guru, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2010
- , Pengembangan Profesi Guru: Dari Induksi ke Profesional Madani, Media Perhalindo, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Vollmer dan Mills, *Professionalization*, Jossey Bass, New York, 1982



2. Landasan Kurikulum 2013.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
- 2) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik.
- 3) Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- 4) Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

b. Landasan Teoritis Kurikulum

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan

pengalaman belajar seluasluasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Kemampuan-kemampuan yang perlu dikuasai generasi yang hidup di masa depan tidak lagi menitikberatkan pada penguasaan materi dan berpikir rutin, karena kedua kemampuan itu telah dilakukan oleh komputer. Kemampuan kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir jernih dan kritis dengan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab, toleran, hidup dalam masyarakat yang mengglobal, serta memiliki minat luas dalam kehidupan, kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan rasa tanggungjawab terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.
- d. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
- f. Tuntutan dunia kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- h. Agama
Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia.
- i. Dinamika perkembangan global
Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum harus

keterampilan.

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

a. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Kelas I, II, III

KOMPETENSI INTI KELAS I	KOMPETENSI INTI KELAS II	KOMPETENSI INTI KELAS III
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.



Kelas IV,V,VI

KOMPETENSI INTI KELAS IV	KOMPETENSI INTI KELAS V	KOMPETENSI INTI KELAS VI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

b. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Tsanawiyah (MTs)

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.	4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.



c. Tabel Kompetensi Inti Madrasah Aliyah (MA)

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

a. Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER-MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama Islam						
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	2	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	5	5	6	5	5	5
3.	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4.	Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2
5.	Matematika	5	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		34	36	40	43	43	43

b. Beban Belajar dan Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.

Tabel : Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. AlQur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5

Struktur kurikulum 2013: Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2
5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	33	31	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial			
1 Geografi	3	4	4
2 Sejarah	3	4	4
3 Sosiologi	3	4	4
4 Ekonomi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu	51	51	51

Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Ilmu Bahasa Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	Alokasi Waktu		
	Per Minggu		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2

5.	Matematika	4	4	4
6.	Sejarah Indonesia	2	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
1.	Seni Budaya	2	2	2
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu		33	31	31
Kelompok C (Peminatan)				
Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
3	Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	3	4	4
4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman				
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat		6	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu		51	51	51

Struktur Kurikulum 2013: Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1.	Pendidikan Agama Islam		
a.	Al-Qur'an Hadis	2	2
b.	Akidah Akhlak	2	2
c.	Fiqih	2	2
d.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4
4.	Bahasa Arab	4	2
5.	Matematika	4	4
6.	Sejarah Indonesia	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2
Kelompok B (Wajib)			
1.	Seni Budaya	2	2
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu		33	31
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan			
1	Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3
2	Hadis - Ilmu Hadis	2	3
3	Fiqih - Ushul Fiqih	2	3
4	Ilmu Kalam	2	2



5	Akhlak	2	2	2
6	Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman				
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat		6	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu		51	51	51

6. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

- Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- Monitoring dan Evaluasi
Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Kompetensi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Ibtidaiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Ibtidaiyah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Tsanawiyah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Aliyah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

7. Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi Inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2,3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4.



Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya. Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok 3. Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 4.

Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke ketrampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.

8. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Akidah Akhlak MI, MTs, MA

Di bawah ini contoh Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk MI, MTs dan MA

KELAS I SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Meyakini rukun iman. 1.2 Meyakini syahadatain. 1.3 Meyakini Allah SWT. Yang Esa (<i>al-Apad</i>) dan maha Pencipta (<i>al-Khwliq</i>). 1.4 Menerima ketentuan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. 1.5 Menerima adab mandi dan berpakaian. 1.6 Menerima ketentuan menghindari hidup kotor.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2.1 Membiasakan berperilaku yang merefleksikan orang yang beriman. 2.2 Membiasakan berperilaku bertauhid. 2.3 Membiasakan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 2.4 Membiasakan perilaku adab mandi dan berpakaian. 2.5 Membiasakan diri untuk menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	3.1 Mengenal enam rukun iman. 3.2 Mengenal dua kalimah syahadat sebagai bagian dari rukun Islam yang pertama. 3.3 Mengenal sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung dalam <i>al-Asm' al-ousnw(al-Apad dan al-Khwliq)</i> melalui kisah Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhannya. 3.4 Memahami perilaku akhlak terpuji hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 Memahami adab mandi dan berpakaian. 3.6 Menjelaskan akhlak tercela hidupkotordalamkehidupansehari-hari dan cara menghindarinya.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4.1 Menunjukkan perilaku beriman kepadaenamrukun iman. 4.2 Melafalkan dua kalimahsyahadat dan artinya. 4.3 Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. <i>al-Apad dan al-Khwliq</i> dan maknanya. 4.4 Mendemonstrasikan tatacara berpakaian secara Islami. 4.5 Menunjukkan perilaku hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 Menceritakancaramenghindarihidupkotordalamkehidupansehari-hari.

KELAS I SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Meyakini Allah SWT. melalui kalimattayyibah (<i>Basmalah</i>). 1.2 Meyakini Allah SWT. sebagai <i>ar-Rapmwn, ar-Raprm dan as-Samr'</i> . 1.3 Menerima ketentuan adab belajar, bermain, makan dan minum. 1.4 Menerima nilai keramahan dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 1.5. Menerima ketentuan untuk menghindari berbicara kotor dan bohong/dusta, dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2.1 Terbiasa membaca basmalah setiap memulai aktivitas. 2.2 Mencontoh sifat Allah <i>ar-Rapmwn, ar-Raprm dan as-Samr'</i> . 2.3 Memiliki adab dalam belajar, bermain, makan dan minum. 2.4 Membiasakan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 2.5. Membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela berbicara kotor dan bohong/dusta, dalam kehidupan sehari-hari.

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam 4.2. Menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat <i>wajib</i> , <i>mustahil</i> , dan <i>jaiz</i> Allah SWT. 4.3. Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam fenomena kehidupan 4.4. Mensimulasikan adab salat dan zikir 4.5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya

KELAS VII SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.1. Meyakini sifat-sifat Allah SWT. melalui <i>al-asmw' al-pusnw</i> (<i>al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym</i>) 1.2. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 1.3. Menolak akhlak tercela <i>riya'</i> dan <i>nifaq</i> 1.4. Menghayati adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 1.5. Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2.1. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam <i>al-asmaa' al-husna</i> (<i>al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym</i>) 2.2. Memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan 2.3. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela <i>riya'</i> dan <i>nifaq</i> 2.4. Terbiasa menerapkan adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 2.5. Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3.1. Menguraikan <i>al-asmaa' al-husnaa</i> (<i>al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym</i>) 3.2. Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya, seperti jin, iblis, dan setan 3.3. Memahami akhlak tercela <i>riya'</i> dan <i>nifaq</i> 3.4. Memahami adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa 3.5. Menganalisis kisah keteladanan Ashabul Kahfi
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan	4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam <i>al-asmw' al-pusnw</i> (<i>al-'Azrz, al-Gaffwr, al-Bwsih, an-Nwfi', ar-Ra'yf, al-Barr, al-Fattwp, al-'Adl, al-Qayyym</i>)



KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4.2. Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk ghaib lain selain malaikat 4.3. Mensimulasikan contoh perilaku <i>riya'</i> dan <i>nifaq</i> serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 4.4. Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi

KELAS X SEMESTER 1

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1. Meyakini prinsip-prinsip akidah Islam dalam kehidupan 1.2. Menghayati metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam dalam kehidupan 1.3. Menghayati nilai tauhid dengan benar 1.4. Menunjukkan sikap penolakan terhadap hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari 1.5. Meyakini pentingnya keimanan yang kuat setelah memahami ilmu kalam
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Menerapkan prinsip-prinsip akidah Islam dalam kehidupan 2.2. Terbiasa menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam dalam kehidupan 2.3. Membiasakan diri bertauhid dengan benar 2.4. Berkomitmen membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari 2.4. Mengamalkan ilmu kalam untuk memperbaiki sikap sosial di masyarakat 2.5. Menghargai perbedaan pendapat para ulama ilmu kalam yang berpengaruh pada sikap keseharian
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1. Menganalisis prinsip-prinsip akidah Islam 3.2. menganalisis metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam 3.3. Membandingkan pengertian <i>tauhrd</i> dan istilah-istilah yang terkait 3.4. Memahami pengertian, contoh dan dampak syirik 3.5. Memahami pengertian, ruang lingkup dan kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah	4.1. Menyajikan petak konsep prinsip-prinsip akidah Islam 4.2. Menyajikan berbagai konsep metode-metode

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	peningkatan kualitas akidah Islam 4.3. Menyajikan petak konsep pengertian <i>tauhid</i> dan istilah-istilah yang terkait 4.4. Mensimulasikan praktik-praktik perbuatan syirik dalam masyarakat 4.5. Menyusun peta konsep pengertian, ruang lingkup dan kedudukan ilmu kalam dan kajian Islam

KELAS X SEMESTER 2

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Meyakini fenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 1.2 Menolak bentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 1.3 Menghayati perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa sahabat 1.4 Menghayati faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam 1.5 Menerima fakta historis aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.6 Menerima fakta historis aliran Murji'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.7 Menerima fakta historis aliran Syi'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.8 Menerima fakta historis aliran Jabariyah dan Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 1.9 Menerima fakta historis aliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.10 Menghayati aliran Asy'ariyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.11 Menghayati aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.12 Menghayati perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Terbiasa menela dan fenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 2.2. Menghindari bentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 2.3. Menela model penanaman akidah pada masa Nabi Muhammad Saw. dan masa sahabat 2.4. Menghindari faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari 2.5. Menela dan aspek positif aliran Khawarij dan menghindari aspek negatifnya 2.6. Menela dan aspek positif aliran Murji'ah dan menghindari aspek negatifnya 2.7. Menela dan aspek positif aliran Syi'ah dan menghindari aspek negatifnya

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	2.8. Meneladani aspek positif aliran Jabariyah dan Qadariyah dan menghindari aspek negatifnya 2.9. Meneladani aspek positif aliran Mu'tazilah dan menghindari aspek negatifnya 2.10. Meneladani aspek positif aliran Asy'ariyah 2.11. Meneladani aspek positif aliran Maturidiyah 2.12. Meneladani aspek positif perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya dan menghindari aspek negatifnya

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Membandingkan fenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 3.2 Mengidentifikasi bentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 3.3 Menganalisis perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad Saw. 3.4 Menganalisis perkembangan akidah pada masa sahabat 3.5 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam 3.6 Menganalisis aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.7 Menganalisis aliran Murji'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.8 Menganalisis aliran Syi'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.9 Menganalisis aliran Jabariyah dan Qadariyah, tokoh-tokoh serta doktrin-doktrinnya 3.10 Menganalisis aliran Mu'tazilah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.11 Menganalisis aliran Asy'ariyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.12 Menganalisis aliran Maturidiyah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 3.13 Menganalisis perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam yang satu dengan lainnya
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	1.1 Menceritakan fenomena ketauhidan pada masa Nabi Adam a.s. hingga masa Nabi Muhammad Saw. 1.2 Menceritakan bentuk penyimpangan umat-umat terdahulu dari dakwah para Nabi 1.3 Menceritakan perkembangan akidah pada masa Nabi Muhammad saw dan masa sahabat 1.4 Menceritakan faktor-faktor penyebab timbulnya aliran-aliran ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari 1.5 Menyajikan petak konsep aliran Khawarij, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.6 Menyajikan petak konsep aliran Murji'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya 1.7 Menyajikan petak konsep aliran Syi'ah, tokoh-tokoh dan doktrin-doktrinnya

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

a) Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

- a. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, *al-asma' al-husna*, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qada Qadar.
- b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas *ber-tauhid, ikhlaas, ta'at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyar, shabar, syukur, qana'ah, tawaadu', husnuzh-zhan, tasaamuh* dan *ta'awun*, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja.
- c. Aspek akhlak tercela meliputi *kufur, syirik, riya, nifaaq, anaaniah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur, hasad, dendam, giibah, fitnah, dan namiimah*.
- d. Aspek adab meliputi: Adab beribadah: adab Shalat, membaca Al Qur'an dan adab berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan
- e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Shahabat: Abu Bakar ra, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib

11. Tujuan dan Ruang Lingkup Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah

Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan memperdalam akidah-akhlak sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat dan/atau memasuki lapangan kerja.

Pada aspek akidah ditekankan pada pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip akidah Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan tentang aliran-aliran dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan iman yang inklusif dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang , konsep Tauhid dalam Islam serta perbuatan syirik dan implikasinya dalam kehidupan. Aspek akhlak, di samping berupa pembiasaan dalam menjalankan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan metode peningkatan kualitas akhlak.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. *Al-Akhlak al-karimah* ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk:1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

2. Ilmu Kalam

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Kalam adalah mata pelajaran yang memberi bekal peserta didik untuk memahami pemikiran ulama dalam hal berakidah yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup materi/bahan kajian pelajaran Ilmu Kalam meliputi:

- Aspek Kesejarahan, Aspek kesejarahan ini meliputi sub-sub aspek: sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam seperti aspek politik, ekonomi, geografis, munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam dan ketokohan para pemimpinnya. Aliran-aliran kalam: Khawarij, Syi'ah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Salafiyah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah.
- Aspek Pemikiran, Aspek pemikiran dalam ilmu kalam: seperti batasan mukmin dan kafir, fungsi wahyu dan akal, kekuasaan, perbuatan, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan, kehendak, kekuasaan dan perbuatan manusia, serta pemikiran modern dalam teologi Islam.
- Aspek Akidah, Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, al-asma'al-husna, macam-macam tauhid seperti *tauhiid uluuhiyah*, *tauhiid rubuubiyah*, *tauhiid ash-shifat wa al-af'al*, *tauhiid rahmaniyah*, *tauhiid mulkiyah* dan lain-lain, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern).

D. Rangkuman

- Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 adalah:
 - Landasan Yuridis adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
 - Landasan Teoritis kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi.
 - Landasan Filosofis adalah Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Landasan Empiris adalah ditemukan banyak bukti empiris bahwa Indonesia berada pada level yang rendah pada aspek prestasi pendidikannya.
- Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 adalah Berpusat pada potensi, beragam dan terpadu; Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; Relevan dengan kebutuhan kehidupan; Menyeluruh dan berkesinambungan; Belajar sepanjang hayat; dan Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- Memahami Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum 2013 adalah Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia; Kebutuhan kompetensi masa depan; Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; Tuntutan dunia kerja; Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS); Agama; Dinamika perkembangan global; Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; Kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Kesenjangan gender; Karakteristik satuan pendidikan.
- Ada 4 elemen perubahan dalam kurikulum 2013, yaitu: SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian



Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sering disebut *classroom action research*, saat ini berkembang dengan pesat di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Apabila dicermati kecenderungan baru ini mengemuka karena jenis penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran mengajar di kelas. Konsep penelitian tindakan bermula dari pandangan seorang ahli psikologi sosial yang bernama Kurt Lewin (1946). Lewin menggunakan pendekatan penelitian tindakan setelah usainya perang dunia ke dua dalam usaha menyelesaikan berbagai masalah sosial. Lewin pada saat itu mengemukakan dua ide pokok penelitian tindakan yaitu; (1) keputusan bersama, dan (2) komitmen untuk meningkatkan dan memperbaiki prestasi kerja. Kedua ide pokok tersebut sekarang menjadi karakteristik dasar penelitian tindakan yang menegaskan perlunya usaha kolaboratif atau usaha secara bersama-sama dalam meningkat mutu prestasi kerja.

Pada tahun 1953, ide Lewin dikembangkan oleh Stephen Corey di New York sebagai pendekatan penelitian yang diselenggarakan oleh guru-guru sekolah. Pada Tahun 1976 Jhon Elliot menggunakan pendekatan ini untuk membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang kemudian dikenal dengan penelitian tindakan kelas (PTK). Di Indonesia, PTK baru dikenal akhir dekade 80-an.

Secara bahasa penelitian atau research (bahasa Inggris) menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1961) berarti penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Menurut *Fellin, Tripodi* dan *Meyer* (1969) penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Ciri-ciri riset adalah sebagai berikut, yaitu bahwa riset: (Abisujak, 1981) (1) Dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan seksama; (2) Bertujuan meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan (menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan); (3) Dilakukan melalui pencarian fakta yang nyata; (4) Dapat disampaikan (dikomunikasikan) oleh peneliti lain; dan (5) Dapat diuji kebenarannya (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Menurut Ebbut dan Hopkin (1993), penelitian tindakan adalah kajian sistemik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Bagi Carr & Kemmis, 1986 dalam Burns (1999) berpendapat bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik mereka dan terhadap situasi tempat praktik-praktik tersebut dilakukan.

Bila digabungkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka diperoleh batasan penelitian tindakan kelas sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang (bersiklus) dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Proses daur ulang (siklus) kegiatan dalam penelitian tindakan divisualisasikan pada Gambar 1.

Nuansa kolaborasi ini harus tertampilkan dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi masalah bersama, perencanaan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas, observasi dan evaluasi, dan refleksi, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian.

c. *Reflective, Practice, Made Public*

Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan untuk perbaikan (*improvement*) praktis. Berbeda dengan penelitian formal yang lebih mengutamakan pendekatan eksperimental, penelitian tindakan kelas lebih menekankan kepada proses ‘perenungan kembali (*refleksi*) terhadap proses dan hasil penelitian secara berkelanjutan untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, kurang efektifan, dan sebagainya dari pelaksanaan sebuah tindakan untuk dapat digunakan memperbaiki proses tindakan pada siklus-siklus selanjutnya.

d. *Every Day Practical Problems*

Penelitian tindakan kelas lebih memfokuskan permasalahan nyata di dalam kelas yang dihadapi pendidik sehari-hari, bukan berangkat dari permasalahan yang bersifat teoritis (*theoretical problems*). Oleh sebab itu penentuan masalah dalam penelitian tindakan kelas harus berawal dari permasalahan yang nyata di dalam kelas yang ditandai dengan kerisauan pendidik, yang kemudian didiagnosis agar masalah dari permasalahan tersebut sebelum bisa menentukan langkah-langkah tindakan yang paling tepat.

e. *Teori menuju aksi,*

Penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengadopsi teori kedalam tindakan yang nyata untuk merubah situasi yang sulit kedalam permasalahan praktis yang bisa dipecahkan.

Sementara Indrawati (2001) mengungkapkan sepuluh karakteristik PTK. Kesepuluh karakteristik itu adalah seperti berikut ini.

1. Masalah yang diangkat untuk dipecahkan melalui PTK harus berasal dari persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi guru. Permasalahan penelitian hendaknya bersifat kontekstual dan spesifik.
2. Tujuan utama PTK adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik-praktik pembelajaran secara langsung ketimbang menghasilkan pengetahuan baru
3. PTK berlingkup makro, dilakukan dalam lingkup kecil, bisa satu kelas atau beberapa kelas di satu sekolah sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentatifan sampel. Istilah sampel dan populasi tidak diperlukan dalam PTK, karena hasilnya bukan untuk digeneralisasi.
4. Hasil atau temuan PTK adalah pemahaman yang mendalam (komprehensif) mengenai kehidupan/fenomena pembelajaran di kelas.
5. PTK bersifat praktis dan langsung, relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja atau dunia pendidikan.
6. Pada PTK, peneliti (guru) tetap melaksanakan tugas mengajarnya sehari-hari di kelas, dan guru sebagai peneliti dapat melakukan perubahan-perubahan atau pemecahan masalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran.
7. PTK adalah jenis penelitian terapan yang melibatkan peneliti secara aktif dan langsung, mulai dari pembuatan rancangan penelitian, rencana tindakan, hingga pada penerapannya dengan modifikasi intervensi yang sesuai dengan perkembangan kelas.
8. PTK bersifat fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama dalam masa penelitian, tidak menghiraukan kontrol demi kepentingan pelaksanaan yang lebih terfokus pada penelitian (*on the spot experimentation*) dan inovasi.
9. PTK dapat dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu kerjasama di antara guru dan teman sejawat, atau kepala sekolah dan pakar pendidikan, untuk berbagi kepakaran dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. PTK juga dapat dilakukan secara individual (oleh hanya seorang peneliti), dan atau dalam bentuk tim peneliti.

10. PTK dilaksanakan dengan langkah-langkah berupa siklus yang sistematis, dengan urutan: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.

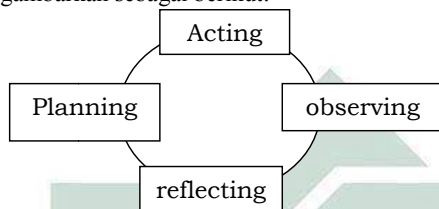
Ada beberapa model PTK yang sering digunakan dalam dunia pendidikan antara lain: (1) model Kurt Lewin; (2) Model Kemmis & McTaggart; (3) model Dave Ebbut; (4) model John Elliot; dan (5) model Hopkins (Depdiknas, 1999:18). Sebagaimana akan diuraikan secara ringkas berikut ini:

a. Model Kurt Lewin

Model Kurt Lewin merupakan model pertama dalam PTK yang diperkenalkan pada tahun 1946, dan merupakan acuan pokok atau dasar dari berbagai model PTK yang lain.

Menurut konsep Lewin bahwa siklus PTK terdiri dari empat langkah, yaitu (1) perencanaan (planning); (2) aksi atau tindakan (acting); (3) observasi (observing); dan (4) refleksi (reflecting).

Model Lewin dapat digambarkan sebagai berikut:

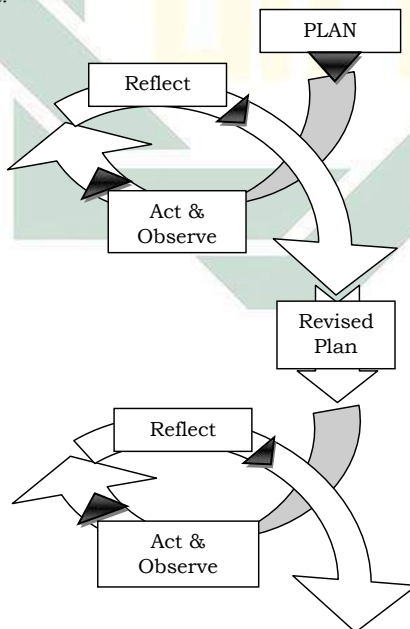


Gambar 3.1 PTK Model Lewin

b. Model Kemmis & Mc Taggart;

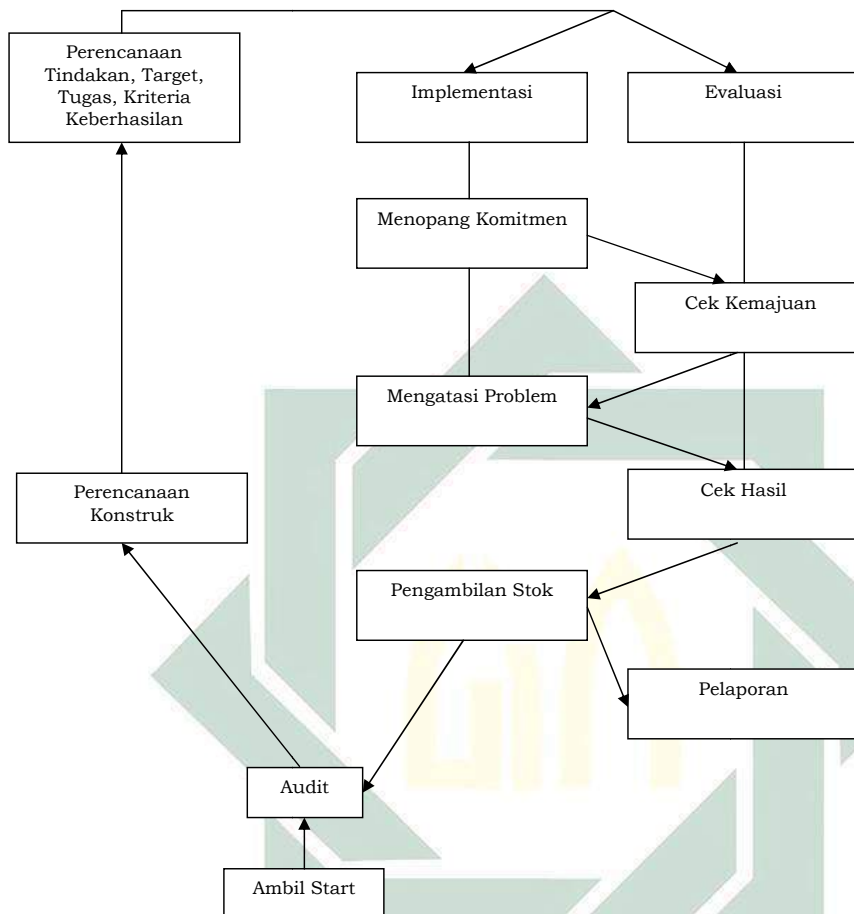
Model ini dikenal dengan penemunya yaitu Stephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin, sehingga kelihatan masih sangat dekat dengan model Lewin. Kemmis dan Mc Taggart menjadikan satu kesatuan komponen acting (tindakan) dan observing (pengamatan).

Model Kemmis dan Mc Taggart terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang keempatnya merupakan satu siklus (Depdiknas, 1992:21) yang digambarkan sebagai berikut:



d. Model Hopkins

Model Hopkins dikembangkan dari model-model sebelumnya yang sudah ada. Model Hopkins jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Adaptasi Depdiknas (1999) dalam Tukiran dkk (2012:26)
Gambar 3.5 PTK Model Hopkins

f. Model Gabungan Sanford dan Kemmis.

Model gabungan Sanford dan Kemmis ini dikembangkan oleh Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdikna. Sehingga diperoleh batasan penelitian tindakan adalah sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang siklis dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi.

.....
.....
2. Identifikasi Penyebab Masalah

Di sini dijelaskan penyebab masalah, kemudian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah.

Contoh: Diduga penyebab siswa kurang berminat dalam pembelajaran PAI karena guru selama ini mengajar dengan menggunakan metode tradisonal yaitu atau guru selama ini tidak menggunakan media... atau...dst.

Oleh karena itu penulis ingin meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan metode small group discussion..atau metode drill, atau strategi atau.... Dst.

.....
.....
.....

C. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan dan secara jelas terlihat aspek-aspek: what, who, where, when, how/many/much.

Contoh : - Apakah penerapan Strategi Dril dapat meningkatkan kemampuan siswa membaca surat-surat pendek ?

- Apakah melalui penerapan metode small group discussion, minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan?

.....
.....
.....

Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah.

Contoh: Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan metode small group discussion.

.....
.....
.....

E. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian diuraikan lebih rinci dan jelas .Manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan pihak-pihak terkait.

.....
.....
.....
.....

F. Kerangka Teoretis dan Hipotesis Tindakan

1. Kerangka Teoretis

Landasan teoretik tentang urgensi tindakan diuraikan secara jelas dalam dukungan pustaka terakhir. (kemukakan teori-teori yang terkait dengan masalah dan solusinya yang sudah di pilih). Dalam kerangka teori minimal menjelaskan dua hal pokok, apa yang akan ditingkatkan dan metode/strategi apa yang akan diterapkan. Contoh:

- a) *Minat Belajar. Minat belajar adalah..... Fungsi minat dalam belajarCiri-ciri seseorang yang berminat dalam belajar adalah.... Dst.*
- b) *Metode small group discussion. Metode small group discussion adalah.... Langkah-langkah penerapannya adalah.... Kelebihannya adalah... kekurangannya adalah.... Dst.*

.....

2. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan berisi pernyataan secara jelas tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi akar masalah yang didukung oleh kerangka teoritik.

Contoh Hipotesis Tindakan:

Dengan diterapkannya metode..... motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan. Atau, Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan melalui penerapan metode..... Atau, jika metode ...diterapkan, maka motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan

.....

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan beberapa hal, antara lain:

1. **Setting Penelitian.**
 Setting penelitian memuat tempat penelitian dilaksanakan, siapa yang diteliti, berapa orang yang diteliti, berapa lamanya penelitian akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan tindakan, siapa yang diajak kerjasama dalam penelitian.
2. **Variabel penelitian,** jelaskan variabel penelitiannya apa saja.
3. **Prosedur Penelitian,** di sini dijelaskan komponen-komponen atau unsure-unsur PTK (perencanaan/planning, tindakan/action, observasi dan refleksi. Rencananya penelitian akan dilakukan berapa siklus.
4. **Rencana Tindakan**
Cara pemecahan masalah harus menunjukkan akar masalah, bentuk intervensi yang diusulkan diuraikan dalam tahap-tahap, dari:

Perencanaan

.....

LAMPIRAN

CONTOH USULAN/PROPOSAL PTK

JUDUL PENELITIAN:

PENERAPAN PEMBELAJARAN MELALUI METODE PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PAI MATERI PENTINGNYA MENUNTUT ILMU

A. LATAR BELAKANG

Nilai rata-rata mata pelajaran PAI pada siswa kelas X MA Surabaya masih belum memuaskan. Salah satu kelemahan yang cukup mendasar adalah minat dan kemampuan siswa untuk memahami ayat Quran dan Hadist tentang menuntut Ilmu. Salah satu indikasinya adalah rendahnya hasil Ujian Semester Ganjil. Sebagian besar (60%) siswa tidak mencapai nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) PAI yang ditetapkan, yaitu 75. Indikasinya lainnya adalah rendahnya skor nilai ketika mereka diberikan contoh soal atau contoh latihan yang berbeda dengan apa yang ada di buku. Sebagian besar (65%) siswa tidak bisa menyelesaikan soal atau latihan sesuai waktu.

Metode problem solving merupakan di antara metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi-materi terapan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Metode ini dianggap mampu karena metode problem solving ini, sebagaimana yang pernah diteliti penerapan metode ini untuk IPS oleh Tin Rustini (2008) memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

- Model Problem Solving mampu melatih siswa mengembangkan kemampuan berfikir reflektif, kritis, dan kreatif
- Model Problem Solving berhasil dengan baik bila menggunakan strategi yang bervariasi
- Model problem solving dapat memberikan kemudahan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran
- Model pembelajaran dengan menerapkan problem solving dapat meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar siswa.

Dengan kelebihan yang dimiliki dan telah dibuktikan bahwa metode ini mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan berfikir siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar siswa, diharapkan metode ini juga terbukti mampu untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi-materi pentingnya menuntut Ilmu. Karena alasan ini, penting adanya penelitian tindakan kelas untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembelajaran Melalui Metode Problem Solving untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PAI Materi Pentingnya Menuntut Ilmu pada siswa Kelas X MA Surabaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

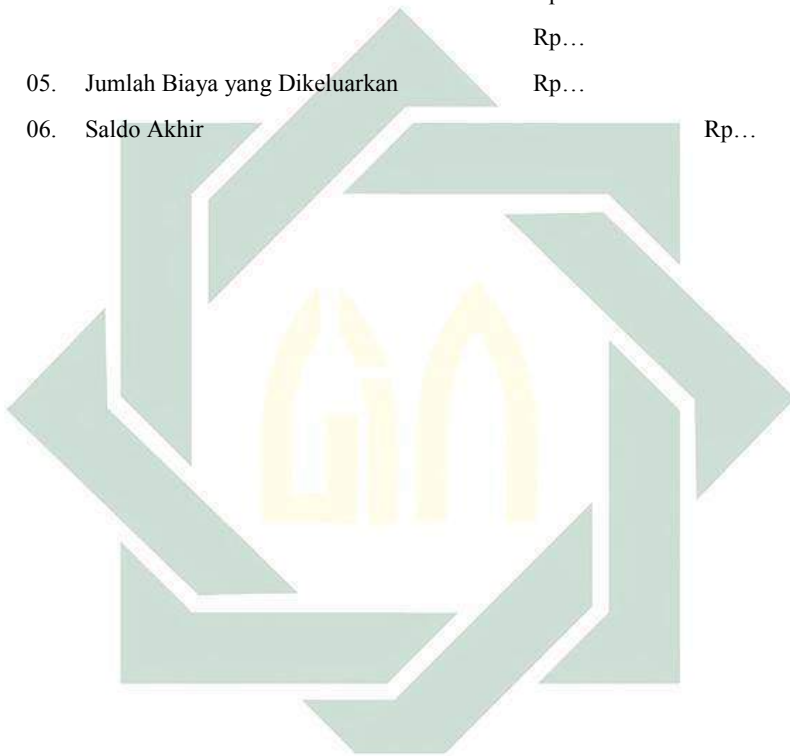
- Bagaimana metode problem solving dapat meningkatkan minat siswa dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu?
- Bagaimana metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran PAI pada materi pentingnya menuntut ilmu?

- a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah:
- 1) Mengadakan pertemuan, guru pelaksana tindakan dengan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan penelitian
 - 2) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru, lembar observasi aktifitas siswa, angket minat, soal tes, pedoman wawancara, dan catatan lapangan
 - 3) Menyiapkan rencana pelajaran yang telah disusun pada persiapan penelitian
 - 4) Menyiapkan alat tulis dan alat perekam untuk observasi dan wawancara
- b. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, guru PAI sebagai pelaksana tindakan melakukan aktifitas pembelajaran sesuai dengan rencana pelajaran yang telah disusun
- c. Observasi
Pada tahap observasi, dilakukan observasi aktifitas guru, observasi aktifitas siswa, dan wawancara dengan siswa. Untuk observasi dilakukan oleh guru pengamat kemudian dicatat dalam lembar observasi guru. Sedangkan wawancara direkam dalam alat perekam dan dicatat dalam catatan lapangan.
- d. Evaluasi
Pada tahap evaluasi, aktifitas guru dievaluasi berdasarkan lembar observasi, alat perekam, dan catatan lapangan. Sedangkan minat dan hasil belajar siswa dievaluasi berdasarkan lembar observasi aktifitas siswa, angket minat, alat perekam, soal tes, dan catatan lapangan.
- e. Refleksi
Pada tahap refleksi, data yang diperoleh dari hasil evaluasi kemudian dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk merefleksi pelaksanaan tindakan pada siklus tersebut, hasil refleksi kemudian digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus berikutnya.
Adapun prosedur, alat, pelaku, sumber informasi, dan cara analisis dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Prosedur	Alat	Pelaku	Sumber Informasi	Cara Analisis
1	Menganalisis aktifitas guru	Lembar observasi aktifitas guru; alat perekam; catatan lapangan	Guru pengamat	Guru pelaksana tindakan	Analisis kualitatif
2	Menganalisis aktifitas siswa	Lembar observasi aktifitas siswa; alat perekam; catatan lapangan	Guru pengamat	Siswa	Analisis kualitatif
3	Menganalisis minat siswa	Angket minat dan catatan lapangan	Guru pelaksana tindakan	Siswa	Analisis kualitatif
4	Menganalisis hasil belajar siswa	Tes	Guru pelaksanaan tindakan	Siswa	Analisis kuantitatif dan kualitatif

Apabila tingkat perbaikan yang diharapkan tercapai minimal 75%, maka kegiatan pembelajaran itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria.

01.	Jumlah Biaya Penelitian	Rp...
02.	Pajak (5%)	RP...
03.	Jumlah Biaya Penelitian Bersih	Rp...
04.	Pengeluaran:	
a.	Persiapan Penelitian	Rp...
b.	Tindakan	Rp...
c.	Penyusunan Laporan Penelitian	Rp...
d.	Penggandaan Laporan Penelitian	Rp...
e.	Honorarium Peneliti (30 %)	Rp...
f.	Biaya lain-lain	Rp...
		Rp...
		Rp...
05.	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan	Rp...
06.	Saldo Akhir	Rp...



Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memaksuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah". (al-Baqarah: 256)

Para mufassis sepakat bahwa kedua ayat diatas merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan dakwah: 'tidak boleh ada paksaan'. Yusuf Ali memberikan alasan-alasan kenapa agama tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, tindakan paksaan tidak cocok dalam agama karena:

1. Agama didasarkan atas keyakinan dan keimanan, dan kedua hal itu tidak ada artinya kalau dipaksakan. Mungkin yang dimaksudnya adalah bahwa seseorang bisa saja tunduk kalau dipaksa dengan ancaman pedang, maka demi keselamatannya dia pura-pura beriman;
2. Kebenaran dan kesalahan sudah nyata berkat rahmat Tuhan, maka semestinya tidak ada keraguan pada hati orang-orang yang mempunyai niat baik untuk beriman;
3. Perlindungan Tuhan akan tetap berlangsung dan rencana Tuhan akan selalu memberi bimbingan (pada manusia) untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.⁶

Larangan paksaan beragama itu, menurut Aisyah Abdurrahman, adalah untuk memastikan agar akidah itu benar-benar bersumber dari keyakinan hati, karena tidak ada iman (yang benar) kecuali bila berasal dari hati yang rela, murni, tenang, dan jujur. Paksaan hanya akan menghasilkan pengakuan di mulut, tetapi hati mengingkari, dan itu adalah kemunafikan yang oleh Islam dianggap sebagai kekafiran yang paling jahat.⁷

Bentuk-Bentuk Kerukunan antar Umat Beragama dalam Bidang Sosial dan Politik Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an

Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk menghormati para penganut agama non-Islam dan melarang mereka untuk menghina agama-agama itu, serta merusak tempat-tempat ibadah para penganutnya. Sebaliknya Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka.

1. Bidang Sosial

Yang dimaksud masalah sosial adalah seperti hubungan pertetanggaan, perkawinan, belajar mengajar, dan pengadilan. Berkaitan dengan masalah-masalah itu, ayat-ayat Al-Qur'an antara lain menyebutkan:

لَا يَحَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوا مِّن دِينِكُمْ أَنَّ تَبَرُّوهُمْ وَنُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁸

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (al-Mumtahanah/60:8).

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan agama semata-mata tidak boleh menjadi alasan bagi kaum Muslimin untuk tidak berbuat baik terhadap orang-orang non Muslim, sebagai tetangga, atau sebagai sesama anggota masyarakat. Lebih jauh mengenai hubungan pertetanggaan ini Al-Qur'an juga membolehkan kaum Muslimin untuk saling memberi dan mengkonsumsi makanan dengan orang-orang Ahl al-Kitab, dan membolehkan pula mengawini wanita-wanita mereka. Surat Al-Maidah/5:5 mengatakan:

⁶Yusuf Ali, *op.cit.*, h. 103

⁷Aisyah Abdurrahman, *Manusia; Sensitivitas Hermeneutika Al-Qur'an*, terjemahan M. Adib Al-Arief, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 95-96



الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ لِّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٰلٌ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَوِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ...⁸

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang Ahl al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan pula mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula untuk menjadikan mereka gundik-gundik (al-Maidah/5:5).

Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud *tha'am* (makanan) dalam ayat di atas bukan gandum, biji-bijian atau hasil bumi yang lain yang hukumnya sudah jelas halal, melainkan hewan sembelihan. Penafsiran itu didasarkan atas ayat sebelumnya (al-Maidah/5:3) yang menjelaskan beberapa jenis makanan yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yakni sembelihan orang-orang musyrik Arab. Jadi ayat al-Maidah/5:5 itu membedakan hukum sembelihan Ahl al-Kitab dari sembelihan orang-orang musyrik. Demikian pula wanita-wanita Ahl al-Kitab boleh dinikahi akan tetapi wanita-wanita musyrik tidak boleh dinikahi (al-Baqarah/2:221).

Quraish Shihab berpendapat bahwa istilah Ahl al-Kitab yang terdapat dalam Al-Qur'an ditujukan kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun dan dimanapun, serta dari keturunan bangsa manapun. Pendapatnya itu didasarkan atas sebuah ayat yang terjemahannya: "(Kami turunkan Al-Qur'an) agar kamu (orang-orang kafir) tidak mengatakan bahwa, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani), dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca'" (al-An'am/6:156). Namun demikian, menurutnya para penganut agama lain, termasuk para penyembah berhala non-Arab meskipun tidak disebut Ahl al-Kitab, mereka diperlakukan sebagaimana Ahl al-Kitab. Artinya mereka membayar jizyah, sembelihannya halal dikonsumsi, dan wanitanya boleh dinikahi.⁸

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa kaum Muslimin diperbolehkan menimba pengetahuan dari Ahl al-Kitab, antara lain:

فَإِن كُنْتَ فِي شكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ⁹

Artinya:

Jika kamu (Muhammad) ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu (Yunus/10:94).

Karena dibolehkan melakukan kontak belajar itulah, maka menurut Fazlur Rahman pengaruh Yahudi dan Kristen telah masuk ke dalam tubuh Islam sejak awal sejarahnya.⁹

Dalam bidang hukum, Al-Qur'an juga memerintahkan kepada Nabi dan umatnya agar memberikan keputusan yang adil kepada orang-orang Yahudi apabila mereka datang kepadanya untuk meminta keputusan. Ayat tersebut memberikan pilihan kepada Nabi untuk mengadili mereka atau tidak. Sebab sesungguhnya mereka memiliki Taurat yang dapat mereka jadikan pegangan. Dan kalau Nabi mau memberi keputusan di antara mereka Al-Qur'an mengatakan:

وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹⁰

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h.368-369

⁹Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 73

Artinya:

Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil (al-Maidah/5:42).

2. Bidang Politik

Yang dimaksud politik dalam kajian ini adalah hal-hal yang menyangkut kepemimpinan dan jabatan dalam pemerintahan. Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang niscaya karena ia diperlukan untuk memastikan berlakunya hukum dan peraturan-peraturan Al-Qur'an sebagai salah satu aspek penting dalam syari'at Islam.

Keharusan untuk taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin penggantinya dinyatakan dalam sebuah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ٥٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu (al-Nisa/4:59).

Terdapat perbedaan mengenai siapa yang disebut sebagai *uli al-amri* yang terdapat pada ayat di atas. Mujahid, Atho, Hasan al-Basri, dan Abu al-Aliyah menafsirkannya sebagai ahli fikih dan agama.¹⁰ Orang-orang Syi'ah menganggap *uli al-amri* adalah imam-imam mereka, dan Zamakhsyari menafsirkan *uli al-amri* itu adalah *umara al-haq*, yaitu para pemimpin negara yang memerintahkan pada kebenaran.¹¹ Sedangkan Rasyid Ridho berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai kepentingan umum seperti pejabat pemerintah, hakim, ulama, komandan tentara dan sebagainya. Mereka itu harus diikuti dengan syarat mereka berasal dari golongan kita (kaum Muslimin) dan tidak menyalahi perintah Allah dan rasul-Nya.¹²

Karena tugas dari pemimpin adalah menjamin dan menjaga terlaksananya hukum Allah, maka terlepas dari perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud *uli al-amri* itu, pemimpin kaum Muslimin haruslah seorang Muslim yang taat kepada Allah dan rasul-Nya sebagaimana dikatakan Rasyid Ridho di atas. Karena itu kaum Muslimin tidak dibenarkan mengangkat seorang non-Muslim untuk menjadi pemimpin mereka. Meskipun demikian, sejarah Islam mencatat bahwa orang-orang non-Muslim memperoleh jabatan di beberapa pos pemerintahan. Muawiyah memiliki seorang dokter dan sekretaris pribadi yang beragama Nasrani. Dimasa Umayyah dan Abasiyah dokter-dokter Nasrani juga menjabat sebagai direktur-direktur di sekolah-sekolah kedokteran di Baghdad dan Damaskus. Seorang kepala kantor pemerintahan Khalifah Marwan juga seorang Nasrani. Ibrahim bin Hilal, seorang Shabiin, juga menjadi pegawai tinggi di kerajaan Umayyah.¹³

Tidak dibolehkannya kaum Muslimin menjadikan non-Muslim didasarkan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... ١٤٤

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin (al-Nisa/4:144)

¹⁰ *Ibn Katsir*, Jilid 1, h. 641

¹¹ *Zamakhsyari*, Jilid 1, h. 545

¹² Rasyid Ridho, *op.cit.*, Jilid 5, h. 181

¹³ Mustafa Al-Ba'i, *op.cit.*, h. 80-82

**Tugas Mandiri**

1. Tulis satu ayat dan satu hadis (selain yang sudah dibahas dalam modul ini), lalu terjemahkan dan jelaskan maksudnya.
2. Sebutkan satu kasus yang pernah terjadi di masyarakat yang terkait dengan problem toleransi, lalu kemukakan pandangan anda.

Rangkuman

Toleransi beragama adalah sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun

Dasar-dasar toleransi dalam Islam antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 256, yang artinya “Tidak ada paksaan untuk (memaksuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”.
2. Surat Yunus ayat 99 yang artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

Bentuk toleransi antar umat beragama dalam realita kehidupan misalnya memberi dan menerima pemberian makanan hasil sembelihan, pernikahan, belajar-mengajar, peradilan, dan kepemimpinan.

BAGIAN 3 TEPAT JANJI DAN JUJUR

Kompetensi Dasar :

Memahami Q.S. Ali Imran (3): 77 dan Q.S. Al-Ahzab (33): 70 serta hadits terkait tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pembelajaran :

Setelah proses pembelajaran yang meliputi membaca ayat, memahami arti, Tanya jawab, dan diskusi, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan konsekuensi janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia.
2. Menjelaskan isi hadis bahwa kejujuran membawa kebaikan Kebohongan membawa keburukan.
3. Membedakan kemunafikan akidah dan kemunafikan amaliah.

Janji Kepada Allah dan Janji Kepada Sesama Manusia

Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^{VV}

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77)

Sebab Turunnya Ayat

Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan bahwa al-Asy'ats berkata, "Dulu saya dan seorang Yahudi mempunyai sebidang tanah milik bersama. Lalu dia mengkhianati saya, maka saya mengadu kepada Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada saya, 'Apakah engkau mempunyai bukti?' Saya jawab, 'Tidak.' Beliau berkata kepada orang Yahudi itu, 'Bersumpahlah engkau.' Maka buru-buru saya katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah. Jika dia bersumpah, tentu dia akan membawa harta milik saya.' Lalu Allah menurunkan ayat tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa seorang lelaki menjual barang dagangannya di pasar. Lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah menerima barang dagangan tersebut dengan harga di atas harga yang dia tawarkan untuk membujuk seorang lelaki muslim. Maka turunlah firman Allah tersebut.

Ibnu Hajar dalam *syarah Bukhari* berkata, "Tidak ada kontradiksi antara dua hadits ini, tetapi dapat dipahami bahwa sebab turun ayat ini adalah dua peristiwa."

Demi kesejahteraan umat manusia, Allah Swt memberinya petunjuk dari dua jalan. Salah satunya dari jalan fitrah yang timbul dari dalam hati nuraninya dan menunjukkan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Yang kedua adalah wahyu yang bermuara dari ilmu Allah yang tidak terbatas dan di bawah nama agama serta perintah-perintah agama; membimbing manusia langkah demi langkah menuju tujuan sempurna.

Sekumpulan anjuran-anjuran fitrah dan agama adalah janji-janji ilahi yang telah ditandatangani oleh akal dan mewajibkan manusia melaksanakan hal itu. Namun sayangnya, sekelompok manusia telah melanggar janji dan untuk sampai kepada dunia mereka lebih mengutamakan hawa nafsu daripada kehendak Tuhan. Tentu perilaku tidak patut ini akan disusuli oleh pengaruh-pengaruh kemurkaan sebanding dengan keingkarannya dan yang terpenting ialah jauh dari kemurahan Allah di hari dimana semuanya memerlukan kemurahan-Nya.

Dari ayat ini dapat petik dua pelajaran:

mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik“.

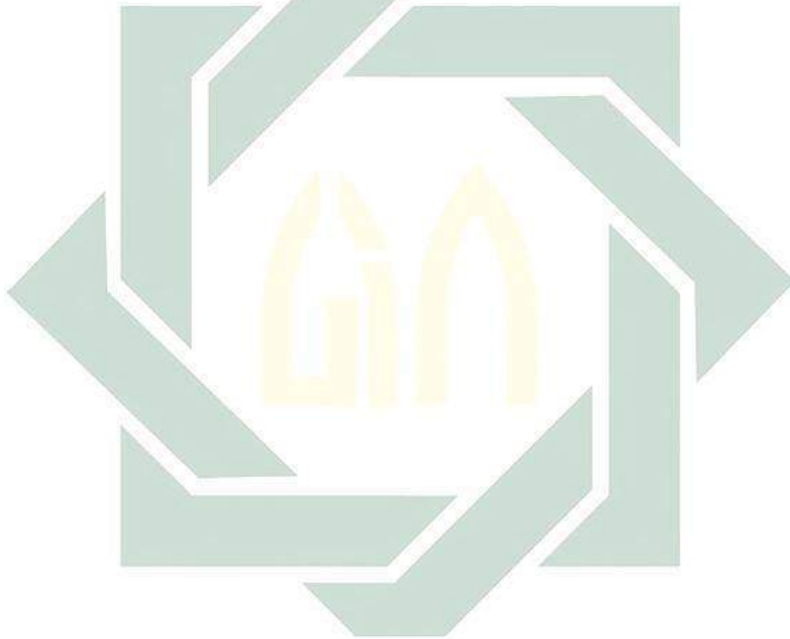
Tugas Mandiri

1. Sebutkan sebanyak mungkin akibat ketidakjujuran terhadap bangsa dan negara Indonesia.
2. Kisahkan pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan orang lain terkait dengan kejujuran atau kebohongan, dan apa akibatnya.

Rangkuman

Jujur adalah salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan baik oleh al-Qur'an maupun hadis agar dimiliki oleh setiap Muslim. Kejujuran apabila sudah menjadi sifat seluruh anggota masyarakat, akan memberikan kebaikan kepada masyarakat tersebut; masing-masing akan saling percaya, tidak curiga dan buruk sangka, sehingga timbullah rasa aman dalam hidup.

Ketidakjujuran/dusta/bohong akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap pelakunya. Apabila sifat negative ini menjadi watak banya orang, akan menimblkn keresahan. Apalagi bila sifat ini ada pada orang-orang yang disertai amanat untuk mengurus kepentingan orang banya. Karena itu Nabi mengingatkan orang-orang yang beriman dengan bersabda bahwa tidak jujur/dusta/bohong merupakan salah satu cirri orang munafiq.



Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Hormat dan Berbuat baik kepada orang tua sepanjang masa baik ketika masih hidup maupun telah meninggal. Dalam kitab *Tanbih al-Ghāfilin* yang ditulis oleh al-Muhaddits al-Samarqandiy menjelaskan ada 10 hak orang tua yang masih hidup yang wajib dilaksanakan oleh anak dan 3 hak orang tua yang telah meninggal. 10 kewajiban anak terhadap orang tua yang masih hidup yaitu sebagai berikut :

1. Memberi makan ketika dibutuhkan
2. Memberi pakaian jika diperlukan dan anak ada kemampuan. Kedua hal di atas merupakan penafsiran ayat QS. Luqman/31:15 *“dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”*. Makna pergaulan yang baik adalah memberi makan ketika orang tua lapar dan memberi pakaian ketika orang tua tidak mampu membeli pakaian
3. Berkhidmah atau melayani
4. Memenuhi panggilan
5. Taat selagi tidak maksiat. Dalam ayat QS. Luqman/31 : 15 Allah berfirman :

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya”. Sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Thabarani disebutkan Nabi bersabda :

“Tidak ada taat kepada makhluk itu wajib dalam maksiat kepada Allah” (HR. Ahmad dan Thabarani)

6. Berbicara di hadapannya dengan lemah lembut tidak boleh dengan suara kasar dan keras
7. Tidak memanggil dengan namanya akan tetapi dengan jabatannya yang terhormat
8. Berjalan di belakangnya tidak berjalan di hadapan atau di sampingnya kecuali dengan izin
9. Berbuat sesuatu yang menyenangkan dan menghindarkan sesuatu yang membencikan
10. Memohonkan pengampunan setiap mohon pengampunan untuk dirinya baik orang tua masih hidup maupun telah meninggal.

Sedang 3 kewajiban anak terhadap orang tua yang telah meninggal sebagai berikut :

1. Anak tetap menjadi orang shaleh karena tidak ada sesuatu yang lebih dicintai kepada kedua orang tua dari pada keshalehan anak
2. Bershalawat rahim kepada kerabat orang tua dan teman-temannya ketika masih hidup
3. Memohonkan pengampunan, mendoakan dan bersedekah untuk kedua orang tua. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Usayd Malik bin Rabi'ah al-Sa'idi berkata : Ketika kita di hadapan Nabi ada seorang laki-laki dari Bani Salamah bertanya : Ya Rasulullah apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal beliau menjawab : *“Ya yaitu mendoakan atas mereka, membacakan istighfar, memenuhi janjinya setelah meninggal, shilatur rahim kepada kerabat yang tidak dishilahkan kecuali oleh mereka dan memuliakan teman-teman mereka”*. (Bukhari dan HR Abu Daud)

Kewajiban Hormat dan Taat kepada Guru

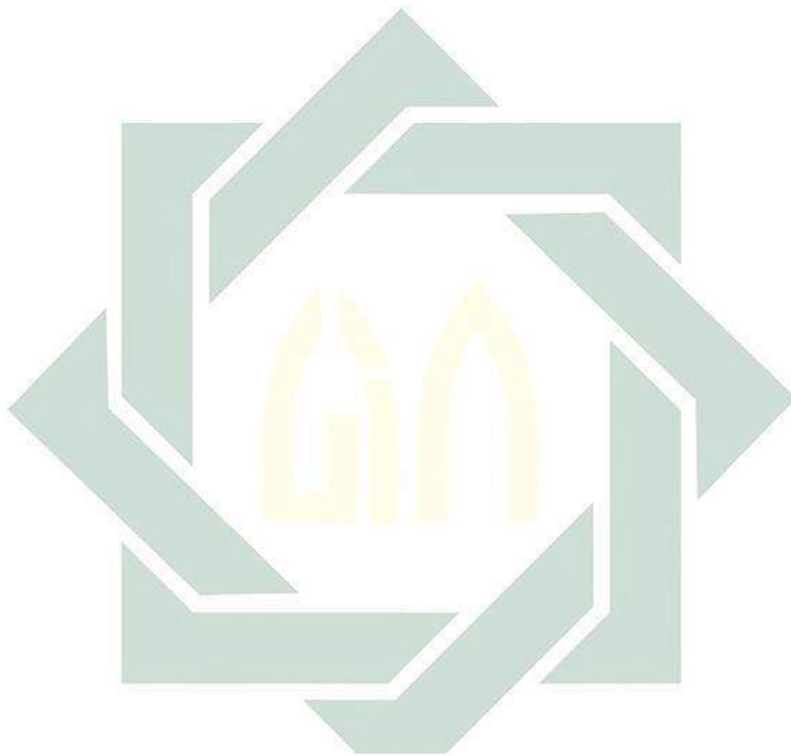
Hormat dan taat seorang murid terhadap guru suatu kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis Rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... (رواه مسلم)

Hormat kepada orang tua dan guru berlangsung baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Penghormatan ketika masih hidup selayaknya diberikan sebagai orang yang memiliki berbagai kelebihan. Hormat anak murid di hadapan guru seperti yang digambarkan Jibril di hadapan Nabi ketika bertanya tentang Islam, duduk sopan seperti tahiyat dalam shalat dengan melipat kedua kakinya kedua lututnya disandar pada kedua lutut Nabi dan kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Sedangkan setelah wafat bentuk penghormatan adalah memohonkan ampunan dan mendoakan.

Tugas Mandiri

1. Certitakan secara singkat Alqamah akibat durhakanya kepada ibundanya
2. Certitakan secara singkat Jurajj akibat durhakanya kepada ibundanya sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis



BAGIAN 5 TATA KRAMA & SOPAN SANTUN

Kompetensi Dasar :

3.5. Memahami Q.S. Al- Baqarah (2): 83 dan hadits terkait tentang tata krama, sopan-santun, dan rasa malu.

Tujuan Pembelajaran :

- 3.5.1. Menyebutkan dalil Al Quran (Q.S. Al- Baqarah (2): 83) dan Al Hadis terkait dengan Tata Krama dan Sopan Santun
- 3.5.32 Mendeskripsikan Pengertian Tata Krama dan Sopan Santun, Keseimbangan antara bertatakrama dan sopan santun dengan Allah dan sesama manusia, kewajiban bertatakrama dan sopan santun dengan Allah, dan kewajiban bertata krama dan sopan santun dengan manusia

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tentang Tata Krama & Sopan Santun

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالذَّيِّقَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ^{٨٣}

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. 2:83)

Hadis Nabi:

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه
قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abdillah bin Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah kutukan seorang laki-laki terhadap kedua orang tuanya. Ditanyakan (oleh seorang sahabat) Ya Rasulullah bagaimana seorang laki-laki itu nebgutuk kedua orang tuanya? Beliau menjawab: "Seorang laki-laki itu mencela bapaknya laki-laki lain, maka ia mencela (membalas cela) kepada bapak dan ibunya". (HR. Muttafaq Alaih)

Pengertian Tata Krama dan Sopan Santun

Secara umum tata karma, sopan santu, budi pekerti, etika, dan adab adalah satu makna dan satu pengertian yakni sifat terpuji, sekalipun terkadang berbeda karena konteks dan cakupannya berbeda. Sopan santun adalah budi pekerti yang baik, tata karma, peradaban, dan kesuksesan.²⁸ Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.²⁹ Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak.³⁰ Akhlak lebih dekat sumber nilainya baik dan buruk dari agama. Sedang adab sumber nilainya baik dan buruk

²⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, <http://pusat.bahasa.diknas.go.id/kbbi/>

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

mencakup agama, budaya, dan tradisi. Tata karma, budi pekerti dan etika lebih cenderung pada budaya, tradisi, dan logika sekalipun wujudnya juga diwarnai agama. Ia masih bersifat mutlak belum ada keterikatan nilai tertentu. Semua istilah di atas adalah merupakan sifat baik yang sudah dibiasakan sehingga menjadi kepribadian.

Tata karma, adab dan sopan santun di sini dimaksudkan bersifat *nashshiy* berdasarkan al-Qur'an Hadis dan *ijtihadiy* berdasarkan budaya dan tradisi yang diseleksi secara islami. Kata akhlak (*akhlâq*) dalam al-Qur'an hanya disebutkan mufradnya *khuluq* dua kali yaitu QS. al-Syu'ara/26: 137 dan QS. Nun (al-Qalam)/68: 4. Sedangkan kata adab atau budi pekerti tidak ada satu ayatpun yang menjelaskannya.

Keseimbangan Tata Krama dan Sopan Santun

Islam agama yang seimbang, segala ajarannya pun juga seimbang. Keseimbangan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, seimbang antara ibadah dan muamalah, seimbang antara kebutuhan individual dan social. Ayat di atas menjelaskan keseimbangan antara adab atau tatakrama dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, yakni orang tua, kerabat, anak yatim dan sesama manusia. Sebagaimana Allah mengambil janji Bani Israil dalam kitab Taurat melalui para nabinya untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ayat di atas juga mengambil janji kepada umat Muhammad agar melaksanakan perintah Allah secara patuh dan tulus tidak seperti Bani Israil, tetapi hanya sedikit yang tidak berpaling di antara mereka.

Ayat di atas perintah bertata karma atau bersopan santun kepada Allah dan kepada sesama manusia secara seimbang;

1. Bertata krama dan sopan santun kepada Allah adalah tidak menyembah selain kepada Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Di sini ada keseimbangan antara ibadah, akidah dan akhlak, antara ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti shalat dan berhubungan dengan manusia seperti zakat.
2. Bertata karma dan sopan santun dengan sesama manusia yakni berbuat ihsan (kebaikan) kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin dan semua manusia. Perbuatan ihsan pun ada keseimbangan antara perbuatan dan ucapan, perbuatan baik dan ucapan yang baik pula.

Kewajiban Bertata Krama dengan Allah

Sebagaimana disebutkan pada QS. Al-Baqarah/2: 83 yaitu Bertata krama dan sopan santun kepada Allah adalah:

1. Tidak menyembah selain kepada Allah,
2. mendirikan shalat dan
3. menunaikan zakat.

Perintah Allah tidak menyembah selain Allah adalah bermakna tauhid yaitu dengan mengesakan-Na, membenarkan para Rasul dan mengamalkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Perintah shalat aspek ibadah dan zakat aspek social. Shalat dilakukan Bani Israil sesuai dengan cara pada masanya. Sedangkan zakat menurut Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip al-Syaukani: Mereka meletakkan harta zakat itu di suatu tempat kemudian api turun datang untuk memakannya jika diterima dan api itu tidak turun bagi zakat yang tidak diterima.³¹

Beberapa hal yang diperintahkan kepada Bani Israil di atas juga diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad dan Bani Israil yang hadir masa Nabi Muhammad saw karena mereka juga sama dengan para pendahulunya, kecuali sedikit di antaranya Abdullah Salam dan teman-temannya.³² Jika seseorang menyembah Allah tetapi juga menyekutukan-Nya dengan sesuatu berarti ia tidak mempunyai adab dan tidak punya sopan kepada Allah. Bagaimana orang tersebut sopan kalau ia lahirnya shalat menyembah Allah, tetapi hatinya pamer, riya, dan ingin dipuji manusia. Bagaimana seorang itu disebut sopan, kalau ia menyembah batu, pohon, pangkat, jabatan, uang, wanita dan

³¹ al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' bain Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min Ilm al-Tafsîr*, <http://www.altafsir.com>, juz 1, h. 133

³² al-Syaukaniy, *Fath al-Qadîr...*, juz 1, h. 133



lain-lai. Sementara Allahlah sesungguhnya yang menciptakan dia dan yang menciptakan benda-benda itu.

Seorang yang sopan santun dengan Allah selalu melaksanakan shalat. Dirikanlah shalat (وأقيموا الصلاة), mendirikan shalat berbeda dengan melaksanakan shalat. Makna mendirikan shalat adalah mensdirikannya secara kontinew terus menerus sampai mati sedang melaksanakan berarti mungki sekali-kali atau terkadang. Orang yang sopan dengan Allah berarti selalu mengerjakan shalat dan dilaksanakan secara khususy' dan sempurna

Zakat wajib dikeluarkan bagi yang berharta mencapai ukuran minimal zakat (nishab). Zakat yang dikeluarkan semata tanda syukurnya kepada Allah yang telah memberi kelimpahan harta benda dan sebagai tanda syukurnya kepada fakir miskin yang telah banyak membantu usahanya sehingga sukses. Orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti tidak sopan dengan Allah.

Yatimin Abdillah menyebutkan secara garis besar akhlak manusia dengan Allah adalah tawakkal hanya kepada Allah semata, bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, ikhlas dan rida akan segala keputusan Allah.³³

Akhlak di atas hanya menekankan pada aspek tauhid dan ibadah saja belum menampakkkan social sebagaimana dalam al-Qur'an di atas.

Kewajiban Bertata Krama dengan Manusia

Urutan manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan tata karma dan sopan santun yang baik adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 83 yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua

Orang pertama yang berhak mendapat penghargaan tata karma dan sopan santun adalah orang tua. Bertata karma dengan kedua orang tua berarti mempergauli dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'rûf*), rendah hati (*tawâdhu'*) di hadapannya, mengikuti segala perintahnya dan segala hak orang tua yang diwajibkan Allah swt.³⁴ Karena merekalah yang menjadi sebab wujudnya anak, merekalah yang merawat anak sejak kecil. Kata "Ihsan" berbuat baik berarti berbuat sesuatu yang melebihi dari kewajiban.³⁵

Berdosa besar seorang anank yang tidak punya sopan santun kepada kedua orang tuanya yakni anak yang mengutuk, mencaci atau mencela kepada orang tuanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Pada Hadis di atas yang *muttafaq 'alaih* menjelaskan keadaan anak yang mengutuk orang tuanya sendiri. Yakni anak itu mencela bapaknya seorang anak lain, kemudian ia membalas mencela bapaknya. Maka ia berarti sama dengan mencela bapaknya sendiri.

2. Kerabat sanak famili

Kerabat adalah orang kedua setelah orang tua. Tata karma dengan kerabat adalah dengan mengadakan shilaturrahim dan membantu segala yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan. Andaikata semua orang melakukan hal ini yakni bertanggung jawab terhadap kerabat, bertata karma dengan kerabat maka tidak ada keluarga yang kekurangan. Kerabat ini jika miskin memiliki dua hak; yaitu hak miskin dan hak kerabat.

3. Anak-anak yatim

Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya semasa usia masih kecil, sedang yatim pada binatang adalah yang ditinggal mati ibunya. Anak yatim kehilangan seorang bapak yang mengurus kehidupannya. Tata karma terhadap anak yatim menjadikan masyarakat Islam sebagai bapaknya yang melindungi dan mencukupi segala kebutuhannya.

Secara umum al-Qur'an memandang perlunya bertata karma dengan anak yatim:

- Berbuat baik sebagai tanda orang yang benar imannya
- Menyantuni adalah kewajiban social setiap orang Islam
- Membela dan melindungi adalah salah satu perjuangan Islam

³³ Henny Narendrani Hidayati, Pengukuran Akhlakul karimah Mahasiswa, (Jakarta: UIN Press, 2009), cet. 1, h. 11-12

³⁴ al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*..., juz 1, h. 132

³⁵ al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawiy*, juz 1, h. 249

- d. Problema social timbul karena empat sebab; a) tidak memuliakan anak yatim, b) tidak memberi makan kepada orang miskin, c) memakan kekayaan dengan rakus, d) mencintai harta benda secara berlebihan
 - e. Bila orang membagikan harta warisan diperintahkan agar sebagian dibagikan kepada kerabat, yatim, dan miskin yang tidak mempunyai hak waris
 - f. Orang Islam diperintahkan berhati-hati dalam memelihara harta anak yatim, jangan dicampur adukannya dengan harta sendiri, karena memakan harta anak yatim berdosa besar.
 - g. Orang Islam dilarang melakukan anak yatim sewenang-wenang dan dilarang menghardiknya.³⁶
4. Orang miskin

Miskin lebih sengsara dibandingkan fakir, miskin tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki harta apa-apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tata karma terhadap orang miskin menjadikan masyarakat Islam bertanggung jawab terhadap kemiskinan mereka dengan bantuan harta zakat, sedekah dan infak. Dengan demikian akan menghilangkan rasa benci dan dendam.

5. Semua manusia

Tata karma dengan sesama manusia dengan ucapan yang baik menurut syara' sebagian ulama mengatakan ungkapan kalimat tauhid³⁷ dan menurut logika. Rasulullah saw bersabda pada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Muadz bin Jabal:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه الترمذی)

Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah kejahatan dengan kebaikan maka ia menghapuskannya dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. (HR. al-Turmudzi dan berkata Hadis hasan)

Rangkuman

Tata karma, adab dan sopan santun di sini dimaksudkan bersifat *nashshiy* berdasarkan al-Qur'an Hadis dan *ijtihadiy* berdasarkan budaya dan tradisi yang diseleksi secara islami.

Ayat di atas QS. Al-Baqarah/2: 83 perintah bertata karma atau bersopan santun secara seimbang antara kepada Allah dan kepada sesama manusia:

1. Bertata karma dan sopan santun kepada Allah adalah tidak menyembah selain kepada Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Di sini ada keseimbangan antara ibadah, akidah dan akhlak, antara ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti shalat dan berhubungan dengan manusia yakni zakat.
2. Bertata karma dan sopan santun dengan sesama manusia yakni berbuat ihsan (kebaikan) kepada orang tua, kerabat, yatim, miskin dan semua manusia. Perbuatan ihsanpun ada keseimbangan antara perbuatan dan ucapan, perbuatan baik dan ucapan yang baik pula.

Latihan

1. Diskusikan dengan teman-teman kelas saudara tentang panti jompo
2. Diskusikan dengan teman-teman kelas saudara tentang zakat harta (mal) diurus negara

³⁶ Jalaudinn Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 86-87

³⁷ al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir...*, juz 1, h. 132

Bersikap demokratis berarti bersifat demokrasi, yang berarti (bentuk atau sistem) pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat; atau gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴⁰ Bersikap demokratis berarti sikap pandangan hidup mengutamakan persamaan hak dan kewajiban atau perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Yakni kata “Demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “demos” yang berate kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Demokrasi juga diartikan kerakyatan, pemerintahan atas azaz kerakyatan, pemerintahan rakyat.⁴¹ Azaz demokrasi adalah musyawarah dalam segala hal yang menyangkut orang lain, ditentukan secara bersama untuk kepentingan bersama. Azaz musyawarah disebutkan dalam QS. QS. Ali Imran /3: 159 yang akan dibahas pada pembahasan berikut nanti.

Wujud demokrasi dalam suatu Negara adalah majlis syura atau MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat). Menurut al-Maududiy pemerintahan theo-demokrasi pernah dikembangkan pada pemerintahan Khulafaur rasyidin yang merupakan pelanjut kepemimpinan Rasulullah saw wafat. Theo-demokrasi diartikan bahwa Islam memberikan kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan, dengan kata lain kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan.⁴²

Secara sederhana sikap demokratis dapat diartikan adalah sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap menerima pendapat orang lain, sikap mau mengkritik dan mau dikritik dan lain-lain.

Ciri-ciri Berfikir Kritis (Ulil Albab)

Ciri sikap demokratis sebgaimana yang disebutkan dalam QS. Ali Imran/3: 190-191 ada tiga cirri utama; yaitu berdzikir, memikirkan atau mengamati fenomena alam dan berkreasi. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa berfikir kritis memiliki tiga tuntutan besar:

1. Berdzikir

Seorang yang berfikir kritis dan cerdas, cirri pertama adalah selalu berdzikir kepada Allah *سُبْحَانَ اللَّهِ* baik siang dan malam, pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Maknanya tiada waktu tanpa berdzikir, segala waktu diisi dengan dzikir baik dalam shalat maupun di luar shalat. Berdzikir bukan saja hanya ingat tetapi juga membaca kitab Allah, memahami isinya, menyebar luaskan dan mengamalkan isi kandungannya. Membelajari kitab suci dalam rangka memahami , menyebar luaskan dan menerapkan nilai-nilainya di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam kebutuhan dan problemanya.

2. Berfikir Kritis

Berfikir kritis berarti mengamati, meneliti, menyimpulkan dan membuktikan kebenarannya. Mengamati ayat-ayat Tuhan di alam raya ini baik dalam diri manusia secara perorangan maupun berkelompok, di samping juga mengamati fenomena alam. Mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi *وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ*

Muhammad Quthub dalaam bukunya *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah* dikutip oleh M Quraish Shihab bahwa ayat-ayat tersebut merupakan metode yang sempurna bagi penalaran dan pengamatan Islam terhadap alam. Ayat-ayat itu mengarahkan akal manusia kepada fungsi pertama di antara sekian banyak fungsinya, yakni mempelajari ayat-ayat Tuhan yang tersaji dalam alam jagat raya ini. Ayat tersebut bermula dari tafakkur dan berakhir dengan amal.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barri, *Kamus Lengkap Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 100

⁴² Amin Rais dalam mengomentari Abu al-Ala al-Maududiy, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Haidar Baqir (Jakarta: Mizan, 1994) h. 20-24

⁴³ Shihab, *Wawasan...*, h. 443

ia tidak berakhlak, maka tidak punya kedudukan di antara mereka. Dengan demikian manusia dilihat dari akhlaknya bukan yang lain

Ciri-ciri Bersikap Demokratis

Di antara ciri seorang bersikap demokratis adalah cinta bermusyawarah. Musyawarah diartikan berunding dan berembuk. Pada mulanya diartikan mengeluarkan madu dari sarang lebah. al-Qur'an memilihnya musyawarah untuk menunjukkan arti membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁴⁶

Kaitannya dengan madu, madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari dimanapun dan oleh siapapun. Madu dihasilkan oleh lebah, orang yang bermusyawarah bagaikan lebah; makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang dan hasilnya madu.⁴⁷

Ayat di atas yakni QS. Ali Imran /3: 159 secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat dan anggota masyarakatnya. Ayat ini juga petunjuk, khususnya setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.⁴⁸

Tiga sikap yang ditunjukkan seorang bersikap demokratis dalam QS. Ali Imran /3: 159 yaitu:

1. Sikap lemah lembut

Seorang pimpinan dan atau yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika mereka bersikap seperti itu maka anggota musyawarah akar berlarian dari padanya:

2. Memberi maaf

Maaf secara harfiah berarti menghapus. memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Sikap pemaaf adalah sikap yang baik untuk memberi support kepada anggota musyawarah yang bersalah untuk melanjutkan musyawarahnya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Memohonkan ampunan

Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika bermusyawarah, hubungan dengan Tuhanpun harus harmonis.

Beberapa petunjuk al-Quran menegani sikap yang harus dilakukan seseorang untuk menyukseskan musyawarah. Tiga sikap yang secara berurutan diperintahkan Nabi Muhammad untuk beliau lakukan sebelum datangnya perintah musyawarah. Penyebutan ketiga sikap dikemukakan sesuai dengan konteks turunnya. Namun dari segi pelaksanaannya dan esensi musawarah agaknya sifat-sifat tersebut sengaja dikemukakan agar ketiganya menghiasi diri Nabi dan yang melakukan musyawarah.⁴⁹ Setelah musyawarah ada tekad yang bulat untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musawarah.

Kemudian setelah bermusawarah masing-masing berazam atau membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil keputusan bersama yang merupakan konsekwensi bersama dengan penuh takwakkal kepada Allah swt.

Langkah-Langkah Menuju Berfikir Kritis dan Sikap Demokratis

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat yang berfikir kritis dan bersikap demokratis. Dalam mengembangkan berfikir kritis dan sikap demokratis perlu ada pengembangan kultur kritis dan demokrasi. Almond mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh

⁴⁶ Quraish Shihab, *Lentera...* h. 375-376

⁴⁷ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996) cet. 3, h. 469

⁴⁸ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 470

⁴⁹ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 472

Makna Saling Menasehati dan Berbuat Ihsan

Nasihat berasal dari bahasa Arab, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nasihat diartikan secara sederhana mauizah yaitu; ajaran atau pelajaran yang baik; atau diartikan anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik, kehendak baik. Saling menasihati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Dalam al-Qur'an tidak didapati kata nasihat kecuali akar kata seperti kata *nashahū* نَصَحُوا yang berarti ikhlas nasihat kepada Allah dalam QS. Al-Taubah/9: 91 dan kata *Nāshihun* berarti penasehat.

Kata “nasihat” banyak disebutkan dalam beberapa Hadis di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tamim al-Dariy, Rasulullah saw bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. فُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : لِإِلَهِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (صحيح مسلم)

Agama itu nasihat, kami bertanya: Untuk siapa? Beliau menjawab untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pimpinan kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. (HR. Muslim)

Mayoritas isi kandungan agama adalah nasihat. Ada beberapa pengertian nasihat yang berbeda bergantung konteks kepada siapa nasihat itu diberika. Al-Khathaby dan ulama lain memberikan arti nasihat sebagaimana yang dikutip oleh al-Nawawi pada sayarah Muslim sebagai berikut:

1. Nasihat untuk Allah diartikan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Nasihat begi kitab Allah, maknanya beriman keagungan kalam Allah al-Qur'an, membaca, memahami dan mengamalkannya
3. Nasihat kepada Rasul-Nya, maknanya mengimani kebenarannya, patuh segala yang datang dari padanya dan menghidupkan Sunah-sunahnya
4. Nasihat terhadap para pimpinan umat Islam, artinya membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran, taat segala perintahnya dan memberikan masukan saran secara sopan jika mereka menyimpang.
5. Nasihat kepada kaum muslimin semuanya, artinya memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka untuk kemaslahatan dunia dan akhirat serta mencegah gangguan mereka.⁵¹

Kata Nasihat sinonim *mauizah* sebagaimana yang disebutkan akar kata pada QS. Lukman/31: 13 mauizhanya Lukman terhadap anaknya.

Sedangkan Ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik adakalanya dalam ibadah dan adakalanya bermuamalah dengan sesama manusia. Ihsan dalam ibadah sebagaimana Hadis Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril:

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (رواه مسلم)

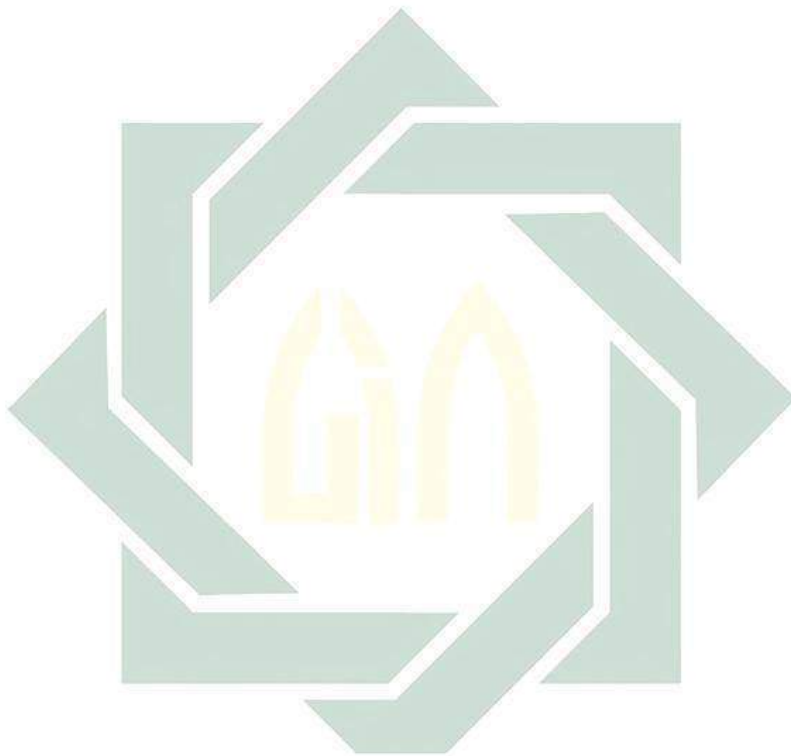
Kemudian dia berkata lagi, “Beritakan padaku tentang Ihsan”. Lalu Rasul bersabda: “Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat kamu”... (HR. Muslim)

Ihsan dalam ibadah berarti membaguskan ibadah, yaitu menyembah Allah seolah melihat-Nya atau kalau tidak bisa sesungguhnya Allah melihat kita. Maknanya usahakan ibadahnya dibuat yang paling bagus dengan menjaga adab dan tata kramanya baik lahir maupun batin, terutama, keikhlasan, kekhushyuan dan ke khudhu'annya. Sedangkan ihsan berbuat baik dalam bermuamalah dengan sesama saudara dengan shilatur rahim, membantu kerepotan dan kekurangannya.

⁵¹ Al-Nawawiy, *Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, (Cairo : Dâr al-Fajr, 1420), juz 2, h.38-39



Isi kandungan QS. al-Nisa/4 : 36 Perintah berbuat Ihsan (berbuat baik) secara seimbang, yakni berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat Ihsan kepada manusia; dua orang tua ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Bentuk bererbuat Ihsan dengan sesama manusia dalam berbagai bentuk,ucapan, perbuatan dan sikap, secara moral maupun material dan social yang disebut dengan shialaturahim.



padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu." (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Berdasarkan hadis di atas, harta kekayaan dalam bentuk **emas** wajib dizakatkan bila telah mencapai nishab, yaitu **20 dinar emas (85 gram)**. Sedangkan **nishab perak** adalah **200 Dirham (595 gram)**, dengan syarat telah **dimiliki selama setahun (haul)**. **Kadar zakatnya** adalah **2,5 %** atau $1/40$ jika telah mencapai nishab. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka zakatnya adalah $85/40 = 2,125$ gram. Jika timbangan emas 100 gram, zakatnya adalah $100/40 = 2,5$ gram.

Sedangkan perhiasan yang biasa dipakai wanita, para ulama sepakat bahwa permata, batu, intan dan barang perhiasan lain selain dari emas dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika digunakan untuk bisnis, maka ia termasuk barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika perhiasan tersebut dari emas atau perak, ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi 2 syarat diatas, yaitu haul dan nishab. Sedangkan Juhum ulama berpendapat, bahwa perhiasan dari emas dan perak yang biasa dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2). Zakat Pertanian, buah-buahan dan biji-bijian

Kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, buah-buahan dan biji-bijian didasarkan pada ayat QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Juga dalam QS. al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَانِ مِثْلَانِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebuhan yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Adapun batas minimal nishab zakat pertanian ditentukan berdasarkan hadis

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ (متفق عليه)

"Tidak (diwajibkan) zakat pada (hasil pertanian) yang kurang dari 5 wasaq, dari kurma atau benih". Catatan: 1 wasaq = 60 sha' x 2,5 kg = 150 kg x 5 wasaq = 750 kg.

Kadar zakat pertanian sebesar 10 % jika tanaman diairi dengan air hujan atau air sungai atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Tapi, kalau tanaman diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya seperti pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka dikenai zakat sebesar 5%, yang dibayarkan langsung pada saat

panen, tanpa menunggu haul. Berdasarkan dalil hadis dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah *Saw.* bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَثْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْحِ نِصْفُ الْعَثْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).” (HR. Jama’ah kecuali Muslim)

3). Zakat Hasil Tambang dan Rikaz

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang (*ma’adin*) juga didasarkan pada ayat QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Secara definisi fiqh, rikaz berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non muslim yang terpendam yang didapat dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Sedangkan *ma’adin* atau barang tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai yang berharga, bisa berupa benda padat seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal atau berupa zat cair seperti minyak bumi dan aspal. Mazhab Hanafi menganggap *ma’dan, rikaz* dan *kanz* (harta terpendam) satu makna (sinonim), bedanya kalau *ma’dan* merupakan ciptaan Allah sejak semula di dalam bumi, sedangkan *rikaz* dan *kanz* ialah harta terpendam akibat perbuatan orang kafir.

Harta terpendam jika ditemukan di tanah tak bertuan, maka menjadi milik orang yang menemukan, ia cukup mengeluarkan zakat sebesar 20%. Kalau ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk, diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan (*luqathah*). Jika datang memilikinya, maka itu jadi milik orang tersebut, jika tidak diketahui pemiliknya maka menjadi milik orang yang menemukan dengan kewajiban membayar zakat.

Kadar zakat *ma’adin* seperlima (20%) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan Syafi’i dan Hanbali menetapkan *rub’ul usyur* (2,5%) untuk *ma’dan* selain rikaz, seperti emas dan perak. Adapun kadar zakat rikaz disepakati oleh seluruh mazhab sebesar 20%. Dalilnya, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam yang enam: *وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ*

Jumhur fuqaha’ mensyaratkan nishab untuk zakat pertambangan, yaitu ketika yang digali sudah mencapai nilai satu nishab uang. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak ada batas nishab pertambangan, dan dikeluarkan seperlimanya, berapapun yang diperoleh. Tidak disyaratkan masa setahun menurut mayoritas ulama, akan tetapi wajib dikeluarkan zakat seketika dihasilkan tambang itu. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan dalam hal ini perkembangan harta tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

4). Zakat Hewan Ternak

Kewajiban mengeluarkan zakat hewan ternak didasarkan pada hadis berikut.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْعَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَبِهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْتَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لُبُونٍ ذَكَرَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَبِهَا بِنْتُ لُبُونٍ أَنْتَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَبِهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَبِهَا جَدْعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَبِهَا بِنْتُ لُبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ

سَائِمَتَهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَوَحْدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُنْفَرَقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَسْيَةِ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُسْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَتَهُ الْجَدْعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدْعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَدْعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدْعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Anas bahwa Abu Bakar al-Shiddiq ra. menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasul atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2,5 %). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. (HR. Bukhari).

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, yaitu:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 persen dari penghasilan kotor (brutto) secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 5.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 5.000.000 = \text{Rp } 125.000$ per bulan atau Rp 1.500.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok (netto), zakat dihitung 2,5 persen dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 2.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (2.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 25.000$ per bulan atau Rp 300.000,- per tahun.

Mengenai sumber-sumber zakat modern lainnya, perhitungannya adalah dengan jalan analogi atau qiyas dari sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, obligasi, surat berharga ataupun yang lainnya, nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

Mustahiq (Yang Berhak Menerima) Zakat

Mustahiq zakat berjumlah delapan golongan (*ashnaf*), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun kriteria masing-masing mustahiq zakat yang termasuk dalam kelompok delapan *ashnaf* di atas adalah sebagai berikut :

- 1) **Fakir**, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) **Miskin**, adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) **‘Amil (Panitia Zakat)**, adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq.
- 4) **Muallaf**, adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam.
- 5) **Riqab**, adalah pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi.
- 6) **Gharimin**, adalah orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.



Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan sebuah bentuk perwujudan dari suatu aktivitas kedermawanan yang diajarkan oleh agama Islam. Bentuk kedermawanan ini biasa disebut dengan istilah **Filantropi Islam**. Dalam perekonomian modern, makna ZIS diperluas agar dapat mencakup sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat antara lain: Sumber zakat tersebut masih dianggap baru, seperti zakat profesi, properti, investasi, saham dan obligasi. Selain itu ekstensifikasi sumber zakat mengacu pada ciri dari ekonomi modern yang tidak hanya menyentuh kewajiban perorangan, tetapi juga memasuki wilayah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan ZIS

1. **Prinsip keterbukaan:** diketahui oleh masyarakat umum agar tahu kepada siapa ZIS itu diberikan.
2. **Prinsip sukarela:** menyerahkan ZIS tersebut tanpa ada unsur pemaksaan.
3. **Prinsip keterpaduan:** menerapkan prinsip manajemen terpadu yang efektif dan efisien dan telah terbukti kemampuannya.
4. **Prinsip profesionalisme:** pengelola ZIS harus orang yang ahli dalam bidangnya, baik dari administrasi keuangan, manajemen dan sebagainya, serta dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Juga harus mengerti masalah zakat, memiliki data *Muzakki-Mustahiq*, memiliki program kerja, memiliki badan hukum, dan bersedia diaudit secara terbuka.
5. **Prinsip kemandirian:** dapat mandiri dan mampu melakukan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu dan ketergantungan dari pihak lain

Kendala Pengelolaan Zakat

1. Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya masih bersifat sukarela. Ada pula pemahaman bahwa mengeluarkan zakat cukup hanya zakat fitrah saja.
2. Zakat kadang kala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya.
3. Anggapan bahwa manajemen ZIS/ Lembaga Zakat terkesan kurang profesional, sehingga kesan terhadap pengelolaan hasil zakat kurang dirasakan.
4. Masyarakat masih membayar zakat langsung secara individu kepada mustahik, tidak melewati lembaga pengelolaan zakat.
5. Pemahaman bahwa zakat hanya wajib bagi kalangan orang kaya saja, dan peraturan zakat belum mengikat.

Ringkasan Materi Pokok

1. Secara etimologi, kata zakat merupakan bentuk *masdar* dari akar kata bahasa Arab *zaka – yazku – zakatan*, yang mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (berkah), *al-nama'* (tumbuh/berkembang), *al-thaharah* (bersih/suci), dan *al-shalahu* (baik/beres). Sedangkan terminologi Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*), apabila telah mencapai nishab/batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

2. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim, berdasarkan Al-Qur'an Al-Hadits, ijma' dan UUPZ (Undang-Undang Pengelolaan Zakat).
3. Secara umum, zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat fitri dan zakat mal (harta).
4. *Zakat al-Fithri* atau zakat fitrah disebut juga *zakat al-nufus*. Mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan *shaum* Ramadhan. Sedangkan zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, buah-buahan dan biji-bijian, zakat hasil tambang dan rikaz, zakat hewan ternak, zakat hasil perdagangan. sumber-sumber zakat modernlainnya, perhitungannya adalah dengan jalan analogi atau qiyas dari sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, obligasi, surat berharga ataupun yang lainnya, nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak.
5. Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat, yaitu *muzakki* sebagai pihak yang wajib membayar zakat, *mustahiq* sebagai pihak penerima zakat, *amwal zakat* sebagai harta yang wajib dizakatkan, serta *'amil* yang merupakan unsur pengurus zakat.
6. Perbedaan zakat, infak dan shadaqah adalah zakat merupakan shadaqah wajib, infak dan shaaqah hukmnya adalah sunnah. Infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah bisa berupa materi dan non-materi.

Tugas Mandiri

Jawablah soal-soal dibawah ini :

1. Tulislah ayat Al-Qur'an yang menguraikan ashnaf penerima zakat!
2. Jelaskan perbedaan zakat, infak dan shadaqah!
3. Sebutkan prinsip-prinsip pengelolaan ZIS dan jelaskan!

BAGIAN 9 PENYEMBELIHAN HEWAN

Kompetensi Dasar:

Memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam

Tujuan Pembelajaran

Setelah menjalankan pembelajaran ilmu Fiqh tentang penyembelihan hewan maka diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan
2. Menjelaskan ketentuan (rukun dan syarat) yang harus terpenuhi dalam penyembelihan hewan
3. Menjelaskan jenis hewan yang halal untuk disembelih
4. Menjelaskan cara dan alat penyembelihan
5. Menjelaskan perkara yang boleh dan makruh dalam penyembelihan
6. Menjelaskan hikmah dari syariat penyembelihan hewan

Pengertian dan Dasar Hukum

Kata penyembelihan adalah terjemahan dari kata al-dzaka (الذكاة). Secara bahasa kata yang tersebut terakhir ini memiliki beberapa arti. Pertama berarti bau yang sedap, kedua bermakna *al-tatmim* yang berarti penyempurnaan. Secara istilah, penyembelihan berarti melakukan pemotongan urat leher binatang dengan alat potong sehingga menyebabkan binatang itu tidak bernyawa lagi (mati). Pada umumnya semua binatang yang halal untuk dimakan harus disembelih terlebih dahulu sesuai dengan aturan syara' kecuali ikan dan belalang.

Terdapat perbedaan pendapat diantara imam mazhab terkait dengan bagian tubuh hewan yang menjadi sasaran pemotongan. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, masing-masing berpendapat bahwapenyembelihan dianggap sah jika kerongkongan (tempat berjalan makanan) dan tenggorokan (tempat berjalan napas/*hulqum*) binatang tersebut dipotong tapi tidak wajib memotong kedua urat nadi (*wadajain*), memotong bagian yang terakhir ini hukumnya hanya sunnah. Menurut Hanafi wajib memotong kerongkongan, tenggorokan serta salah satu dari pembuluh darah. Sedangkan Malik berpendapat wajib memotong keempat-empatnya yaitu kerongkongan, tenggorokan, pembuluh darah dan nadi di leher.

Penyembelihan hewan sebagai sebuah aktifitas keseharian memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melarang secara tegas (hukumnya haram) untuk memakan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hal ini didasari oleh firman Allah SWT QS.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيْكُمْ أَهْوَاءَهُمْ لِيُجْدِلَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١

Artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS. al-An'Am/6:121)

Dalam ayat yang lain Allah juga secara tegas mengharamkan memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... ٢

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,... (QS. Al-Maidah/6:3)

4. Penyembelihan binatang yang terdapat janin (embrio) di perutnya. Kasus penyembelihan seekor binatang yang di dalamnya terdapat janin, maka penyembelihan cukup dilakukan terhadap induknya saja sekalipun setelah itu janin seperti dimaksud keluar dalam keadaan mati atau hidup.

b. Yang Makruh Dilakukan

Perkara-perkara ini kedudukannya tidak sampai membatalkan sembelihan namun hanya makruh untuk dilakukannya yaitu : a). Penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpul, b). Mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan itu diyakini sudah benar-benar mati (pergi ruhny), berdasarkan hadits nabi Saw. “Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia pergi.”

Hikmah

Hikmah yang dapat diambil dari syariat penyembelihan hewan antara lain adalah:

1. Menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah.
2. Menambah ketenangan terhadap jiwa karena apa yang dilakukan dan di makan diyakini sudah sesuai dengan syariat Allah dan syariat Allah tersebut mengandung nilai kemaslahatan hidup.
3. Akan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat diakibatkan dari mengkonsumsi binatang yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Ringkasan Materi

1. Penyembelihan berarti melakukan pemotongan urat leher binatang dengan alat potong sehingga menyebabkan binatang itu tidak bernyawa lagi (mati). Semua binatang yang halal untuk dimakan diperintahkan untuk disembelih terlebih dahulu sesuai dengan aturan syara' kecuali ikan dan belalang.
2. Dasar hukum penyembelihan hewan didasari oleh al-Qur'an surat al-An'Am ayat 121 dan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 63
3. Para Imam mazhab sepakat bahwa daging hewan yang boleh dikonsumsi adalah hewan yang terlebih dahulu disembelih dengan mengucapkan nama Allah SWT.
4. Syarat penyembelihan hewan adalah: pelakunya adalah orang Islam baik laki atau perempuan, berakal dan memiliki kemampuan penyembelihan. Sedangkan rukunnya meliputi: alat penyembelihan tajam, pemotongan harus mengenai sasaran dan menyebut nama Allah ketika penyembelihannya
5. Hal yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Perkara pertamanya meliputi penyembelihan hewan yang cidera atau sakit, mengangkat tangan atau pisau sebelum penyembelihan sempurna dan melukai hewan ketika penyembelihan gagal. Perkara kedua meliputi penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpul dan mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan itu diyakini sudah benar-benar mati (pergi ruhny).
6. Hikmah yang dipetik dari ajaran penyembelihan diantaranya adalah untuk menambah ketaqwaan dan ketenangan jiwa

Tugas mandiri

Setelah anda melaksanakan pembelajaran tentang materi penyembelihan hewan maka sekarang jawablah soal-soal berikut ini!

1. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan?
2. Jelaskan syarat dan rukun dalam penyembelihan hewan!
3. Jelaskan pendapat imam mazhab tentang hukum membaca basmalah dalam penyembelihan!
4. Uraikah hikmah tentang perintah penyembelihan hewan!

Sejarah Singkat Syariat Qurban

Qurban merupakan syariat orang sebelum kita (*syar'u man qablana*) yang kemudian ditetapkan menjadi syariat nabi Muhammad SAW. Penetapan syariat qurban didasari oleh napak tilas yang dilakukan oleh nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan Ismail sebagai putranya. Napak tilas dari kedua manusia pilihan Allah itu diceritakan oleh al-Quran sebagai berikut. Bahwa pada suatu hari nabi Ibrahim bermimpi, ia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya yang baru beranjak remaja itu. Pada awalnya Ibrahim ragu kalau-kalau ini adalah bisikan syetan. Namun konon khabarnya, Ibrahim menjadi yakin bahwa perintah yang “aneh” itu adalah perintah Allah setelah ia bermimpi dengan mimpi serupa sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan berat hati lalu isi mimpi itu disampaikan kepada putranya Ismail. Setelah perintah itu disampaikan, justru Ismail sangat mendorong agar ayahnya tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah berupa penyembelihan terhadap dirinya. Maka ketika prosesi penyembelihan akan dilakukan, tiba-tiba Ismail diganti dengan seekor domba besar. Kisah ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an secara berurutan berikut ini:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?, ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, Hai Ibrahim sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. (QS, al-Shâffât/37:102-107)

Dari napak tilas nabi Ibrahim dan putranya Ismail seperti dikisahkan oleh ayat tersebut di atas, kemudian umat nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya yaitu melakukan qurban berupa penyembelihan hewan berkaki empat seperti onta, sapi dan kambing.

Jenis Hewan Qurban

Binatang yang boleh dijadikan hewan qurban menurut sebagian pendapat ulama seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq adalah onta, sapi dan kambing, selain tiga jenis binatang yang tersebut terakhir ini maka tidak boleh. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat seperti dikutip oleh al-Dimasyqi, bahwa yang utamanya memang dengan tiga macam hewan tersebut, tapi boleh juga berqurban dengan selain tiga macam binatang qurban seperti telah disebut dengan syarat binatang tersebut halal dan berkaki empat seperti kerbau dan onta. Tidak disyaratkan binatang qurban itu harus laki atau perempuan. Dalam pelaksanaan qurban boleh dilakukan dengan cara bergabung sampai tujuh orang jika hewan qurban itu berupa onta, sapi atau kerbau. Adapun hewan qurban berupa kambing maka tidak boleh digabung karena binatang yang tersebut terakhir ini hanya diperuntukkan untuk satu orang. Ketentuan diperbolehkan untuk bergabung dalam berqurban seperti telah dijelaskan di atas didasari oleh hadits nabi:

نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya: kami menyembelih hewan qurban bersama dengan nabi di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang begitu juga sapi. (HR. Al-Turmuzi)

Hewan yang dijadikan qurban dari segi fisik disepakati harus bebas dari aib (cacat). Aib dimaksud adalah:

- a. Aib yang terlihat dengan jelas cacatnya misalnya binatang yang sakit, picak, pincang. Semua bentuk kecacatan yang tersebut terakhir ini ukurannya besar dan terlihat jelas. Jika tingkat kecacatannya itu terbilang sedikit sehingga tidak terlihat jelas maka kriteria binatang yang



tersebut terakhir ini masih boleh dijadikan hewan qurban. Bahkan al-Zahiri berpendapat binatang yang cacat matanya boleh dijadikan hewan qurban. Untuk binatang yang patah tanduknya hukumnya makruh dijadikan hewan qurban namun Hambali berpendapat tidak sah. Terkait dengan kasus orang yang sudah memilih sebuah hewan *qurban* dan dipastikan sudah bebas dari aib, kemudian tiba-tiba ditemukan terdapat cacat maka dalam kondisi terakhir ini masih boleh binatang tersebut untuk dijadikan hewan qurban.

- b. Yang terlalu kurus. Binatang qurban yang terlihat sangat kurus, nampak darinya hanya sedikit daging yang tertinggal maka binatang yang kondisinya seperti tersebut terakhir ini tidak sah dijadikan hewan qurban. Ulama bersepakat binatang yang terpotong telinganya dan terpotong ekornya, masing-masing binatang yang keadaannya tersebut terakhir ini juga tidak boleh dijadikan hewan qurban, karena dalam kondisi tersebut akan menghilangkan sebagian dagingnya. Menurut Hanafi dan Maliki, diperbolehkan jika anggota badan yang terpotong tersebut dalam kadar yang sedikit, tapi jika banyak tidak boleh. Sedangkan Hambali lebih menegaskan lagi jika yang terpotong itu sampai sepertiganya itulah yang tidak diperbolehkan. Demikian juga disepakati bahwa binatang yang terlalu tua yang tidak baik kualitas dagingnya juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan qurban.

Dari ketentuan syarat tentang kondisi binatang hewan seperti tersebut di atas, maka idealnya hewan yang akan dijadikan qurban adalah hewan yang sehat, gemuk dan tidak cacat.

Waktu dan Tatacara Pemotongan

Waktu pemotongan hewan qurban yaitu setelah salat *idul adha* dilakukan tepatnya tanggal 10 Zulhijjah dan tiga hari setelahnya yaitu hari *tasyriq* (11, 12 dan 13 Zulhijjah). Ketentuan waktu yang tersebut terakhir ini adalah menurut Syafi'i, tapi menurut Hanafi dan Maliki batas akhir hari qurban adalah hari kedua dari hari tasyriq. Waktu pelaksanaannya dapat dilakukan siang atau malan hari, namun Ibnu Sirrin berpendapat tidak boleh penyembelihan dilakukan kecuali pada siang hari. Binatang yang disembelih sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan seperti tersebut di atas maka tidak dinamakan qurban, hal ini didasarkan oleh hadits Nabi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya awal hari kita ini (idul adha), bahwa kita salat kemudian kita kembali dan memotong qurban, siapa yang melakukan itu maka ia mendapatkan sunnahku. Siapa yang menyembelih qurban sebelum waktu tersebut adalah sembelihan yang dagingnya dipersembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah qurban.* (HR. Bukhari)

Penyembelihan hewan qurban hukumnya sunnah dilakukan oleh si pemiliknya. Jika ia tidak mampu, boleh dilakukan oleh orang lain dan disunnahkan si pemilik hewan qurban untuk menyaksikan penyembelihannya. Hal ini didasari oleh hadits nabi:

يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي فَاشْهَدِي أَضْحِيَّتِكَ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمَلْتِيهِ (رواه البيهقي)

Artinya: *Hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah qurbanmu, kerana setiap tetes darahnya akan memohon ampunan terhadap dosa yang kamu lakukan.* (HR. Baihaqi)

Pada psinsipnya, teknik pelaksanaan penyembelihan hewan qurban sama dengan penyembelihan binatang biasa yaitu harus dilakukan oleh orang Islam, memiliki kemampuan penyembelihan dan menggunakan alat yang tepat. Hal lain terkait dengan sasaran anggota badan yang dipotong juga sama dengan penyembelihan biasa (dapat dilihat pada materi tentang penyembelihan hewan). Ketika menyembelih hewan disunnahkan untuk membaca nama Allah,

Ringkasan Materi

1. Secara istilah *qurban* berarti penyembelihan binatang seperti kambing, sapi dan onta yang disembelih pada hari raya qurban dan hari-hari *tasyriq*. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Kautsar ayat 2 dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali hukum berqurban itu *sunnah muakkadah* kecuali qurban yang dinazarkan maka hukumnya wajib. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa hukum berqurban itu wajib bagi yang sudah mampu saja. Qurban merupakan syariat nabi SAW seperti diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Shâffât/37:102-107. Binatang yang boleh dijadikan hewan qurban adalah binatang yang halal, berkaki empat seperti onta, sapi, kerbau dan kambing. Tiga macam binatang yang tersebut pertama bisa untuk tujuh orang sedangkan binatang yang tersebut terakhir diperuntukkan hanya untuk satu orang. Hewan yang dijadikan qurban dari segi fisik disyaratkan sehat, gemuk dan tidak cacat. Teknik pelaksanaan penyembelihan hewan qurban sama dengan penyembelihan binatang biasa yaitu harus dilakukan oleh orang Islam, ia memiliki kemampuan dan menggunakan alat yang tepat. Sepakat para imam mazhab bahwa tidak boleh hukumnya menjual daging dan kulit hewan qurban. Pendistribusian hewan qurban dapat dilakukan dengan pengawetan melalui pengalengan agar tahan lama.
2. Aqiqah adalah pemotongan hewan yang diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir pada hari ketujuh sejak kelahirannya. Dasar hukumnya adalah hadits nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengaqiqahkan cucunya Hasan dan Husen masing-masing seekor kambing qibas. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah anak adalah *sunnah muakkadah*. Pelaksanaan aqiqah dapat dilakukan pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau ke dua puluh satu dari kelahiran bayi. Jika semua itu tidak memungkinkan, aqiqah boleh dilaksanakan kapan saja. Pada prinsipnya, ketentuan pelaksanaan aqiqah adalah yang berlaku juga pada qurban hanya dalam aqiqah tidak boleh bergabung (*musyarakah*).

Tugas Mandiri

Setelah anda melaksanakan pembelajaran materi tentang qurban dan aqiqah maka sekarang jawablah soal-soal berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan antara qurban dengan aqiqah?
2. Apa hukum melaksanakan qurban dan aqiqah?
3. Jelaskan syarat yang terkait dengan hewan qurban!
4. Hikmah apa yang dapat dipetik dari syariat aqiqah?



3. Merdeka, maka tidak wajib haji bagi budak karena haji memerlukan waktu yang cukup lama, lagi pula disyaratkan “mampu” baik berupa bekal dan perjalanan selain juga akan mengabaikan hak-hak tuannya.
4. Mampu secara fisik, harta dan keamanan yang memungkinkan seseorang mampu untuk sampai ke kota Makkah.

Terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam memahami kata “*istita’ah*” atau mampu. Menurut Hanafiyah mampu itu ada tiga macam, yaitu fisik, harta dan keamanan. Yang dimaksud mampu fisik adalah sehat badan maka tidak wajib bagi orang sakit. Mampu harta artinya memiliki bekal selama perjalanan sejak pergi sampai pulang. Mampu keamanan, artinya perjalanan yang dilalui itu dipastikan aman. Khusus wanita ditambahkan keamanan lain untuk dirinya yaitu adanya mahram yang baligh dan berakal. Sedangkan bagi Malikiyah “mampu” itu artinya kemungkinan sampainya seseorang ke kota Makkah sebagaimana biasanya baik dengan berjalan kaki atau berkendara dalam perjalanan perangnya bukan pulangnya. Menurut Malikiyah “mampu” itu ada tiga macam, pertama kuat badan, kedua adanya bekal yang mencukupi dan ketiga sempurna perjalanan artinya jalan yang ditempuh kendaraan darat dan laut dipastikan aman. Menurut Syafiiyah “mampu” itu ada tujuh macam: kuat badan, kuat harta, adanya kendaraan, ada air dan bekal, keamanan, adanya *mahram* bagi perempuan, dan terakhir memungkinkan perjalanan dilihat dari segi waktu. Sedangkan menurut Hanabilah “mampu” adalah mampu bekal dan perjalanan. Bekal menurut Hanabilah sama dengan bekal yang dimaksud oleh Syafiiyah yaitu sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan pergi dan pulang baik berupa makan, minuman dan pakaian. Untuk kendaraan disyaratkan yang memenuhi kelayakan.

Kondisi bekal yang dimiliki oleh orang berhaji juga harus mencukupi untuk nafkah orang yang wajib dinafkahi seperti anak, isteri dan pembantu. Khusus untuk wanita selain harus disertai mahram dia juga tidak dalam keadaan iddah, baik iddah karena diceraikan atau ditinggal mati suaminya karena dalam kondisi iddah perempuan dilarang untuk keluar rumah.

b. Rukun haji

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan rukun haji seperti dijelaskan berikut ini:

1. Menurut ulama Hanafiyah, rukun haji hanya dua yaitu wukuf di Arafah dan thawaf ifadah. Sedangkan rukun umrah hanya tawaf di ka’bah
2. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, rukun haji itu ada empat yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadah dan sa’i
3. Menurut ulama Syafiiyah, rukun haji ada lima yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa’i, dan mencukur rambut atau menggunting rambut di kepala

Jika dicermati dari perbedaan di atas maka rukun haji yang disepakati oleh semua mazhab hanya ada dua yaitu wukuf dan tawaf. Sedangkan yang tidak disepakati adalah ihram, sai dan mencukur rambut. Jika digabungkan maka rumusan haji menurut mazhab Syafi’ilah yang dapat menghimpun rukun-rukun haji dari semua mazhab yang meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa’i, dan mencukur rambut atau menggunting rambut kepala.

c. Wajib Haji

Yang dimaksud dengan wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji dan apabila ditinggalkan maka dikenakan wajib dam. Terdapat perbedaan diantara ulama mazhab tentang batasan wajib haji.

1. Mazhab Hanafi menetapkan lima yaitu: sai, wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah, bercukur, dan thawaf wada’
2. Mazhab Maliki menetapkan lima yaitu: thawaf qudum, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, bercukur, dan mabit di mina.
3. Mazhab Sayfi’i menetapkan lima yaitu: ihram di miqat, melontar jumrah, mabit di muzdalifah, mabit di Mina, dan thawaf wada’.

- Mazhab Hambali menetapkan enam yaitu: ihram di miqat, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumrah dan bercukur.

d. Sunnah-sunnah Haji

- Mandi, memakai wewangian untuk ihram dan dua rakaat untuk salat ihram
- Mengucapkan talbiyah setelah ihram dan salat
- Tawaf qudum (menurut jumhur) tapi menurut Malikiyah wajib
- Dua rakaat salat tawaf (menurut Syafiiyah dan Hanabilah)
- Mabit di Mina pada malam hari Arafah
- Mabit di Muzdalifah malam hari nahar
- Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik
- Khutbah haji

e. Larangan Haji

Perkara yang harus ditingalkan oleh jamaah haji dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- Khusus laki-laki: memakai pakaian berjahit, menutup kepala (boleh menutup kepala dalam keadaan mendesak) tapi wajib bayar dam
- Khusus perempuan: menutup muka, dan dua tapak tangan (boleh dibuka dalam keadaan mendesak) tapi wajib bayar fidyah
- Untuk laki dan perempuan: memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian termasuk minyak rambut, menghilangkan rambut kepala dan rambut-rambut yang lainnya, memotong kuku, mengadakan nikah (menikah, menikahkan atau menjadi wakil dalam akad nikah), bersetubuh dan pendahuluannya dan berburu serta membunuh binatang.

3. Macam-macam Haji

Dilihat dari cara pelaksanaannya haji terbagi menjadi tiga:

- Haji *ifrad* artinya sendiri, maksudnya melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak sekaligus. Yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat ia niat melakukan ibadah haji dengan lafadz *labbaika bi al-hajji* (aku datang memenuhi panggilan-Mu menunaikan haji), jika selesai haji baru ia berniat untuk umrah kalau ingin melaksanakan pada tahun itu juga. Cara pertama ini dipandang lebih utama dibanding dua bentuk berikutnya.
- Haji *tamattu'* artinya bersenang-senang, maksudnya mendahulukan umrah dari haji. Caranya ihram untuk umrah dengan niat *labbaika bi umrah* lalu melakukan rukun umrah lainnya (tawaf, sai dan memotong rambut) kemudian menanggalkan pakaian ihram sampai waktu haji datang barulah ia memulai melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Dimulai dari ihram sampai seterusnya. Untuk bentuk kedua ini dikenakan denda.
- Haji *qiran* artinya menyertai atau menggabungkan, maksudnya haji dan umrah niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafadz *labbaika bi al-hajji wa umrah* (aku datang menunaikan panggilan-Mu untuk haji dan umrah). Sejak ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umrah selesai ditunaikan atau sampai tahallul setelah jumrah aqabah ia tetap dalam berpakaian ihram. Untuk bentuk ketiga ini juga dikenakan denda

4. Manfaat haji

Haji memiliki manfaat untuk kehidupan pribadi dan masyarakat. Secara pribadi haji dapat bermanfaat:

- Menghapus dosa-dosa kecil (menurut sebagian ulama Hanafi dapat juga menghapus dosa besar tapi Ijma ulama berbeda, dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat), membersihkan jiwa dari aib maksiat.
- Menguatkan keimanan dan mengingatkan seseorang akan masa lalu Islam, perjuangan rasulullah dan para salaf saleh
- Melatih manusia untuk berlaku sabar dan mensyukuri nikmat harta dan kesehatan.

- d. **Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.** Misalnya dengan si wali mengatakan, “*Zawwajtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “*Ankahtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).
- e. **Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (“Aku terima pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.”**

Syarat Nikah

- a. Kejelasan kedua mempelai, siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan engkau dengan putriku”, sementara ia memiliki beberapa orang putri.
- b. Keridhaan dari masing-masing pihak.

Persiapan Pra-Nikah: Khitbah (Pinangan)

Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang melamar (*al-khāthib*) diperkenankan melihat wanita yang dilamar (*al-makthubah*). Dalilnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً :
أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)

Nabi Saw pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia." (HR. Muslim).

Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang dilamar boleh dilihat wajah dan telapak tangannya. Wajah dan tangan sudah cukup untuk menilai wanita tersebut. Dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikannya, dan dengan melihat telapak tangan dapat dilihat subur dan sehat tidaknya anggota badan lainnya.

Perempuan yang boleh dipinang tidak dalam pinangan orang lain sebagaimana hadits Rasul Saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَم (لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ
أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قِبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ

Juga pada saat dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang pernikahan, dan perempuan tersebut tidak dalam masa 'iddah karena talak raj'i.

Kafā'ah

Kafā'ah atau kufu` berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud dengan kufu` dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafā'ah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. Meskipun kufu` dapat dijadikan barometer, namun nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, yang membedakan ialah derajat ketakwaannya. Bahkan Rasulullah Saw bersabda:

إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في كان فيه ...

Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah dia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di muka bumi. (HR. Tirmidzi)

- **Nikah Al-Istibdhah.** Seorang membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya. Yaitu orang tertentu dari kalangan pemimpin atau pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya agar sanga isteri melahirkan anak seperti nya.
- **Nikah Mut'ah.** Artinya adalah menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian otomatis terjadi.
- **Nikah Syighar.** Yaitu wali menikahkan gadis yang diurus nya kepada seorang pria dengan syarat pria tersebut menikahkannya pula dengan gadis yang diurus nya. Nafi berkata, "Syighar adalah seorang laki-laki menikahi puteri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar.

Selain itu, ada pula **pernikahan yang diharamkan** karena beberapa sebab:

- a. Nikah dalam masa 'iddah dan menikahi wanita kafir selain kitabiyah (wanita Yahudi dan Nasrani) (QS. Al-Baqarah: 221).
- b. Menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab dan mushahahar (hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan). (QS. al-Nisa': 23).
- c. Diharamkan menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena sepersusuan.
- d. Tidak boleh menghimpun antara wanita dengan bibinya. Nabi Saw bersabda, "*Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak bapak) dan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu).*" (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad).
- e. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak ketiga, dan tidak dihalalkan untuk nya hingga menikah dengan suami selain nya dengan pernikahan yang wajar. (QS. Al-Baqarah: 230).
- f. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah.
- g. Tidak boleh menikahi wanita yang masih bersuami, dan tidak boleh menikahi wanita pezina. (QS. An-Nur: 3)
- h. Diharamkan menikah lebih dari empat wanita.

Hikmah Nikah

- Pernikahan merupakan suasana *shalihah* yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan *tuma'ninah*, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. QS. al-Rum [30] ayat 21.
- Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong menolong antar manusia. QS. al-Nisa' ayat 1.
- Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.
- Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.

Thalaq (Perceraian)

Thalaq berasal dari kata *ithlaq* yang artinya secara bahasa adalah perpisahan, melepaskan, lepas atau bebas. Menurut istilah agama, thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putus nya hubungan perkawinan (suami-istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan thalak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas (sharih) ataupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).

Dalam Qur'an Surat al-Baqarah (2) : 229 dijelaskan bahwa talak harus dilakukan secara bertahap. Talak satu, talak dua dan baru dijatuhkan talak tiga jika proses rujuk pada talak satu dan talak dua tidak berhasil.



Macam-macam Thalaq:

Pertama, ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan isteri, talak terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*.

Talak Raj'i, ialah talak yang dapat dirujuk, yaitu talak ke I dan talak ke II, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229, yang artinya; "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali." Talak *Bâin*, ialah talak yang tidak dapat dirujuk, yaitu talak ke III, talak *Khulu'* (talak tebus, permintaan cerai dari pihak isteri dengan tebusan / *iwadl* dari pihak istri kepada pihak suami), dan talak atas putusan pengadilan.

Talak Bâin terbagi dua: 1. Talak *Bain Sughra*, ialah talak yang tidak dapat rujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan isteri, yaitu talak qabla dukhul, talak *khulu'* dan talak atas putusan pengadilan. 2. Talak *Bain Kubra*, ialah talak yang tidak dapat rujuk, karena talak sudah dijatuhkan sebanyak tiga kali, dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas isteri tersebut harus pernah kawin dahulu kepada pria lain dan sudah dicerai pula, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230, yang artinya; "Jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain."

Macam Thalaq yang Kedua, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya:

- a. **Talak Sunni / Talak Jawaz** yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah yang meliputi dua syarat, ialah: isteri yang ditalak sudah pernah digauli (disetubuhi); isteri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan.
- b. **Talak Bid'i / Talak haram** yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunah / tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak sunni. Talak ini diharamkan lantaran merugikan pihak isteri sebab 'iddahnya lebih lama dari iddah talak sunni. Macam talak yang masuk dalam kategori talak ini adalah:
 - a). Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat sedang haid dan begitupun ketika nifas (40 hari setelah melahirkan);
 - b). Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentan waktu suci tersebut.
 - c. Talak bukan Suni dan talak bukan Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal berikut:
 - a) Isteri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi);
 - b) Isteri yang ditalak itu belum pernah haid / telah lepas dari masa haid (monopouse);
 - c) Isteri yang ditalak dalam keadaan hamil.

Selain itu, ada pula istilah **Thalaq Al-Battah**, yaitu talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw dan masa Abu Bakar Shiddiq r.a, serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khathab ra., akan tetapi pada masa itu Thalaq Al Battah dihukum hanya jatuh satu. Baru pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khathab r.a. **Thalaq al-Battah dihukum jatuh tiga**. Penetapan jatuh tiga terhadap Thalaq al-Battah merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khathab ra. yang dilakukan untuk menjawab atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki.

Hukum Thalaq

Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara jika diucapkan serius jadi benar dan jika diucapkan main-mainpun juga jadi benar; nikah, talak dan rujuk". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hasan menurut At-Tirmidzi dan shahih menurut Al-Hakim). Dalam hadis lainnya Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*.

Masa 'Iddah dan Ruju'

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Masa 'iddah berlaku bagi isteri yang putus perkawinannya kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Waktu tunggu:

- 1) Karena kematian: 130 hari jika tidak hamil. Jika hamil sampai melahirkan.
- 2) Karena perceraian:
 - 3 kali suci, minimal 90 hari (bagi yang masih haid)
 - 90 hari bagi yang tidak haid (QS. al-Thalaq: 4)
 - Hamil sampai melahirkan (QS. al-Tbalaq: 4)
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian qabla dhukul.

Mulai masa tunggu:

Jika karena perceraian: setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika karena kematian: sejak kematian suami.

Rujuk

Berasal dan kala Arab *raj'ah* yang artinya kembali. Jadi rujuk adalah kembali hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan talak raj'i selama masih dalam masa 'iddah tanpa dengan akad nikah baru.

Syarat Rujuk:

- 1) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali *qabla al dukhul* atau talak 3x.
- 2) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan kecuali alasan zina atau khulu' (talak dengan 'iwadh baik khulu' maupun taklik talak).
- 3) Masih dalam masa 'iddah.
- 4) Ada persetujuan isteri. Rujuk tanpa persetujuan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama.

Permasalahan Nikah Kontemporer

a. Nikah Sirri

Dalam kajian fiqh nikah sirri digambarkan dengan dua keadaan:

Pertama, dilangsungkannya pernikahan suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Menurut pandangan seluruh ulama fiqh, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini **batil**. Lantaran tidak memenuhi syarat pernikahan, seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Ini bahkan termasuk nikah *sifāh* (perzinaan) atau *ittikhād-zul-akhdān* (menjadikan wanita atau lelaki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). “... *Bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya ...*” [al-Nisa'/4:25].

Kedua, pernikahan terlaksana dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab, qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi, mereka (suami, istri, wali dan saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan ini dari telinga masyarakat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini *sah*, tetapi *hukumnya dilarang*. Sebab, suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri dua orang atau lebih, maka sudah bukan rahasia lagi. Dilarang, karena adanya perintah Rasul Saw untuk walimah dan menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan dan tuduhan tidak benar. Sedangkan kalangan ulama Malikiyah menilai pernikahan yang seperti ini batil. Karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sah pernikahan.



Nikah sirri yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia yaitu pernikahan yang sah namun tidak didaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini definisi yang tepat adalah nikah sirri sama dengan **zawaj 'urfi** yang juga berarti nikah dibawah tangan. Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Di masa modern ini nikah 'urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang terjadi di KUA karena memiliki kepastian hukum yang tentunya sulit untuk digugat.

Diantara efek pernikahan sirri bagi anak dan istri: Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, penyelesaian kasus gugatan nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat dan tidak bisa di pengadilan agama, apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki status (seperti akta kelahiran) sebab untuk memperoleh akta kelahiran disyaratkan adanya akta nikah, anak dan istri terancam tidak mendapat hak waris karena tidak ada bukti administrasi pernikahan.

Kesimpulannya: Nikah sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh, dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya), yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah dan *tuhmah*, serta dapat mendatangkan madarat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Nikah sirri juga tidak sah menurut hukum positif, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar, dan tidak pula diadakan pencatatan nikahnya oleh KUA.

Pernikahan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama, ada 2 kategori.

- 1) Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Hukumnya dilarang (**haram**). Dalilnya QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10.
- 2) Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam. Kategori ini ada 2 macam:
 - a) Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah agama asli Nasrani dan Yahudi (agama samawi), karena berasal dari sumber yang sama dengan Islam. Walau ada *ikhtilaf*, jumhur ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini sesuai dengan QS. al-Maidah: 5
 - b) Lelaki Muslim dengan perempuan bukan Ahli Kitab. Yang dimaksud dengan musyrik adalah penyembah berhala, api, dan sebagainya. Hukumnya haram, sesuai ayat QS. al-Baqarah: 221. Agama Hindu, Budha, Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi agama ardhhi (bumi).

Poligami dan Poliandri

Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris *polygamy*, dalam bahasa Arab disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Sedangkan istilah poliandri juga berasal dari Inggris. Dalam bahasa Arab disebut تعدد الأزواج atau تعدد البيوعول yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Ayat yang berbicara tentang poligami dalam QS. al-Nisa' [4]: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْلُونَ

Perkataan **adil** yang bergaris bawah dalam ayat ini adalah adil dalam bentuk zahir, seperti adil dalam memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bukan adil dalam bentuk bathiniyah (kecondongan batin), karena bagaimanapun hati manusia tidak mampu sepenuhnya adil (QS. Al-Nisa': 129). Tapi suami dilarang membiarkan isterinya terkatung-katung (فتدروها كالمعلقة), tidak digauli dan tidak ditalak.

Poligami menurut Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, hukumnya *mubah*. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya

Mengenai **hak isterimenerima mahar**, disebutkan dalam **KHI Pasal 32**: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Demikian pula hak isteri dalam **mengelola harta**, disebutkan dalam **KHI Pasal 86**:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri kerana perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam **KHI Pasal 87**:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Mengenai **hak pemeliharaan anak**, **KHI Pasal 105** menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah **hak ibunya**.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemelihara ditanggung oleh ayahnya.

Mengenai **hak isteri akibat putusnya perkawinan**, dijelaskan dalam **KHI Pasal 149**:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Begitu pula dalam **KHI Pasal 152** disebutkan: Bekas isteri berhak mendapatkan **nafkah iddah** dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Hak dan Kedudukan Wanita Dalam UU Perlindungan Anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak Indonesia, termasuk anak wanita, memiliki beberapa hak yang dilindungi undang-undang. Dalam **Pasal 2 UU Perlindungan Anak (UUPA)** disebutkan asas dan tujuan, bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

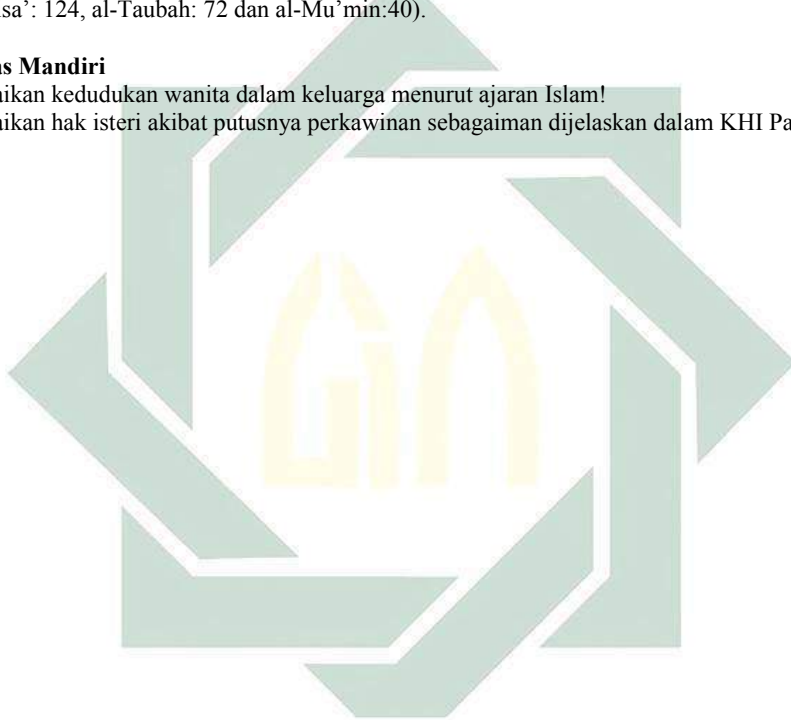
Adapun hak anak menurut UU Perlindungan Anak (UUPA), setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Ringkasan Materi Pokok

1. Wanita adalah pasangan pria, hubungan mereka adalah kemitraan, kebersamaan dan saling ketergantungan (QS. al-Nisa': 1, al-Taubah: 71, al-Rum: 21, al-Hujurat:13).
2. Kedudukan dan peran wanita dalam keluarga menurut Islam mencakup: Wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu, wanita sebagai anak, wanita sebagai anggota masyarakat.
3. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam pandangan Allah (QS. al-Ahzab: 35, Muhammad: 19). Persamaan ini jelas dalam kesempatan beriman, beramal saleh atau beribadah (shalat, zakat, berpuasa, berhaji) dan sebagainya.
4. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya (QS. al-Nisa': 4 dan 32).
5. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan: "Mencari/menuntut ilmu pengetahuan adalah kewajiban muslim (pria dan wanita)." (HR. Ibnu Majah).
6. Kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria untuk memperoleh pahala (kebaikan bagi dirinya sendiri), karena melakukan amal saleh dan beribadah di dunia (QS. Ali 'Imran: 195, al-Nisa': 124, al-Taubah: 72 dan al-Mu'min:40).

Tugas Mandiri

1. Uraikan kedudukan wanita dalam keluarga menurut ajaran Islam!
2. Uraikan hak isteri akibat putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 149



pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberi kemudahan untuk proses ini dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia sekolah, jenjang kedua dan ketiga dimulai ketika seseorang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam sekolah dasar.

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Setiap kegiatan belajar memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur penggerak untuk pengembangan kemampuan lain.

2. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan

4) Mengkomunikasikan hasil

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.

4. Model-Model Pembelajaran

Dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Poses, kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dalam implementasinya, guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, antara lain *Discovery Learning*, *Project Based Learning*, dan *Problem Based Learning*.

a. *Discovery Learning*

Model pembelajaran *Discovery Learning* mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Penemuan konsep terjadi bila konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dengan penggunaan model pembelajaran *discovery learning* siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: "*Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter*. Hal tersebut terjadi bila siswa terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. *Discovery* dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan *inferi*. Proses tersebut disebut *cognitive process* sedangkan *discovery* itu sendiri adalah *the mental process of assimilating concepts and principles in the mind* (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219).

Dengan mengaplikasikan *Discovery Learning* secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan *Discovery Learning*, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Merubah modus

generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

(2) Memverifikasi data (*Verrification*)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil *data processing* (Syah, 2004: 244). *Verification* menurut Bruner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan tafsiran terhadap data, kemudian dikaitkan dengan hipotesis, maka akan terjawab apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak.

(3) Menarik kesimpulan (*Generalisation*)

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004: 244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

Hubungan antara sintak model pembelajaran *discovery learning* dengan langkah pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini.

Sintaks <i>project based learning</i>	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
<i>Essential question</i>	Mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (masalah makanan yang halal dan baik)	Mengidentifikasi masalah untuk memperoleh masalah yang pokok sebagai landasan untuk melakukan penelitian sosial dan kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah			
<i>Designing Project Plan</i>			Menyusun rancangan penelitian sosial. Menyusun instrumen penelitian		
<i>Creating Schedule</i>			Membuat jadwal penelitian (rencana,		

aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

- e) Menguji hasil
 Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
- f) Mengevaluasi kegiatan/pengalaman
 Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (*new inquiry*) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.

Hubungan antara sintak model pembelajaran *project based learning* dengan langkah kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini.

Sintaks <i>project based learning</i>	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
<i>Essential question</i>	Mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat persoalan keagamaan.	Mengidentifikasi masalah untuk memperoleh masalah yang pokok sebagai landasan untuk melakukan penelitian sosial keagamaan kemudian dikembangkan menjadi rumusan masalah			
<i>Designing Project Plan</i>			Menyusun rancangan penelitian sosial. Menyusun instrumen penelitian		
<i>Creating Schedule</i>			Membuat jadwal penelitian (rencana, pelaksanaan, dan pelaporan)		
<i>Monitor the progress</i>			Pengumpulan data penelitian Guru memonitor aktivitas peserta		

Sintaks <i>project based learning</i>	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
			didik selama proses penelitian		
<i>Assess the outcome</i>				Analisis data penelitian Guru melakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peserta didik	
<i>Evaluate the experiment</i>				Membuat kesimpulan dan laporan hasil penelitian tentang fenomena sosial keagamaan dalam PAI di sekolah.	Mempresentasikan hasil penelitian tentang fenomena sosial keagamaan. Melakukan refleksi bersama guru dg peserta didik

2) Persyaratan pendukung dan Manfaatnya

Pemilihan model pembelajaran *project based learning* memerlukan dukungan persyaratan untuk mereduksi kelemahan yang sering terjadi, antara lain:

- Siswa terbiasa dengan aktivitas pemecahan masalah, sehingga proyek tidak memakan waktu terlalu lama.
- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk peralatan belajar.
- Pengaturan waktu dan jadwal kegiatan yang terkontrol.
- Perlunya kejelasan tugas dan hasil yang diharapkan dari kegiatan project

3) Manfaat pemilihan model pembelajaran *project based learning*, antara lain:

- Meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan siswa melakukan pekerjaan penting, artinya mereka perlu dihargai.
- Mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis.
- Mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumberdaya.
- Memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran, praktik, dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.

5. Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya adalah memamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik. Contohnya hasil karya siswa dengan tulisan indah (kaligrafi dengan kertas biasa atau kanfas)

6. Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

Hubungan antara sintak model pembelajaran *problem based learning* dengan langkah kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik diilustrasikan pada contoh berikut ini

Sintaks <i>project based learning</i>	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data/informasi	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
Mengorientasi peserta didik pada masalah	Melihat video atau gambar atau berita beberapa contoh kehidupan para fakir miskin dalam kesehariannya.		Mencari informasi tentang kondisi fakir miskin secara rinci dan perilaku yang timbul akibat kemiskinan dengan beberapa pilihan mencari literatur tentang masalah pokok(apa, bagaimana, dan mengapa)		Mempresentasikan/menampilkan hasil analisis terhadap tayangan video/gambar/berita beberapa contoh keadaan yang menggambarkan perilaku fakir miskin.
Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran		Diskusi kelompok mengenai kondisi fakir miskin yang berada pada lingkungan sekitar peserta didik. Diskusi Kelas mengenai skala prioritas pengelolaan zakat, Konsep zakat			
Membimbing Penyelidikan Mandiri			Mencari informasi tentang data fakir miskin diwilayah/daerah masing-masing. Menafsirkan dan memahami konsep Alqur'an tentang kewajiban zakat.		
Mengembangkan dan					

Sintaks <i>project based learning</i>	Langkah/Kegiatan Pembelajaran				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan data/informasi	Mengasosiasi	Mengomunikasikan
Menyajikan Karya					
Analisis dan Evaluasi				menganalisis hubungan antara konsep al-Quran tentang zakat akibat membiarkan fakir miskin dan berpikir rasional dalam mengelola zakat dan memecahkan masalah pokok upaya menanggulangi fakir miskin (solusi yang ditawarkan).	

d. Pembelajaran kontekstual

Pembelajaran Kontekstual atau *Contextual Teaching Learning* (CTL) adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi konstruktivistik bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya

Dalam pendekatan kontekstual, ada delapan komponen yang harus ditempuh, yaitu:

- 1) membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna,
- 2) melakukan pekerjaan yang berarti,
- 3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri,
- 4) bekerja sama,
- 5) berpikir kritis dan kreatif,
- 6) membantu individu untuk tumbuh dan berkembang,
- 7) mencapai standar yang tinggi, dan
- 8) menggunakan penilaian otentik.

Pendekatan kontekstual dapat diterapkan dalam mata pelajaran apa saja, tidak terkecuali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Menurut konsep CTL, "Belajar akan lebih bermakna jika anak didik 'mengalami' apa yang dipelajarinya, bukan sekadar 'mengetahui' apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 'mengingat' jangka pendek,

fasilitator dan **pembimbing** siswa untuk belajar. Pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran ini sering juga dinamakan pembelajaran *heuristic*, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang berarti “*saya menemukan*”.

Joyce (Gulo, 2005) mengemukakan kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi siswa, yaitu: (1) aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas-terbuka dan permisif yang mengundang siswa berdiskusi; (2) berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya; dan (3) penggunaan fakta sebagai evidensi dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta, sebagaimana lazimnya dalam pengujian hipotesis.

1) Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri memiliki beberapa ciri, di antaranya: *Pertama*, pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (*self belief*). Dengan demikian, pada pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih diposisikan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Guru dalam mengembangkan sikap inkuiri di kelas mempunyai peranan sebagai konselor, konsultan, teman yang kritis dan fasilitator. Ia harus dapat membimbing dan merefleksikan pengalaman kelompok, serta memberi kemudahan bagi kerja kelompok.

Ketiga, tujuan dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran.

2) Prinsip-Prinsip Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Berorientasi pada Pengembangan Intelektual. Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar.
- b) Prinsip Interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.



- a) Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.
- b) Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.
- c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.
- d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan.

7. Langkah Pemilihan Model Pembelajaran

Pemilihan model pembelajaran (*discovery learning*, *project based learning*, atau *problem based learning*) sebagai pelaksanaan pendekatan saintifik pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus. Pemilihan model pembelajaran mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Karakteristik pengetahuan yang dikembangkan menurut kategori faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pada pengetahuan faktual dan konseptual dapat dipilih *discovery learning*, sedangkan pada pengetahuan prosedural dapat dipilih *project based learning* dan *problem based learning*.
- 2) Karakteristik keterampilan yang tertuang pada rumusan kompetensi dasar dari KI-4. Pada keterampilan abstrak dapat dipilih *discovery learning* dan *problem based learning*, sedangkan pada keterampilan konkrit dapat dipilih *project based learning*.
- 3) Pemilihan ketiga model tersebut mempertimbangkan sikap yang dikembangkan, baik sikap religius (KI-1) maupun sikap social (KI-2)

Berikut contoh matrik pemilihan model yang dapat digunakan sesuai dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan

Dimensi Pengetahuan	Dimensi Keterampilan	
	Abstrak	Konkrit
Faktual	<i>Discovery Learning</i>	<i>Discovery Learning</i>
Konseptual	<i>Discovery Learning</i>	<i>Discovery Learning</i>
Prosedural	<i>Discovery Learning</i> <i>Problem Based Learning</i>	<i>Projec Based Larning</i> <i>Problem Based Learning</i>
Metakognitif	<i>Discovery Learning</i> <i>Projec Based Larning</i> <i>Problem Based Learning</i>	<i>Discovery Learning</i> <i>Projec Based Larning</i> <i>Problem Based Learning</i>

Berikut ini contoh pilihan Model Pembelajaran Sesuai dengan Karakteristik Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kompetensi Dasar	Discovery Learning	Project Based Learning	Problem Based Learning	Kelas
Memahami tentang pengelolaan wakaf dengan dalil surat Al Imran ayat 92 dan hadis riwayat Abu Dawud.	√			X
Memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja QS. An Nisa' ayat 59, Al Maidah ayat 48 dan QS at-Taubah ayat 105		√		XI
Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al Isra' ayat 32 dan QS an Nur ayat 2 serta hadis yang terkait			√	X
dan seterusnya				

MENATA KELAS PEMBELAJARAN AKTIF YANG DINAMIS DAN VARIATIF

Peserta didik (murid/siswa/santri) dalam suatu kelas biasanya memiliki kemampuan beragam, ada yang memiliki tingkat kepandaian yang tinggi, sedang, dan kurang. Menurut pandangan psikologi pendidikan, sebenarnya tidak ada peserta didik yang pandai atau bodoh, yang lebih tepat adalah peserta didik dengan kemampuan lambat atau cepat dalam belajar. Dalam materi yang sama, bagi peserta didik satu memerlukan dua kali pertemuan untuk memahami isinya, namun bagi peserta didik lain perlu empat kali pertemuan atau lebih untuk dapat menyerapnya.

Karena itu, guru perlu mengatur kapan peserta didik bekerja secara perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal. Jika harus dibentuk kelompok, kapan peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuannya sehingga ia dapat berkonsentrasi membantu peserta didik yang kurang, dan kapan peserta didik dikelompokkan secara campuran berbagai kemampuan sehingga terjadi tutor sebaya (*peer teaching*).

Dalam kerangka mewujudkan desain belajar siswa maka pengaturan ruang kelas dan siswa (*setting kelas*) merupakan tahap yang penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena itu, kursi, meja dan ruang belajar perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, yakni memungkinkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mobilitas:** peserta didik ke bagian lain dalam kelas.
2. **Akseibilitas:** peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia.
3. **Komunikasi:** peserta didik mudah berkomunikasi secara intensif kepada seluruh teman di kelas.
4. **Interaksi:** memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Interaksi yang tercipta berupa interaksi multi-arah.
5. **Dinamika :** kelas dinamis, dibuktikan dengan dinamika kelompok, dinamika individu, dan dinamika pembelajaran.
6. **Variasi kerja peserta didik:** memungkinkan peserta didik bekerjasama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.

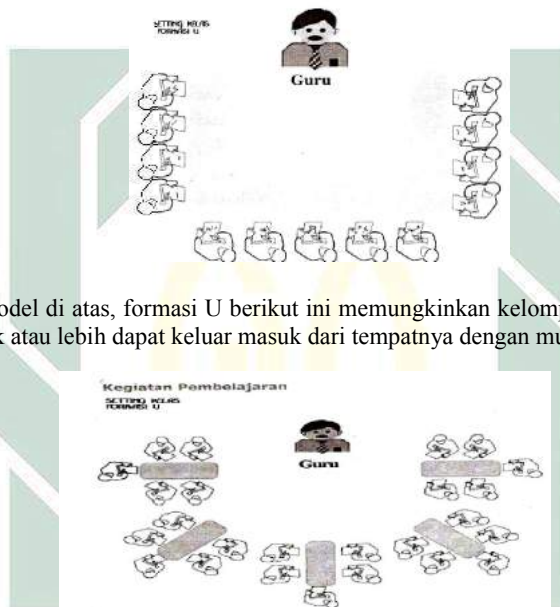
Lingkungan fisik dalam ruangan kelas dapat menjadikan belajar aktif. Tidak ada satu bentuk ruang yang kelas yang mutlak ideal, namun ada beberapa pilihan yang dapat diambil sebagai variasi. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif.

Setting atau formasi kelas berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi susunan yang permanen, namun hanya sebagai alternatif dalam penataan ruang kelas. Jika Anda memilih melakukannya, mintalah siswa untuk membantu memindahkan meja kursi. Hal itu juga membuat mereka "aktif". Tata-letak fisik kelas pada umumnya sifatnya sementara "tentatif", fleksibel dan realistis. Artinya guru dapat saja mengadakan perubahan setiap saat sesuai dengan keperluan dan kesesuaian dengan materi ajarnya. Jika meubeler (meja atau kursi) yang ada di ruang kelas dapat dengan mudah dipindah-pindah, maka sangat mungkin menggunakan beberapa formasi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan pendidik.

1. Formasi Huruf U

Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat melihat guru dan/atau melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi.

Guru dapat menyusun meja dan kursi dalam format U sebagai berikut:

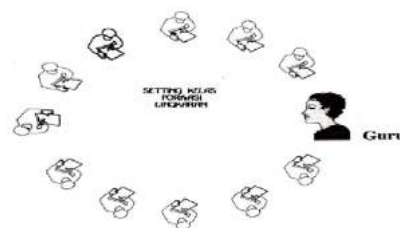


Selain model di atas, formasi U berikut ini memungkinkan kelompok kecil yang terdiri dari tiga peserta didik atau lebih dapat keluar masuk dari tempatnya dengan mudah.



2. Formasi Lingkaran.

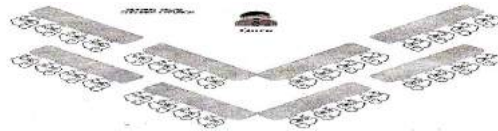
Para peserta didik duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadapan-hadapan secara langsung. Sebuah lingkaran ideal untuk diskusi kelompok penuh.



Jika guru menginginkan peserta didik memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan *peripheral*, yakni meja ditempatkan di belakang peserta didik. Guru dapat menyuruh peserta didik memutar kursi-kursinya melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok.

3. Susunan Chevron.

Sebuah susunan ruang kelas tradisional tidak memungkinkan untuk melakukan belajar aktif. Jika terdapat banyak peserta didik (tiga puluh atau lebih) dan hanya tersedia beberapa meja, barangkali guru perlu menyusun peserta didik dalam bentuk ruang kelas. Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik lain dari pada baris lurus. Dalam susunan ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah., seperti tampak pada gambar berikut:



4. Kelas Tradisional.

Jika tidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang berupa meja kursi, guru dapat mencoba mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan memungkinkan penggunaan teman belajar. Guru dapat mencoba membuat nomor genap dari baris-baris ruangan yang cukup diantara mereka sehingga pasangan-pasangan peserta didik pada baris-baris nomor ganjil dapat memutar kursi-kursi mereka melingkar dan membuat persegi panjang dengan pasangan tempat duduk persis di belakang mereka pada baris berikutnya.

Format atau setting kelas ini banyak digunakan di lembaga pendidikan manapun karena paling mudah dan sederhana. Tetapi secara psikologis, bila digunakan sepanjang masa tanpa variasi format lain akan berpengaruh terhadap gape psikologis peserta didik seperti merasa minder, takut dan tidak terbuka dengan teman, karena sesama peserta didik tidak pernah saling berhadapan (*face to face*) dan hanya melihat punggung temannya sepanjang tahun dalam belajar. Meskipun demikian tidak berarti format kelas seperti ini tidak bisa digunakan untuk pembelajaran aktif, tentu hal ini tergantung bagaimana guru menciptakan suasana belajar aktif dengan strategi yang tepat. Berikut ini tampak gambar/ formasi kelas tradisional:



Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran Aktif (SPA)

Adapun beberapa jenis strategi berbagai SPA yang dapat diintegrasikan dalam berbagai model pembelajaran adalah sebagai berikut .:

1. EVERYONE IS A TEACHER HERE (Setiap murid sebagai guru)

Langkah-langkah Penerapan:

- 1) Bagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan dalam kelas.

- 3) Pastikan bahwa masing-masing kelompok duduk pada tempat yang terpisah
- 4) Mintalah masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen sesuai dengan perspektif kelompoknya
- 5) Pertemuan kembali masing-masing kelompok dan beri kesempatan salah satu kelompok tertentu untuk memulai berdebat dengan menyampaikan argumen yang disepakati dalam kelompok
- 6) Undang anggota kelompok lain untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Demikian seterusnya
- 7) Beri klarifikasi atau kesimpulan dengan membandingkan isu-isu yang anda amati.

Catatan: penerapan strategi PCP tepat digunakan dengan kombinasi *strategy role play dan debat berantai* pada model pembelajaran problem based learning.

7. ROLE PLAY (Bermain Peran)

Langkah-langkah Penerapan:

- 1) Menetapkan topik:
 - Konflik interpersonal
 - Konflik antar golongan
 - Perbedaan pendapat/perspektif, dll
- 2) Tunjuk dua orang siswa/peserta didik maju ke depan untuk memerankan karakter tertentu: 10 -15 menit.
- 3) Mintalah keduanya untuk bertukar peran.
- 4) Hentikan role play apabila telah mencapai puncak tinggi/dirasa sudah cukup
- 5) Pada saat kedua siswa/peserta didik memerankan karakter tertentu di muka kelas, siswa/peserta didik lainnya diminta untuk mengamati dan menuliskan tanggapan mereka.
- 6) Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

Tujuan penerapan strategi ini adalah

- 1) Memberikan pengalaman kongkrit dari apa yang telah dipelajari
- 2) Mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran
- 3) Menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial
- 4) Menyiapkan/menyediakan dasar-dasar diskusi yang kongkrit
- 5) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa/peserta didik
- 6) Menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan.

Catatan: *role playing* dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI materi beriman kepada malaikat Allah. Penjelasan mengenai contoh iman kepada malaikat Allah dapat melalui role play kisah santri dan kyai. Kombinasi strateginya adalah *role playing* dengan SGD. Kegiatan ini dapat dilakukan pada sesi mengkomunikasikan pada model pembelajaran problem based learning.

8. DEBAT BERANTAI

Langkah-langkah Penerapan:

- 1) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil
- 2) Masing-masing kelompok ditunjuk koordinator untuk menulis
- 3) Mereka diberi konsep atau gagasan yang mengundang pro-kontra
- 4) Masing-masing kelompok memberikan pendapatnya dengan cara:
 - a. Koordinator mengatur posisi duduk melingkar.
 - b. Setiap anggota kelompok menyampaikan ide **setuju dengan alasannya**, bergantian anggota yang lain **tidak setuju dengan alasannya**.

- c. Pada putaran kedua, anggota yang tadi **setuju** berganti menyampaikan ide **tidak setuju disertai alasan**, sementara yang **tidak setuju** berganti menyampaikan setuju disertai alasannya, demikian hingga semua anggota selesai menyampaikan pendapat bebasnya.
- 5) Guru meminta siswa secara sukarela maju ke depan untuk menuliskan alasan yang setuju dan tidak setuju dari masing-masing kelompok tadi.
- 6) Guru menyimpulkan dan melakukan refleksi serta tindak lanjut.

Catatan: penerapan strategi debat berantai ini tepat diterapkan pada kelas MA. Kombinasi strateginya adalah debat berantai dengan model pembelajaran *Problem based learning*.

4. GALLERY WALK (Pameran berjalan)

Langkah-langkah Penerapan:

- 1) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok
- 2) Kelompok diberi kertas plano/ flip cart
- 3) Tentukan topik/tema pelajaran
- 4) Hasil kerja kelompok ditempel di dinding.
- 5) Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok lain.
- 6) Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh kelompok lain.
- 7) Koreksi bersama-sama.
- 8) Klarifikasi dan penyimpulan.

Catatan: strategi gallery walk dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI pada semua level MTs dan MA. Kombinasi strateginya adalah gallery walk, diskusi kelompok, dan turnamen. Strategi turnamen digunakan untuk memotivasi tiap kelompok agar menampilkan hasil kerja kelompok terbaiknya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan model pembelajaran project based learning pada tahap mengevaluasi project pada aktifitas mengkomunikasikan.

D. RANGKUMAN:

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk pencapaian kompetensi tersebut kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas yang menyenangkan dan menantang bermuatan nilai, etika, estetika, logika dan kinestetika, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien dan bermakna. Model pembelajaran yang ditawarkan pembelajaran dengan pendekatan scientific yakni dengan discovery based learning, project based learning, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran inquiry yang dapat dikombinasikan dengan strategi pembelajaran aktif dan penataan posisi duduk yang sesuai.

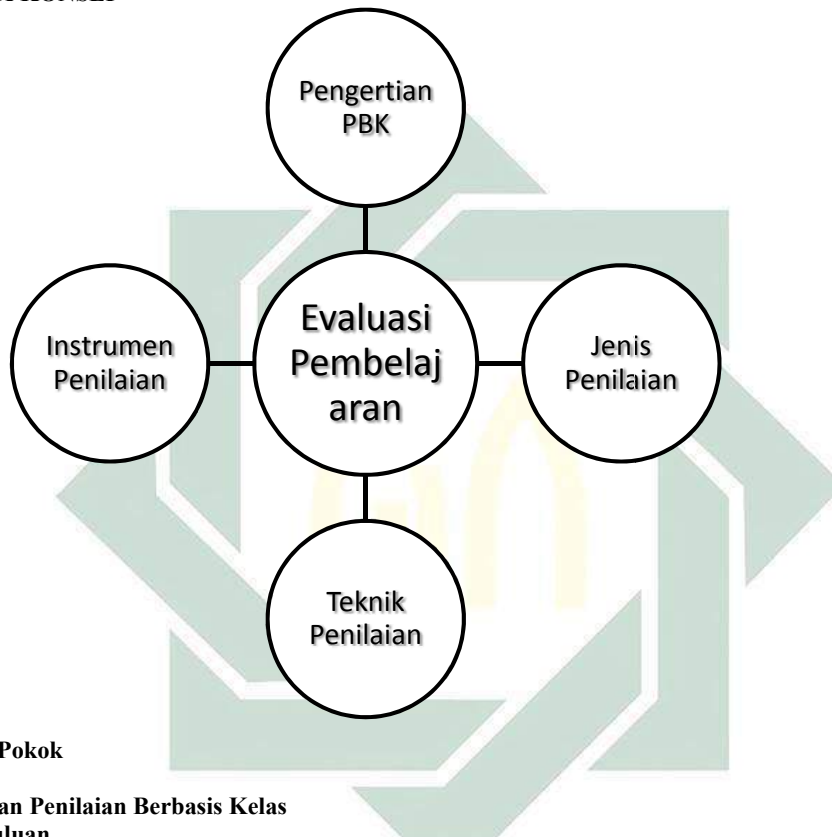
MODUL 6 EVALUASI PEMBELAJARAN

A. TUJUAN

Setelah mendiskusikan modul ini, peserta PLPG dapat

1. menjelaskan pengertian penilaian berbasis kelas (PBK) dengan baik
2. menyebutkan berbagai jenis penilaian dengan benar
3. menyebutkan berbagai teknik penilaian dengan benar
4. menyusun instrumen penilaian dengan tepat

B. PETA KONSEP



C. Materi Pokok

I. Pengertian Penilaian Berbasis Kelas Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan pendidikan modern, penilaian pembelajaran pendidikan nasional selalu mengalami penyempurnaan. Linier dengan pengembangan kurikulum nasional. Tahun 2004 pendidikan menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tahun 2006 disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada tahun 2013 disempurnakan kembali dengan Kurikulum 2013. Prinsip penilaian yang digunakan adalah berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya pencapaian kompetensi kepribadian peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri.

Kompetensi lulusan pendidikan di lingkungan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama RI dan kompetensi materi (PAI) Pendidikan Agama Islam di seluruh lembaga pendidikan adalah terbentuknya peserta didik yang *competitiveness* yang tercermin pada perilaku siswa yang

akhlakul karimah; *Akhlakul karimah* tidak hanya sekedar siswa dapat membedakan baik-buruk tetapi lebih dari pada itu, *akhlakul karimah* dapat tercermin dalam pribadi yang mandiri, jujur, disiplin, bertanggungjawab, tidak pamrih, cinta ilmu, cinta kemajuan, kritis, dan suka bekerja keras.

Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, maka secara langsung menyebabkan pula pada strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Selama ini, penilaian hasil belajar lebih diacukan pada penilaian individual yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Dalam kerangka ini, maka penilaian harus memberikan porsi yang sama dalam setiap ranah, khususnya ranah afektif. Apalagi mata pelajaran Pendidikan Agama, yang seharusnya lebih menekankan pada ranah afektif. Karena mata pelajaran pendidikan Agama, tidak sekedar memahamkan materi kepada siswa, tetapi juga harus mampu diaplikasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu menggunakan jenis dan cara yang bervariasi dalam pengumpulan informasi untuk menilai kemajuan hasil belajar siswa secara komprehensif.

Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) merupakan salah satu komponen dalam Kurikulum 2013. PPK dilakukan untuk memberikan keseimbangan pada ketiga ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan menggunakan berbagai jenis, bentuk dan model penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan. PPK ini diharapkan akan lebih bermanfaat untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai prestasi dan kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, PPK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri. PPK oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung diaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Melalui proses tersebut, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum masing-masing satuan pendidikan

Penilaian adalah salah satu komponen pokok dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang guru, untuk itu dalam PLPG seluruh peserta sebagai calon guru profesional tentunya juga harus memiliki kompetensi penguasaan terhadap penilaian.

Pengertian

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah penetapan angka dengan cara yang sistematis untuk menunjukkan keadaan individu (Allen & Yen, 1979). Menurut TGAT (1987), Penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Proses asesmen meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian belajar peserta didik. Definisi penilaian berkaitan dengan semua proses pembelajaran, seperti karakteristik peserta didik, karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi.

Menurut Griffin dan Nix (1991), pengukuran, asesmen, dan evaluasi adalah hirarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Dapat perilaku individu atau lembaga. Sifat yang hirarkis ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi melibatkan pengukuran dan asesmen.

Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Oleh karena

itu, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang diterapkan.

Untuk melihat pencapaian kompetensi pada tiga ranah secara proporsional maka pendidik harus melakukan penilaian tidak hanya pada hasil akhir, melainkan juga melihat secara terus-menerus dalam proses pembelajaran dikelas. Penilaian seperti di atas, dikenal dengan istilah Penilaian Berbasis Kelas (PBK). Merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. PBK mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan.

Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran, sehingga disebut Penilaian Berbasis Kelas. PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (*performance*), tindakan (*action*), dan tes tertulis (subyektif, obyektif, dan proyektif). Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa.

Dalam pelaksanaan PBK, peranan guru sangat penting dalam menentukan ketepatan jenis penilaian untuk menilai keberhasilan dan kegagalan siswa. Jenis penilaian yang dibuat guru harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas, agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, kompetensi profesional bagi guru merupakan persyaratan penting.

Untuk menunjang keberhasilan PBK sebagai bagian dari KBK, maka madrasah hendaknya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran yang berorientasi pada siswa untuk mencapai tamatan yang kompeten di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan acuan kurikulum dan hasil belajar dengan kegiatan:
 - a. Memantau kemajuan belajar siswa secara individual dan merencanakan perbaikannya.
 - b. Menilai dan melaporkan pencapaian hasil belajar siswa secara individual.
 - c. Melaporkan kinerja madrasah dan menunjukkan pertanggung-jawabannya kepada masyarakat.
3. Mengembangkan dan melaksanakan pendekatan penilaian madrasah seutuhnya yang didasarkan pada kriteria yang diketahui oleh siswa dan orang tua atau wali.
4. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur untuk melaporkan pada orangtua/wali tentang kemajuan belajar siswa secara individual dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dikembangkan melalui konsultasi dengan komunitas madrasah
 - b. Menyediakan informasi pencapaian hasil belajar siswa secara teratur.
 - c. Menggunakan berbagai jenis informasi termasuk laporan tentang hasil belajar (rapor) dan semua lingkup aspek pembelajaran yang menggambarkan tingkat kemajuan belajar serta prestasi siswa.

Tujuan

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) bertujuan untuk: (1) mengetahui kemajuan belajar siswa, baik sebagai individu maupun anggota kelompok/kelas setelah ia mengikuti pendidikan dan pembelajaran, (2) mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu, (3) menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi siswa, dan (4) membantu siswa untuk memilih madrasah, pekerjaan, dan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian, dan kemampuannya.

Secara lebih luas, tujuan PBK berkaitan dengan: (1) bidang pengajaran, (2) hasil belajar, (3) diagnosis dan usaha perbaikan, (4) fungsi penempatan, (5) fungsi seleksi, (6) bimbingan dan penyuluhan, (7) kurikulum, dan (8) penilaian kelembagaan.

Fungsi

Bagi siswa, PBK berfungsi untuk membantu:

2. Teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan
Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi dapat ditujukan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok. Dalam kegiatan observasi perlu disiapkan format pengamatan. Format pengamatan dapat berisi: (1) perilaku-perilaku atau kemampuan yang akan dinilai, (2) batas waktu pengamatan.
3. Teknik penilaian melalui wawancara
Teknik wawancara pada satu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes lisan yang telah diuraikan di atas. Teknik wawancara ini diperlukan pendidik untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang jelas informasinya. Teknik wawancara ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk menilai.

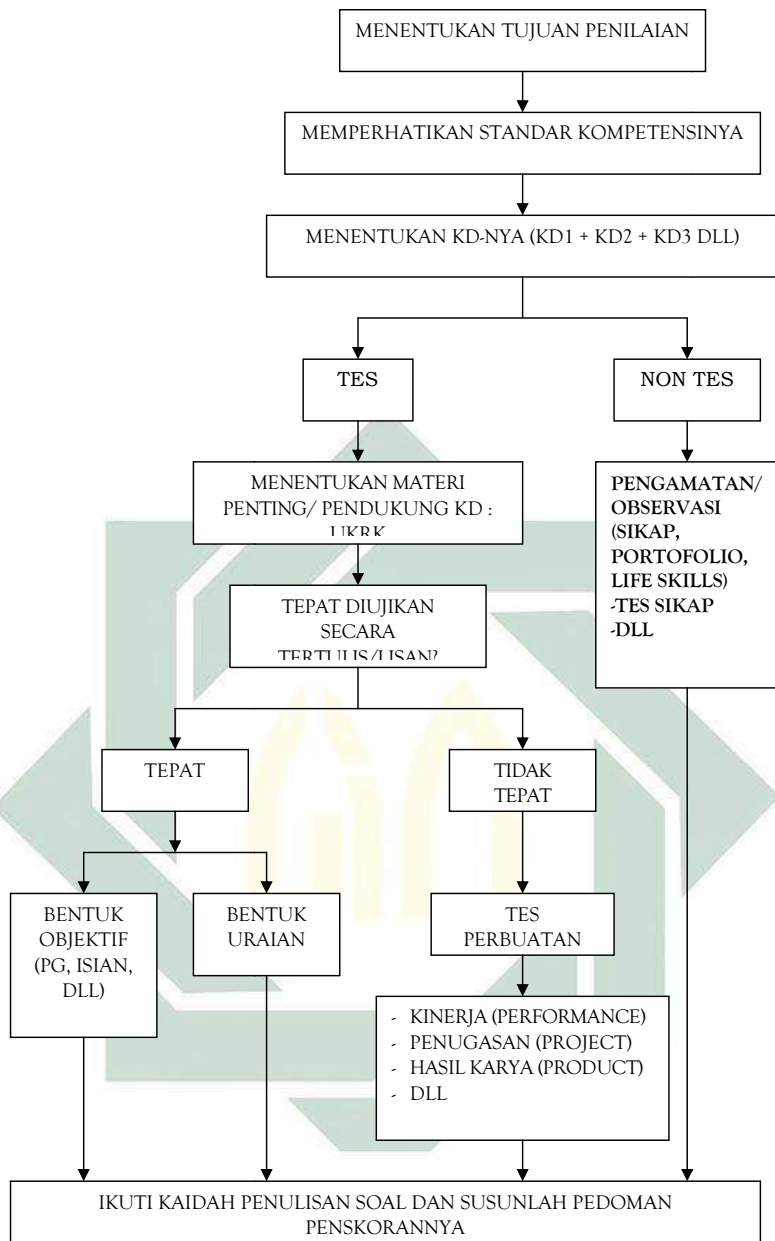
Setiap teknik penilaian harus dibuatkan instrumen penilaian yang sesuai. Tabel berikut menyajikan teknik penilaian dan bentuk instrumen.

Tabel 1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
• Tes tertulis	• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll. • Tes isian: isian singkat dan uraian
• Tes lisan	• Daftar pertanyaan
• Tes praktik (tes kinerja)	• Tes identifikasi • Tes simulasi • Tes uji petik kinerja
• Penugasan individual atau kelompok	• Pekerjaan rumah • Proyek
• Penilaian portofolio	• Lembar penilaian portofolio
• Jurnal	• Buku catatan jurnal
• Penilaian diri	• Kuesioner/lembar penilaian diri
• Penilaian antarteman	• Lembar penilaian antarteman

A. PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES

Sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, penulis soal perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetensi dasar yang hendak diukur. Adapun proses penentuannya secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Keterangan: KD = Kompetensi Dasar
 KD1 + KD2 = Gabungan antar kompetensi dasar
 UKRK = Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, Keterpakaian

Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, atau seleksi. Contoh untuk tujuan prestasi belajar, lingkup materi/kompetensi yang ditanyakan/diukur disesuaikan seperti untuk kuis/menanyakan materi yang lalu, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu/kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, laporan kerja praktik/laporan praktikum, ujian praktik.
2. Memperhatikan Kompetensi Dasar (KD). Standar kompetensi merupakan acuan/target utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar.
3. Menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non-tes atau mempergunakan keduanya. Untuk penggunaan tes diperlukan penentuan materi penting sebagai pendukung kompetensi dasar. Syaratnya adalah materi yang diujikan harus mempertimbangkan urgensi (wajib dikuasai peserta didik), kontinuitas (merupakan materi lanjutan), relevansi (bermanfaat terhadap mata pelajaran lain), dan keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari tinggi (UKRK). Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat diujikan secara tertulis/lisan. Bila jawabannya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda atau uraian. Bila jawabannya tidak tepat, maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan: kinerja (*performance*), penugasan (*project*), hasil karya (*product*), atau lainnya.
4. Menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta pedoman penskorannya. Dalam menulis soal, penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal.

Penentuan dan Penyebaran Soal

Sebelum menyusun kisi-kisi dan butir soal perlu ditentukan jumlah soal setiap kompetensi dasar dan penyebaran soalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penilaian akhir semester berikut ini.

Contoh penyebaran butir soal untuk penilaian akhir semester ganjil

No	Kompetensi Dasar	Materi	Jumlah soal tes		Jumlah soal Praktik
			PG	Uraian	
1	1.1	6	--	--
2	1.2	3	1	--
3	1.3	4	--	1
4	2.1	5	1	--
5	2.2	8	1	--
6	3.1	6	--	1
7	3.2	--	2	--
8	3.3	8	--	--
Jumlah soal			40	5	2

Penyusunan Kisi-kisi

Kisi-kisi (*test blue-print* atau *table of specification*) merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi dapat berbentuk format atau matriks seperti contoh berikut ini.

Langkah-langkah Penyusunan Butir Soal

Agar soal yang disiapkan oleh setiap guru menghasilkan bahan ulangan/ujian yang sah dan handal, maka harus dilakukan langkah-langkah berikut, yaitu: (1) menentukan tujuan tes, (2) menentukan kompetensi yang akan diujikan, (3) menentukan materi yang diujikan, (4) menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya (tes tertulis: bentuk pilihan ganda, uraian; dan tes praktik), (5) menyusun kisi-kisinya, (6) menulis butir soal, (7) memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif, (8) merakit soal menjadi perangkat tes, (9) menyusun pedoman penskorannya (10) uji coba butir soal, (11) analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba, dan (12) perbaikan soal berdasarkan hasil analisis.

1. Penyusunan Butir Soal Tes Tertulis

Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam menyiapkan bahan ulangan/ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal bentuk obyektif dan kaidah penulisan soal uraian.

Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis, sangat tergantung pada perilaku/kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur/ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian, ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain.

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan/perilaku secara objektif, sedangkan untuk soal uraian di antaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda di antaranya adalah sulit menyusun pengecohnya, sedangkan untuk soal uraian di antaranya adalah sulit menyusun pedoman penskorannya.

2. Penulisan Soal Bentuk Uraian

Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Adapun kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman penskorannya. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman penskorannya. Penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman penskorannya karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subyektivitas penskorannya.

Berdasarkan metode penskorannya, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi 2, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Bentuk uraian objektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Artinya perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomis (benar - salah atau 1 - 0). Bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskorannya sukar untuk dilakukan secara objektif. Untuk mengurangi tingkat kesubjektifan dalam pemberian skor ini, maka dalam menentukan perilaku yang diukur dibuatkan skala. Contoh misalnya perilaku yang diukur adalah "kesesuaian isi dengan tuntutan pertanyaan", maka skala yang disusun disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang akan diuji.

- dengan tugas yang lainnya, maka semakin baik tugas tersebut. Hal ini terutama dalam kondisi peserta tes diberikan tugas dalam penilaian keterampilan yang berlainan.
2. *Authenticity*, artinya apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari?
 3. *Multiple Foci*, artinya apakah tugas yang diberikan kepada peserta tes sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan?
 4. *Teachability*, artinya tugas yang diberikan berupa tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas? Jadi tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja adalah tugas-tugas yang relevan dengan yang dapat diajarkan guru di kelas.
 5. *Fairness*, artinya apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta tes. Jadi tugas-tugas tersebut harus sudah dipikirkan tidak bias untuk semua jenis kelompok.
 6. *Feasibility*, artinya apakah tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan atau kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, waktu, atau peralatannya?
 7. *Scorability*, artinya apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable

Instrumen Penilaian Kinerja (*Performance Assessment*)

Pelaksanaan penilaian unjuk kerja dilakukan dengan mengamati unjuk kerja yang dilakukan peserta didik. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen berikut:

a. Daftar Cek (Check-list)

Daftar cek merupakan seperangkat instrumen evaluasi yang mencerminkan rangkaian tindakan/perbuatan yang harus ditampilkan oleh peserta tes, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Langkah-langkah dalam menyusun daftar cek adalah:

- 1) Menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diukur.
- 2) Menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya.
- 3) Kemudian dilakukan pengamatan terhadap subyek yang dinilai untuk melihat pemunculan indikator-indikator yang dimaksud. Jika indikator tersebut muncul, maka di beri tanda cek (√) atau tulis kata "ya" pada tempat yang telah disediakan.

Sebagai contoh akan dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Untuk mengukur keterampilan itu pertama-tama dicari indikator-indikator keterampilan membaca yang akan dinilai, misalnya sebagai berikut:

- 1) Kemampuan melafalkan bacaan hukum nun mati atau tanwin (bacaan idhar, idghom bighunnah, idghom bilaghunnah, ihfa' dan iqlab)
- 2) Kemampuan melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul huruf
- 3) Kemampuan melafalkan bacaan mad (panjang-pendek)
- 4) Kemampuan melafalkan bacaan qolqolah

Peserta didik dinyatakan terampil dalam hal tersebut jika ia mampu membaca Al-Quran dengan ukuran keempat hal di atas dengan benar. Setelah diperoleh indikator-indikatornya, kemudian disusun dalam bentuk daftar cek sebagai berikut.

Beri tanda cek (√) untuk setiap penampilan yang benar dari setiap tindakan yang dilakukan peserta didik seperti yang diuraikan di bawah ini

Checklist Kemampuan Membaca Al-Quran

Nama Peserta didik :
 Kelas/Smt :
 Mata Pelajaran :

No.	Aspek Yang Dinilai	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Mampu melafalkan bacaan idhar dengan baik		
2.	Mampu melafalkan bacaan idghom bighunnah dengan baik		
3.	Mampu melafalkan bacaan idgham bilaghunnah dengan baik		
4.	Mampu melafalkan bacaan ihfa' dengan baik		
5.	Mampu melafalkan bacaan iq'lab dengan baik		
6.	Mampu melafalkan bacaan mad dengan baik		
7.	Mampu melafalkan suatu bacaan sesuai dengan makharijul hurufnya		
8.	Mampu melafalkan bacaan qolqolah dengan baik		

a. Skala Penilaian (Rating Scale)

Skala penilaian adalah alat penilaian yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi. Terstruktur maksudnya disusun dengan aturan-aturan tertentu dan secara sistematis. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Skala penilaian berisikan seperangkat pernyataan tentang karakteristik/kualitas dari sesuatu yang diukur dan secara fisik skala penilaian biasanya terdiri 2 bagian, yaitu pernyataan dan petunjuk penilaian. Petunjuk penilaian bisa berupa Angka (1, 2, 3, 4, 5), Huruf (A, B, C, D, E), atau Kategori Verbal (baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali). Langkah-langkah dalam menyusun skala penilaian adalah:

- 1) Menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diukur.
- 2) Menentukan skala yang digunakan, misalnya dengan menggunakan skala 5 dengan rentangan: 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang.
- 3) Menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya.

Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala penilaian adalah:

- 1) Jumlah butir pernyataan/pertanyaan tidak terlalu banyak
- 2) Angka/huruf untuk seperangkat rating scale tertentu harus mempunyai arti tetap
- 3) Jumlah kategori angka yang digunakan supaya diusahakan cukup bermakna dan dapat dibedakan secara jelas
- 4) Setiap pernyataan/pertanyaan hendaknya hanya mengukur satu karakteristik/satu komponen
- 5) Bila rating scale akan mengukur suatu prosedur, maka hendaklah pernyataan/ pertanyaan disusun secara urut

Contoh: Untuk mengukur keterampilan peserta didik membaca Al-Quran dapat disusun skala penilaian sebagai berikut:

Langkah pertama, kita mengidentifikasi indikator kemampuan membaca Al-Quran yang akan kita ukur, misalnya:

Penilaian portofolio dapat terfokus pada proses belajar mengajar serta dapat memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan siswa. Portofolio dapat digambarkan sebagai perkembangan berkelanjutan siswa untuk menunjukkan perubahan diri siswa sejak awal sampai akhir dalam suatu periode tertentu.

Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Beberapa tujuan portofolio diantaranya adalah:

- a. Menghargai perkembangan yang dialami siswa;
- b. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung;
- c. Memberi perhatian pada hasil kerja siswa yang terbaik;
- d. Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran;
- e. Bertukar informasi dengan orang tua dan guru lain;
- f. Membina pertumbuhan konsep diri positif pada siswa;
- g. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri.

Prinsip portofolio yang perlu diperhatikan dan dijadi-dikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah antara lain;

- a. Saling percaya antara guru dan siswa;
- b. Kerahasiaan bersama antara guru dan siswa;
- c. Milik bersama antara guru dan siswa;
- d. Kepuasan;
- e. Kesesuaian;
- f. Penilaian proses dan hasil;

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merancang penilaian portofolio adalah seperti berikut

- 1) Menentukan tujuan apakah akan memantau proses atau mengevaluasi hasil akhir
- 2) Isi portofolio harus sesuai dengan tujuan yang akan dinilai.
- 3) Guru harus menentukan (seleksi) terhadap hasil kerja siswa, siapa yang menyimpan? Dan yang mana harus disimpan?
- 4) Membedakan portofolio kelompok dan individual.

Teknik Penilaian Portofolio

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolionya peserta didik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri.
- b) Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa sama bisa berbeda.
- c) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing di sekolah.
- d) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.
- e) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya para peserta didik. Contoh, Kriteria penilaian kemampuan menulis karangan yaitu: penggunaan tata bahasa, pemilihan kosa-kata, kelengkapan gagasan, dan sistematika penulisan. Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan (standar) guru dan berusaha mencapai standar tersebut.
- f) Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio.

Hasil kerja yang dimaksud di sini adalah produk kerja siswa yang bisa saja terbuat dari kain, kertas, kayu, plastic, keramik dan hasil karya seni seperti patung, dan lukisan. Hasil karya yang berupa hasil aransemen musik, koreografi, karya sastra tidak ter-masuk hasil kerja dalam konteks ini.

Dalam membuat suatu hasil karya ada tiga taha-pan yang harus dilalui siswa yaitu, (1) tahapan perencanaan atau perancangan, (2) tahap produksi, dan (3) tahap akhir. Walaupun terdiri dari beberapa tahapan tetapi semua tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu.

Penilaian hasil kerja biasanya digunakan guru untuk, (1) menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya, (2) menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada akhir suatu jenjang, dan (3) menilai keterampilan siswa yang memasuki institusi pendidikan kejuruan.

Instrumen Penilaian Produk

Penilaian terhadap hasil artikel/benda yang dihasilkan peserta didik pada periode tertentu. Contoh penerapan penilaian ini dalam pelajaran Aqidah akhlaq adalah penilaian terhadap hasil tulisan/karangan peserta didik tentang akhlak terhadap sesama manusia, pelestarian lingkungan hidup, bahaya narkoba, dan sebagainya. Instrumen untuk menilai produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat dinilai dengan menggunakan skala penilaian.

Contoh Instrumen Penilaian Produk Jenis karya tulis

Mata Pelajaran : PAI -Akhlaq

Kelas/Smtr :

Nama Produk : Karya tulis *Kebersihan adalah sebagian dari iman*

No.	Jenis Tugas	Aspek Penilaian	Nilai	Paraf Guru
1.		Kejelasan: <ul style="list-style-type: none"> • Tersusun dg baik • Tertulis dg baik • Mudah dipahami 		
		Informasi: <ul style="list-style-type: none"> • Akurat • Memadahi • Penting 		
	Jumlah			
	Rata-Rata			

Adapun contoh instrumen penilaian produk dalam mata pelajaran seni dan kerajinan, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar, kaligrafi), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c) Tahap penilaian produk, meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

Contoh Penilaian Produk Seni

Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti

Nama Proyek : Membuat kaligrafi

Nama Siswa : _____ Kelas : _____

No	Aspek	Skor (1 – 5)
1.	Perencanaan Bahan	
2.	Proses Pembuatan a. Persiapan Alat dan Bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kebersihan)	
3.	Hasil Produk a. Bentuk Fisik b. Inovasi	
	Total Skor	

5. Penilaian Sikap

Sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya (Sudjana, 2002). Arifin (1991), mengartikan sikap sebagai suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan dengan sikapnya.

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
- 2) **Sikap terhadap guru/pengajar.** Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
- 3) **Sikap terhadap proses pembelajaran.** Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

Teknik Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Observasi perilaku

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Misalnya guru yang ingin mengetahui apakah siswanya sudah memiliki sikap Rasul (siddiq, amanah, tabligh dan fathonah) ?. Untuk mengetahuinya guru dapat melakukan observasi terhadap

b. Pertanyaan langsung

Kita juga dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang mata pelajaran PAI. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.

Contoh Instrumen Penilaian Sikap Terhadap Mata Pelajaran PAI

Nama : Muhammad Santoso

Tanggal : 25 Maret 2011

Komponen Kerja	Kriteria Penilaian				
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tdk Setuju
Saya menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi keagamaan kepada teman-teman					
Saya bertanya kepada guru hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran Agama					
Saya menyempatkan diri membaca artikel / buku yang berkaitan dengan Agama Islam					
Saya selalu mencari informasi yang berhubungan pengetahuan ke-Islaman					
Selalu hadir					
Dst.					

Catatan:

1. Jika jawaban SS, skor nilai 81 – 100
2. Jika jawaban S, skor nilai 61 – 80
3. Jika jawaban N, skor nilai 51 – 60
4. Jika jawaban TS, skor nilai 41 – 50
5. Jika jawaban STS, skor nilai 0 – 40

c. Laporan pribadi

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang "Pergaulan siswa-siswi di sekolah" yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.

6. Penilaian Diri (self assessment)

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor.

- 1) Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya: peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata

h. Langkah-langkah Pembelajaran

1) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan **motivasi** dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian membuat **apersepsi** yang berkaitan dengan materi sebelumnya atau dengan konteks kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang terakhir adalah menyampaikan **tujuan pembelajaran**

2) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan *scientific* yang dapat berupa *Project Based Learning*, *Problem Based Learning* ataupun *inquiry approach*. Pendekatan *scientific* ini diterapkan secara sistematis dan sistemik melalui proses OQEXSAC (*Observing, Questioning, Exploring/Experimenting, Associating, Communicating*).

a) Mengamati(Observing)

Proses mengamati lebih mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Artinya peserta didik melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi kajian materi pembelajaran, seperti mengamati gambar, teks bacaan, peristiwa, film, demonstrasi tentang perilaku shalat, khutbah dan lain-lain.

b) Menanya(Questioning)

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ketika peserta didik memiliki rasa ingin tahu, maka mereka akan mengajukan pertanyaan baik kepada teman diskusinya ataupun kepada gurunya. Oleh karena itu, pada proses ini peserta didik diharapkan mampu bertanya atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi PAI untuk memenuhi rasa ingin tahu.

Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal.

c) Mencoba atau mengalami (experimenting)

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti misalnya, peserta didik harus memahami konsep-konsep yang terkait, dengan kehidupan sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, sedekah, kurban dan lain-lain meskipun uji coba ini dapat berupa simulasi dan menggunakan media imitasi (tiruan)

d) Menalar atau menganalisis (Associating)

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan tentang materi PAI dan Budi Pekerti. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.

e) Jejaring Pembelajaran atau menyajikan (networking atau communicating)

Jejaring pembelajaran atau menyajikan adalah suatu proses pembelajaran di mana peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Artinya dalam proses ini lebih menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama.

sumber (*source*) dan penerima (*receiver*) informasi. Masih dalam sudut yang sama, Kemp dan Dayton mengemukakan peran media dalam proses komunikasi sebagai alat pengirim (*transfer*) yang mentransmisikan pesan dari pengirim (*sender*) kepada penerima pesan atau informasi (*receiver*) (Pribadi, 1996). Sedangkan Oemar Hamalik mendefinisikan, media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran merupakan perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tujuan pengajaran tercapai secara efektif dan efisien.

Media komunikasi memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan maupun peningkatan mutu di suatu lembaga pendidikan (Nasution, 2002). Dengan memakai media tersebut anak didik akan mudah mencerna dan memahami suatu pelajaran. Dengan demikian melalui pendekatan ilmiah sistematis, dan rasional tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Danim, 1995: 7). Untuk mencapai tujuan tersebut, guru dituntut dapat menyeimbangkan antara media pembelajaran dan metode pengajaran sehingga informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa dengan baik (Danim, 1995: 7).

b. Sumber belajar dan media pembelajaran

Sumber belajar

Sumber belajar (*learning resource*) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya.

Colin Marsh (2008: 195) mengklasifikasikan sumber-sumber belajar pada 2 kelompok, yaitu sumber belajar yang ada di dalam kelas/sekolah dan di luar kelas/sekolah.

Sumber Belajar dalam Kelas/Sekolah

1. Bahan Cetak

- Buku teks
- Buku referensi
- Perlengkapan proyek pembelajaran
- Pamflet dan bahan-bahan murah lainnya
- Poster
- Permainan simulasi
- Peta, globe, dan model sumber lainnya

2. Multimedia

- Komputer personal
- Tablet
- Internet dan World Wide Web (WWW)
- CD-ROM
- DVD
- Blogs
- Televisi dan video
- Film
- Radio
- Slidetape dan filmstrip
- Overhead projector
- Whiteboard interaktif

Sumber Belajar di Luar Kelas/Sekolah

1. Sumber Budaya

- Museum
- Galeri seni
- Perpustakaan
- Arsip

2. Orang

- Orang dengan pekerjaan tertentu
- Orang pensiunan
- Kelompok, asosiasi dan organisasi

3. Bahan-bahan dan Artefak

- Koran
- Dokumen dan laporan
- Foto
- Rekaman
- Barang-barang personal lainnya

Terkait dengan bagaimana mengaplikasikan model ASSURE dalam pengembangan media pembelajaran, berikut ini dipaparkan contoh proses pengembangan media belajar dalam kurikulum 2013 misalnya dalam materi PAI dan Budi Pekerti.

ASSURE

- a. *Analyze learners* (menganalisis pembelajar): menganalisis kondisi pembelajar dari beberapa sudut pandang, misalnya:
 - Siswa cenderung kesulitan memahami sesuatu yang abstrak. Itu terbukti bahwa pada pertemuan sebelumnya siswa juga merasa kesulitan dalam memahami materi.
 - Siswa cenderung tidak semangat ketika mendapat penjelasan materi dengan menggunakan indera audio saja.
 - Siswa cenderung antusias mengikuti pembelajaran pada saat guru menggunakan sumber belajar lingkungan
 - Gaya belajar siswa-siswi terdapat 3 gaya. Gaya auditori (pendengar), visual (melihat), dan kinestetik (gerak)
- b. *State standards and objectives* (menetapkan standar dan sasaran): terdapat beberapa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus dipenuhi siswa terkait materi wudhu', yaitu misalnya KD-nya adalah:
 - 3.1 Memahami tata cara wudhu'
 - 4.1 Mempraktikkan wudhu'.Adapun indikatornya, misalnya, adalah:
 1. Menjelaskan arti wudhu'
 2. Menyebutkan rukun wudhu'
 3. Mempraktikkan wudhu' dengan tepat dan benar
- c. *Select strategies, media, materials* (memilih strategi, media, dan bahan): berdasarkan KD analisis pembelajar dan kompetensi dasar tersebut, selanjutnya guru menetapkan beberapa hal berikut:
 - Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik
 - Metodenya adalah diskusi kelompok dan demonstrasi
 - Media yang digunakan adalah multimedia
- d. *Utilize media and materials* (menggunakan media dan dan bahan): dalam tahap ini guru pengajar harus mengecek dan mempersiapkan media dan bahan, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan memperoleh pengalaman secara maksimal.
- e. *Require learners participation* (mengharuskan partisipasi pembelajar): dalam konteks ini, dengan dipilihnya dan diterapkannya strategi dan media belajar, kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa diharapkan dapat tersentuh. Hal tersebut ditandai dengan keaktifan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena pendekatan yang digunakan adalah saintifik, maka untuk siswa secara berkelompok membaca, mendiskusikan, menuliskan, mempresentasikan, dan mempraktikkan wudhu'. Selain itu, siswa secara individu siswajuga harus dapat mempraktikkan wudhu'.
- f. *Evaluate and revise* (mengevaluasi dan merevisi): pada tahap ini, guru dituntut untuk mengevaluasi dan merevisipencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya, khususnya pemilihan media dan pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh media dan materi yang dipilih/digunakan guru dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan: apakah media dan materi yang dipilih sudah baik, atau harus diperbaiki lagi. Ini selanjutnya akan menjadi *feedback* bagi perencanaan pembelajaran selanjutnya

6. Strategi penyampaian prosedur, tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut.
- b. Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa

Ditinjau dari guru, perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran berupa kegiatan guru menyampaikan atau mengajarkan kepada siswa. Sebaliknya, ditinjau dari segi siswa, perlakuan terhadap materi pembelajaran berupa mempelajari atau berinteraksi dengan materi pembelajaran. Secara khusus dalam mempelajari materi pembelajaran, kegiatan siswa dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : (1) menghafal; (2) menggunakan; (3) menemukan; dan (4) memilih.

 1. *Menghafal (verbal parafrase)*. Ada dua jenis menghafal, yaitu menghafal verbal (*remember verbatim*) dan menghafal parafrase (*remember paraphrase*). Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa adanya. Terdapat materi pembelajaran yang memang harus dihafal persis seperti apa adanya, misalnya nama orang, nama tempat, nama zat, lambang, peristiwa sejarah, nama-nama bagian atau komponen suatu benda, dsb. Sebaliknya ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal persis seperti apa adanya tetapi dapat diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri (hafal parafrase). Yang penting siswa paham atau mengerti, misalnya paham inti isi Pembukaan UUD 1945, definisi saham, dalil Archimides, dsb.
 2. *Menggunakan/mengaplikasikan (Use)*. Materi pembelajaran setelah dihafal atau dipahami kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi dalam proses pembelajaran siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan atau mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Penggunaan fakta atau data adalah untuk dijadikan bukti dalam rangka pengambilan keputusan. Penggunaan materi konsep adalah untuk menyusun proposisi, dalil, atau rumus. Selain itu, penguasaan atas suatu konsep digunakan untuk menggeneralisasi dan membedakan. Penerapan atau penggunaan prinsip adalah untuk memecahkan masalah pada kasus-kasus lain. Penggunaan materi prosedur adalah untuk dikerjakan atau dipraktekkan. Penggunaan materi sikap adalah berperilaku sesuai nilai atau sikap yang telah dipelajari. Misalnya, siswa berhemat air dalam mandi dan mencuci setelah mendapatkan pelajaran tentang pentingnya bersikap hemat.
 3. *Menemukan*. Yang dimaksudkan penemuan (*finding*) di sini adalah menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Menemukan merupakan hasil tingkat belajar tingkat tinggi. Gagne (1987) menyebutnya sebagai penerapan strategi kognitif. Misalnya, setelah mempelajari hukum bejana berhubungan seorang siswa dapat membuat peralatan penyiram pot gantung menggunakan pipa-pipa paralon. Contoh lain, setelah mempelajari sifat-sifat angin yang mampu memutar baling-baling siswa dapat membuat protipe, model, atau maket sumur kincir angin untuk mendapatkan air tanah.
 4. *Memilih* di sini menyangkut aspek afektif atau sikap. Yang dimaksudkan dengan memilih di sini adalah memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya memilih membaca novel dari pada membaca tulisan ilmiah. Memilih menaati peraturan lalu lintas tetapi terlambat masuk sekolah atau memilih melanggar tetapi tidak terlambat, dsb.

Apa yang dimaksud dengan materi prasyarat dan perbaikan, dan pengayaan?

Dalam mempelajari materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar terdapat beberapa kemungkinan pada diri siswa, yaitu siswa belum siap bekal pengetahuannya, siswa mengalami kesulitan, atau siswa dengan cepat menguasai materi pembelajaran. Kemungkinan pertama siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Misalnya, untuk mempelajari perkalian siswa harus sudah mempelajari penjumlahan. Untuk mengetahui apakah



siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat (*prequisite test*). Jika berdasar tes tersebut siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan. Bahan pembekalan (matrikulasi) dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya. Dalam menghadapi kemungkinan kedua, yaitu siswa mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan materi perbaikan (remedial). Materi pembelajaran remedial disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa. Untuk keperluan remedial perlu disediakan modul remedial. Dalam menghadapi kemungkinan ketiga, yaitu siswa dapat dengan cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran, guru harus menyediakan bahan pengayaan (*enrichment*). Materi pengayaan berbentuk pendalaman dan perluasan. Materi pengayaan baik untuk pendalaman maupun perluasan wawasan dapat diambil dari buku rujukan lain yang relevan atau disediakan modul pengayaan. Selain pengayaan, perlu dipertimbangkan adanya akselerasi alami di mana siswa dimungkinkan untuk mengambil pelajaran berikutnya. Untuk keperluan ini perlu disediakan bahan atau modul akselerasi.

j. Format Silabus dan RPP Berbasis Pembelajaran Aktif

Format Silabus dan RPP berbasis Pembelajaran Aktif yang biasa digunakan sebagai pengembangan dalam Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

Format Silabus (disesuaikan dengan format silabus kurikulum 2013)

Nama Sekolah :

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Wkt	Sumber/ Bahan/Alat

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran.....

.....

.....

G. Pendekatan/Strategi/Metode

- Pendekatan : Sainifik (*Scientific*).
 Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi
 Strategi : Card Sort, Poster Comment

H. Kegiatan Pembelajaran

KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Siswa menjawab salam dari guru Salah satu siswa memimpin doa di depan kelas. Siswa ditanya tentang keadaan mereka Assalamualaikum how are you? Just Fine Assalamu'alaikum Wa'alaikumsalam Assalamualaikum how are you ? Just Fine Siswa menjawab dengan antusias ketika guru mengecek kehadiran Siswa ditanya tentang pelajaran kemarin (Apersepsi) tentang sikap percaya diri Siswa antusias ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran 	20'
	<ul style="list-style-type: none"> Guru meminta peserta didik mengamati gambar anak-anak sedang berwudu dalam buku teks. Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. Guru memberikan pertanyaan untuk ditanggapi peserta didik. Misalnya, "Menurut kamu, gambar itu menceritakan apa?" Setelah peserta didik menyampaikan pendapatnya, guru menguatkan dengan memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut, termasuk menjelaskan pentingnya pola hidup bersih. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait materi ajar "arti bersuci dan macam-macam bersuci." Pada kolom "sikapku", guru meminta peserta didik bersama-sama mengucapkan "Aku harus bersihkan badan pakaian dan tempat". Pada kolom "ayo kerjakan" peserta didik secara berpasangan (dengan teman sebangku) dan mengemukakan jawaban atas perintah tugas secara bergantian. Jika memungkinkan dapat juga dibentuk kelompok lima orang untuk mendiskusikan perintah tersebut. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi disampaikan oleh juru bicara kelompok masing-masing secara bergiliran. Setiap kelompok mencocokkan kartu bendera (Card Sort/ sortir kartu) tentang jenis-jenis bersuci untuk dipajangkan dalam kelas 	100'

3. *Istinja*
4. Air, debu, atau batu (Jawaban Dikembangkan)
5. Bersih dan sehat

Penilaian 2

No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi	Indikator Soal (Uraian)	Nomor Butir Soal
1	KI-3Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahunya tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.	Mengenal tata cara bersuci.	Menjelaskan arti bersuci Menyebutkan macam-macam bersuci Menjelaskan arti (berwudu, mandi dan istinja')	1) Jelaskan arti bersuci! 2) Jelaskan benda apa saja yang digunakan untuk bersuci! 3) Jelaskan gunanya kita bersuci! 4) Sebutkan macam-macam bersuci! 5) Sebutkan benda yang bisa digunakan untuk berwudhu sebelum salat! 6) Jelaskan apa arti wudhu! 7) Jelaskan arti mandi! 8) Jelaskan kenapa kita disuruh untuk mandi! 9) Jelaskan arti istinja'! 10) Jelaskan kapan kita disuruh beristinja'!	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Kriteria penilaian

- Soal Sulit (15 poin) = Nomor 1, 6, 7 dan 9
 Soal Sedang (10 Poin) = Nomor 3 dan 8
 Soal Mudah (5 Poin) = Nomor 2, 4, 5 dan 10

Penilaian 3

Produk





Rubrik : Mewarnai gambar anak sedang berwudlu

Kriteria	Baik Sekali (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
				
Kemampuan mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu	Siswa belum mampu mewarnai gambar berdasarkan gambar anak berwudhu dengan

	dengan memadukan 4 warna	dengan 3 warna	dengan memadukan 2 warna	1 warna
--	--------------------------	----------------	--------------------------	---------

Penilaian 4 Performance

Rubrik : Menyebutkan macam-macam bersuci di dalam teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “

Kriteria	Baik Sekali (4) 	Baik (3) 	Cukup (2) 	Perlu Bimbingan (1) 
Kemampuan menyebutkan semua macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “	Siswa mampu menyebutkan semua macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “	Siswa mampu menyebutkan 2 macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “	Siswa mampu menyebutkan 1 macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “	Siswa belum mampu menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita berjudul “Aku Suka Bersuci “
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita “Aku Suka Bersuci “	Sangat baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita “Aku Suka Bersuci “	Baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita “Aku Suka Bersuci “	Cukup baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita “Aku Suka Bersuci “	Kurang baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia dalam menyebutkan macam-macam bersuci sesuai dengan teks cerita “Aku Suka Bersuci “

Penilaian 5 Projek

Rubrik : mencocokkan kartu bendera (Card Sort/ sortir kartu) tentang jenis-jenis bersuci

Kriteria	Baik Sekali (4) 	Baik (3) 	Cukup (2) 	Perlu Bimbingan (1) 
Kemampuan mencocokkan kartu bendera	Siswa mampu mencocokkan semua kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja’)	Siswa mampu mencocokkan 2 kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja’)	Siswa mampu 1 mencocokkan kartu bendera dari jenis bersuci (wudhu, mandi dan istinja’)	Siswa belum mampu mencocokkan kartu bendera

Selamat Mengerjakan !!!

LK 2

Dengan bimbingan Guru, bacalah teks cerita di bawah yang berjudul “ Aku Suka Bersuci”!

- 1) Carilah macam-macam bersuci di dalam teks tersebut!
- 2) Kemudian tuliskan di LK ini!
- 3) Lalu sebutkan macam-macam bersuci di depan kelas!
- 4) Tempelkan hasil kerja kalian di mading kelas!

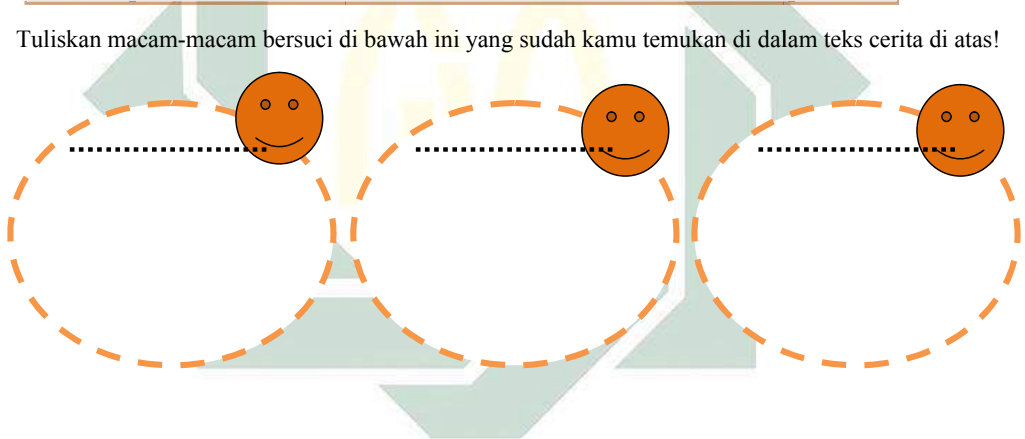
“Aku Suka Bersuci “

Aku selalu menjaga kebersihan dimanapun aku berada. Badanku juga selalu bersih karena setiap hari aku mandi sebanyak dua kali, yaitu pagi dan sore hari. Mandi untuk membersihkan badan dari kotoran.

Tiap pagi aku selalu buang air besar dan setiap selesai buang air besar maupun buang air kecil aku selalu membersihkan badanku dengan istinja’.

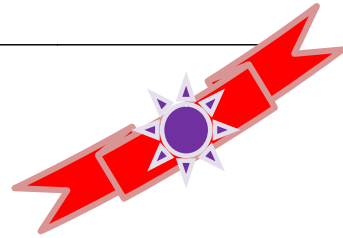
Aku adalah orang islam yang suka bersuci, karena setiap hari aku melaksanakan ibadah yaitu salat. Aku selalu mengambil air untuk berwudhu sebelum melaksanakan salat.

Tuliskan macam-macam bersuci di bawah ini yang sudah kamu temukan di dalam teks cerita di atas!



Selamat Mengerjakan!!!

LEMBAR KEGIATAN (LK 3)



- 1) Pada kelompok yang sama
- 2) Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan satu kartu bendera
- 3) Kemudian pasangkan kartu bendera yang berwarna merah dengan kartu bendera yang berwarna kuning yang sesuai
- 4) Tancapkan kertu bendera yang sesuai di atas sterofoum
- 5) Jelaskan di depan kelas isi kartu bendera tersebut
- 6) Hasil karya di kumpulkan sebagai pajangan kelas



I. Bahan Analisis RPP Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP X
 Kelas/Semester : VII/2
 Tema : Ingin meneladani Ketaatan Malaikat-malaikat Allah Swt
 Waktu : 3 jpl (3 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya
 KI-3 Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata)
 KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

- 1.3 Beriman kepada malaikat Allah Swt.,
 3.2 Memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil *naqli*
 4.2 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran aktif, siswa dapat:

1. Menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik.
2. Menyebutkan dalil *naqli* dan *aqli* tentang iman kepada Malaikat dengan tepat.
3. Menjelaskan tugas-tugas Malaikat dengan baik.
4. Menjelaskan keterkaitan tugas Malaikat dengan perbuatan dengan baik.
5. Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Malaikat dengan tepat.
6. Menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dengan tepat.
7. Melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Malaikat dengan sungguh-sungguh.

D. Materi Ajar

- Iman kepada Malaikat:
 - Dalil *naqli* dan *aqli* tentang iman kepada Malaikat
 - Nama-nama dan tugas Malaikat
 - Contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat

E. Metode Pembelajaran:

- Learning Start With a Question, Jigsaw, Every One is a Teacher Here, Diskusi, Role Play, Resitasi/Pengulangan.

F. Kegiatan Pembelajaran:

❖ Kegiatan Awal/Persiapan (15')

- ☞ Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdo'a bersama,
- ☞ Guru memeriksa kehadiran siswa, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran,
- ☞ Guru melakukan appersepsi dengan bertanya tentang 10 malaikat yang wajib diketahui, - *learning start with a question*

- ☞ Guru memotivasi siswa dengan memperdengarkan lagu tentang iman kepada malaikat sesuai dengan tema,
- ☞ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

❖ Kegiatan inti (90')

- ☞ Guru meminta siswa untuk mencermati dan merenungkan tayangan Audio Visual dari Ayat 30 surat al-Baqarah beserta artinya, dan video tentang “Perilaku Beriman kepada Malaikat”. (LK.1)
- ☞ Guru membacakan LK. 1 melalui Slide Power Point
- ☞ Siswa mengemukakan hasil pencermatan/pengamatan tersebut.
- ☞ Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang apa yang dikemukakan siswa terhadap tayangan Ayat 30 surat al-Baqarah dan video tentang “Perilaku Beriman kepada Malaikat” tersebut.
- ☞ Guru menampilkan slide Peta Konsep tentang materi Iman kepada Malaikat.
- ☞ Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan jumlah aspek materi pada Peta Konsep (1. kelompok materi “malaikat dan sifatnya serta perbedaan malaikat dengan jin dan manusia”, 2. kelompok materi “malaikat dan tugasnya serta hikmah beriman kepada malaikat”, 3. kelompok materi “perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Swt”). – JIGSAW
- ☞ Guru meminta masing-masing anggota kelompok untuk membuat 1 pertanyaan sesuai dengan materi kelompok masing-masing sesuai dengan perintah pada LK.2.
- ☞ Guru membagikan LK.2. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan Lk.2.
- ☞ Masing-masing kelompok diminta untuk menukar pertanyaan kepada kelompok lain: (kelompok 1 kepada kelompok 2, kelompok 2 kepada kelompok 3, dan kelompok 3 kepada kelompok 1).
- ☞ Masing-masing siswa diminta untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang ada di tangan masing-masing. – EVERY ONE IS a TEACHER HERE
- ☞ Guru meminta setiap kelompok masing-masing diwakili 1 siswa untuk membaca pertanyaan dan jawabannya secara bergantian, siswa lain menanggapi.
- ☞ Guru membagikan teks bacaan materi tentang “Beriman kepada Malaikat” kepada semua siswa
- ☞ Guru meminta masing-masing kelompok untuk memilih 3 pertanyaan yang dipegang oleh kelompok masing-masing, kemudian meminta mereka untuk mencari jawabannya melalui berbagai sumber, di antaranya melalui teks bacaan yang telah dibagikan atau melalui pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. (LK.3)
- ☞ Guru meminta masing-masing siswa untuk membaca teks yang sudah dibagikan kemudian bersama kelompoknya berdiskusi untuk merumuskan jawaban atas 3 pertanyaan yang sudah dipilih tersebut - DISCUSS
- ☞ Guru meminta siswa untuk menulis jawaban pertanyaan dari hasil diskusi kelompok tersebut dalam bentuk **Peta Konsep** di atas kertas *karton/manila* yang sudah disediakan
- ☞ Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya pada kelompok lain (kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 & kelompok 3 ke kelompok 1).
- ☞ Siswa menanggapi hasil kerja kelompok lain secara lisan serta dengan menulis komentar di kertas post it dan menempelkannya pada kertas hasil diskusi kelompok
- ☞ Masing-masing kelompok menempel hasil kerja yang sudah dipresentasikan dan sudah ditempel komentar pada papan pajangan (papan tulis)
- ☞ Guru membagikan teks cerita tentang “Kejujuran Seorang Santri” kepada masing-masing kelompok
- ☞ Siswa membaca dan memahami teks cerita “Kejujuran Seorang Santri”
- ☞ Guru membagikan skenario bermain peran sesuai dengan cerita “Kejujuran Seorang Santri” – ROLE PLAY

- ☞ Guru membagi peran sebagai berikut: satu siswa dari kelompok 1 berperan menjadi Kyai, satu siswa dari kelompok 2 berperan mejadi santri yang jujur, dan lima siswa dari kelompok 3 menjadi siswa yang belum memahami hakikat kejujuran.
- ☞ Siswa memainkan peran sesuai dengan scenario dalam cerita “Kejujuran Seorang Santri”
- ☞ Guru bersama siswa memberikan “applous” untuk menghargai siswa-siswa yang telah bermain peran dengan baik.
- ☞ Siswa mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari cerita “Kejujuran Seorang Santri”
- ☞ Guru memberikan tambahan penjelasan dan penguatan terhadap hasil permainan peran dari cerita “Kejujuran Seorang Santri” tersebut.

❖ Penutup (15’)

- ☞ Guru dan siswa menyimpulkan intisari dari materi pelajaran yang telah dipelajari dengan slide power point yang diiringi sayup suara lagu “Iman kepada Malaikat”.
- ☞ Guru Bersama siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah di laksanakan selama proses pembelajaran.
- ☞ Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah (PR) untuk mengerjakan tugas yang ada pada buku siswa halaman 95-99. - RESITASI
- ☞ Guru memberikan dorongan spiritual terkait materi yang telah disampaikan, dan
- ☞ Guru menutup pelajaran dengan bacaan *hamdalah* dan berdoa ber-sama-sama.

G. Alat dan Sumber Belajar:

- ☞ Video (Film) tentang Iman Kepada Malaikat
- ☞ Audio Visual Ayat 30 Q.S. Al-Baqarah dengan artinya, oleh H. Mu’ammam ZA.
- ☞ Slide Power Point dan Peta Konsep “Beriman Kepada Malaikat”
- ☞ Lap Top
- ☞ Proyektor
- ☞ Sound (microphone)
- ☞ Lembar Kerja Siswa (LK. 1, LK.2 dan LK.3)
- ☞ Teks materi tentang “Beriman Kepada Malaikat”
- ☞ Kertas HVS warna warni
- ☞ Kertas Karton/Manila
- ☞ Spidol Warna-Warni (Merah, Biru, dan Hitam)
- ☞ Kertas post it
- ☞ Isolasi
- ☞ Teks Cerita Berjudul “Kejujuran Seorang Santri”
- ☞ Skenario Drama Kisah “Kejujuran Seorang Santri”
- ☞ Tusuk Gigi
- ☞ Gambar-gambar tentang beriman kepada Malaikat
- ☞ Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 Mapel “ Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Kelas VII”

H. Penilaian

Sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013, penilaian yang dilakukan guru mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengamatan Berdiskusi

Nama siswa	Aspek yang dinilai			Nilai	Ketuntasan		Tindak lanjut	
	1	2	3		Tuntas	Tidak Tuntas	Remedial	Pengayaan

Aspek dan Rubrik Penilaian

- a. Kejelasan dan kedalaman informasi tentang jawaban dari pertanyaan
 - 1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap namun kurang sempurna, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi namun kurang lengkap, skor 10.
- b. Keaktifan dalam diskusi
 - 1) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.
- c. Kejelasan dan kerapian presentasi hasil diskusi
 - 1) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan kurang rapi, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 10.

Bermain Peran

Nama siswa	Aspek yang dinilai			Nilai	Ketuntasan		Tindak lanjut	
	1	2	3		Tuntas	Tidak Tuntas	Remedial	Pengayaan

Aspek dan Rubrik Penilaian

- a. Kejelasan dan kedalaman informasi tentang jawaban dari pertanyaan
 - 1) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap namun kurang sempurna, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi namun kurang lengkap, skor 10.
- b. Penghayatan yang diperankan
 - 1) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan sangat baik, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan baik, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut memerankan perannya dengan kurang baik, skor 10.

- c. Kerjasama
- 1) Jika kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan sangat baik, skor 30.
 - 2) Jika kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan baik, skor 20.
 - 3) Jika kelompok tersebut bekerja samanya kurang baik, skor 10.

🌀 **Tugas “Ayo Berlatih” dalam buku siswa hal 95-99**

- 1) Penerapan
- 2) Pilihan Ganda
- 3) Uraian
- 4) Tugas pengamatan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan uraian)} \times 100}{100}$$

Untuk tugas pengamatan, skor nilainya sebagai berikut:

1. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
2. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
3. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh siswa adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda, uraian dan tugas x 50%
- b. Jumlah nilai pada kolom diskusi, bermain peran dan penerapan x 50%

$$\text{Nilai Akhir} = \text{nilai a} + \text{nilai b}$$

Surabaya, 01 Juni 2014

Mengetahui Kepala SMPX

Guru PAI dan Budi Pekerti:

m. Bahan Analisis RPP Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Nama Sekolah	: SMA X
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester	: X (Sepuluh)/ 1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	: 3 x 45 Menit
Pertemuan	: Pertama
Materi Pokok	: Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10

A. Kompetensi Inti

- (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- (K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- (K4) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 1.2 Berpegang teguh kepada Al-Quran, Hadits dan Ijtihad sebagai pedoman hidup
- 2.3 Menunjukkan perilaku kontrol diri (mujahadah an-nafs), prasangka baik (husnuzzhan), dan persaudaraan (ukhuwah) sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al-Anfal
- 4.1.1 Membaca Q.S. Al-Anfal (8) : 72; Q.S. Al-Hujurat (49) : 12; dan Q.S. Al-Hujurat (49) : 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 4.1.1.1 Mendemonstrasikan bacaan tajwid pada Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .
- 4.1.1.2 Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui model *cooperative learning* peserta didik dapat:

1. Mendemonstrasikan bacaan tajwid pada Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .
2. Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 dengan benar dan tartil .

E. Materi Pembelajaran

1. Q.S. Al-Anfal (8): 72

G. Media Pembelajaran

Kartu Bacaan Tajwid
Multimedia Interaktif/CD Interaktif /Video

H. Sumber Belajar

Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls X SMA

I. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh <i>khushyu'</i> ; b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran; c. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. a. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai; b. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, ,menanya, eksplorasi dan mengomunikasikan serta menyimpulkan	10 menit
2.	Kegiatan Inti <ul style="list-style-type: none">• Menirukan guru membaca Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10 (jika sekolah ada LCD atau tape recorder, guru dapat memutarakan MP3 bacaan Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10)• Secara berpasangan menyimak membaca Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10• Siswa secara berpasangan membaca bacaan tajwid Q.S. Al-Anfal (8): 72; Q.S. Al-Hujurat (49): 12 dan 10• Siswa menanyakan bacaan tajwid yang tidak dipahami kepada kelompok berpasangan lainnya• Kelompok yang lain memberikan jawaban atas pertanyaan siswa• diskusi kelompok tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah• Menghubungkan kisah orang yang selamat dari musibah dengan keberadaan malaikat• Menyampaikan hasil diskusi iman kepada malaikat secara kelompok• Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah)• Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru	115 menit
3.	Penutup a. Bersama-sama dengan siswa-siswi menyimpulkan materi pelajaran b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang	10 menit

Portofolio

- Membuat paparan tentang bukti-bukti adanya malaikat Allah

Tes

- Tes tulis tentang nama, sifat dan tugas malaikat Allah

Guru juga melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan mengamati kisah pada kolom “ayo berlatih”.

Rubrik Penilaian

No.	Aspek	*Nilai			
		1	2	3	4
1	Penguasaan materi				
2	Penguasaan nilai-nilai				
3	Keaktifan				
4	Kesantunan				

Catatan :

*4 = Sangat Baik 3 = Baik
2 = Sedang 1 = Kurang baik

Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal

$$= 16 - 4$$

$$= 12/4$$

$$= 3$$

$$MK = 14 - 16$$

$$MB = 11 - 13$$

$$MT = 7 - 10$$

$$BT = 4 - 6$$

Keterangan:

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MK : Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

Gurudapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Mengetahui,
Kepala SMA X.

.....
ru Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti

D. RANGKUMAN

Perangkat pembelajaran berupa RPE, Prota, Prosem, dan Silabus yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengacu pada buku guru dan siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Karena pada Kurikulum 2013 Guru PAI dan Budi pekerti diperkenalkan adanya buku Guru dan Buku siswa yang di desain oleh tim pusat. Dari buku guru dan buku siswa tersebut dijabarkan kembali menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik yaitu, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA 7.1 ANALISIS BUKU GURU DAN BUKU SISWA

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KERJA ANALISIS BUKU GURU DAN BUKU SISWA

Kompetensi

1. Memahami strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk kegiatan pembelajaran.
2. Menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntutan SKL, KI, dan KD.
3. Menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecukupan dan kedalaman materi.

Tujuan

1. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan SKL, KI dan KD.
2. Menganalisis keterpaduan antar mata pelajaran atau antar konsep/topik.
3. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan konsep pendekatan *scientific* dan penialain autentik.
4. Merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis.

Panduan Kegiatan

1. Kerjakanlah secara berkelompok!
2. Pelajari format Analisis Buku Guru dan Buku Siswa!
3. Siapkan SKL, KI dan KD sesuai jenjang pendidikan dan mata pelajaran!
4. Cermatilah buku guru dan buku siswa yang sesuai dengan materi ajar yang Anda ampu!
5. Lakukanlah analisis terhadap buku tersebut dengan menggunakan format yang tersedia!
6. Berdasarkan hasil analisis, tuliskan tindak lanjut hasil analisis sebagai berikut!
 - a. Jika sesuai dengan kebutuhan, buku bisa digunakan dalam pembelajaran.
 - b. Jika kurang/tidak sesuai, Anda disarankan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dikerjakan guru sebagai pengguna buku guru tersebut.

No.	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
F.	Pemilihan Media Belajar	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.				
2.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan <i>scientific</i> .				
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
G.	Model Pembelajaran	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.				
2.	Kesesuaian dengan pendekatan <i>Scientific</i> .				
H.	Skenario Pembelajaran	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.				
2.	Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan <i>scientific</i> .				
3.	Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.				
4.	Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.				
I.	Penilaian	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.				
2.	Kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi.				
3.	Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.				
4.	Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal.				
Jumlah					



 **Kanzun**
BOOKS